

DOKUMEN LAMPIRAN

***MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI &
TELEKOMUNIKASI (e-GOVERNMENT)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM)***

TAHUN 2010 - 2014



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
2009**

Daftar Isi

<i>BAB I KERANGKA DASAR PEMIKIRAN</i>	3
1.1 Dasar Pengembangan Sistem e-Government	3
1.1.1 Visi, Misi dan Strategi e-Government Kab Karangasem	3
1.1.2 Model Pengembangan sistem e-Government	7
1.2 Deskripsi Kondisi Sistem e-government saat ini	10
1.2.1 Deskripsi Kondisi saat ini dari Arah Kebijakan e-Government	10
1.2.2 Deskripsi kondisi saat ini dari sisi Legalitas Pengembangan e-Government	10
1.2.3 Deskripsi Kondisi saat ini dari sisi Organisasi Pengelolaan e-Government	11
1.2.3 Deskripsi Kondisi saat ini dari sisi Pemanfaatan Aplikasi e-Government	11
1.2.4 Deskripsi Kondisi saat ini dari sisi Infrastruktur e-Government	18
1.2.3 Deskripsi Kondisi SDM e-Government di SKPD	21
1.3 Deskripsi Kebutuhan dan Kesiapan Masyarakat Saat ini	22
1.3.1 Deskripsi Kebutuhan dan Kesiapan Penduduk	22
1.3.2 Deskripsi Kebutuhan dan Kesiapan Pengusaha	24
1.4 Deskripsi Kondisi Ideal yang akan dicapai	26
1.4.1 Gambaran Kondisi Ideal yang ingin dicapai secara umum	26
1.4.2 Tinjauan Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan	27
1.4.3 Tinjauan Peta Solusi Aplikasi e-Government	29
1.4.4 Analisis Hubungan Tupoksi antar SKPD	31
1.4.5 Tinjauan terhadap Persyaratan Dukungan Infrastruktur	34
1.5 Analisis SWOT	38
1.6 Analisis Kesenjangan Kebutuhan Komponen e-Government	41
1.6.1 Deskripsi Kesenjangan Aplikasi	41
1.6.2 Deskripsi Kesenjangan Infrastruktur	47
<i>BAB II RANCANGAN KEBUTUHAN DAN STANDARISASI</i>	53
2.1 Rancangan Kebutuhan Aplikasi	53
2.1.1 Kebutuhan Aplikasi Khusus	53
2.1.2 Pemetaan Untuk Proses Pengembangan Aplikasi	59
2.1.3 Integrasi dan Interoperabilitas Data dan Aplikasi	61
2.1.4 Pemetaan Hubungan Antar Aplikasi Khusus	65
2.1.5 Model Arsitektur Aplikasi	68

2.2	Rancangan Kebutuhan Infrastruktur	70
2.2.1	Daftar Kebutuhan Infrastruktur di Pusat Data and Operasional Jaringan Kabupaten	72
2.2.2	Kebutuhan Infrastruktur Koneksi Jaringan antar SKPD	74
2.2.3	Kebutuhan Infrastruktur Komputer Koneksi Jaringan lokal SKPD	77
2.3	Standardisasi Pemenuhan Kebutuhan Aplikasi	80
2.4	Standardisasi Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur	86
2.5	Perkiraan Rencana Anggaran Biaya e-Government	91
<i>BAB III PETA TAHAPAN PENGEMBANGAN</i>		94
3.1	Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	94
3.2	Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Database	98
3.3	Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	99
<i>BAB IV REKOMENDASI STRATEGI IMPLEMENTASI</i>		102
4.1	Kepemimpinan	102
4.2	Manajemen SDM	104
4.3	Manajemen Organisasi	105
4.4	Manajemen Teknologi	106
4.5	Manajemen Anggaran	108
4.6	Manajemen Perubahan	109

Lampiran

BAB I

KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

1.1 Dasar Pengembangan Sistem e-Government

1.1.1 Visi, Misi dan Strategi e-Government Kab Karangasem

Kabupaten Karangasem berada di belahan timur Pulau Bali yang secara administratif merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Bali. Seperti yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi Pemerintah Kabupten Karangasem sampai dengan tahun 2010 adalah: "**Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma**". **Jagadhita** artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator oleh pemerintah. Sedangkan **Ya Ca Iti Dharma** artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut terminologi Agama dan Hukum Positif.

Untuk tercapainya Visi tersebut, maka perlu adanya penjabaran fungsi-fungsi Pemerintahan ke dalam Misi, yang sinergis dengan upaya pencapaian Visi. Dalam hal ini dirumuskan Misi Pemerintah dalam rangka tercapainya Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma yaitu :

1. Misi Penyelenggara Tugas-tugas Umum Pemerintahan yang meliputi: Optimalisasi Pelayanan, Pendayagunaan Aparatur, Pendayagunaan Organisasi dan Sistem, Fasilitasi Antar Stake Holder, Demokratisasi,

dan Pelaksana Peraturan Perundangan Negara dalam lingkup wilayah Kabupaten Karangasem.

2. Misi Penyelenggaraan Pembangunan yang meliputi: Pendayagunaan Potensi, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan dalam segala bidang, Menjaga Kelestarian Lingkungan baik lingkungan fisik maupun non fisik.
3. Misi Sosial Kemasyarakatan yang meliputi: Pengentasan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat, Menjalin Kemitraan Strategis dengan Stake Holder, Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pelestarian nilai-nilai Budaya Bali dan Agama khususnya Agama Hindu.

Agar misi tersebut dapat terlaksana, telah dirumuskan lima strategi dimana semua strategi tersebut merupakan lima pilar utama yang berperan dalam penguatan pelaksanaan Otonomi Daerah. Lima strategi yang dimaksud adalah :

- a. Kebijakan dalam bidang kelembagaan
Mengoptimalkan sumber daya yang terbatas yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip kelembagaan yang miskin struktur kaya fungsi.
- b. Penataan Personil
Setelah terwujudnya penataan kelembagaan, maka perlu adanya personil yang memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan, dengan jaminan karier dan kesejahteraannya, untuk memacu prestasi, dedikasi dan produktivitas kerja sebagai pelayan masyarakat.
- c. Penguatan Keuangan
Aspek keuangan sangat diperlukan dalam rangka pembiayaan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan penguatannya

diupayakan melalui terobosan terhadap sumber-sumber keuangan yang ada.

d. Penguatan Aspek Perwakilan

Persoalan mendasar dalam perwakilan tersebut adalah sejauhmana aspirasi masyarakat telah teratikusasi kedalam program-program pelayanan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu adanya akses dari masyarakat terhadap lembaga perwakilan, untuk menciptakan intensitas hubungan yang efektif antara rakyat dan wakilnya.

e. Penguatan Manajemen Urusan Otonomi Daerah

Setelah urusan kelembagaan, personil, keuangan dan perwakilan maka hal penting berikutnya adalah penguatan manajemen urusan-urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka pengembangan e-Government yang selaras dan mendukung pencapaian visi, misi dan strategi tersebut, pemerintah Kabupaten Karangasem perlu memiliki visi misi dan strategi e-government sebagai arah kebijakan e-Government yang sejalan dengan pernyataan visi, misi dan strategi yang telah dituangkan di RPJM Kabupaten Karangasem di atas.

Contoh rumusan visi, misi dan strategi e-government Karangasem

Visi e-Government Karangasem

Menjadi pemerintahan kabupaten yang memiliki kualitas kerja dan layanan publik yang prima melalui pemanfaatan kemajuan TIK dalam rangka mendorong pengembangan potensi ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Misi e-Government Karangasem

1. *meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas pelayanan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan*
2. *memberdayakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga layanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat*
3. *mendukung upaya akselerasi pemberdayaan potensi sumber daya ekonomi secara berkesinambungan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata*

Strategi e-Government Karangasem

Sedangkan strategi di bidang e-Government yang mendukung penerapan lima strategi pembangunan kabupaten Karangasem:

1. *pengembangan sistem manajemen koordinasi dan pengelolaan dokumen berbasis elektronik yang mengarah pada paperless dalam mendukung pengelolaan sistem dan manajemen kerja lembaga pemerintahan daerah yang kaya fungsi dan minim struktur*
2. *pengembangan layanan sistem manajemen kepegawaian berbasis elektronik secara efektif, efisien dan transparan yang mencakup pengelolaan administrasi, pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan serta sistem penilaian dan evaluasi pegawai*
3. *pengembangan layanan sistem manajemen potensi pendapatan dan pengelolaan biaya berbasis TIK yang terintegrasi antar SKPD, tercatat, akurat, transparan dan akuntabel*
4. *pengembangan layanan sistem komunikasi berbasis elektronik yang dapat meningkatkan akses publik yang mudah dan murah dalam menyalurkan aspirasi mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat dan memberikan umpanbalik terhadap kualitas kinerja pemerintahan*

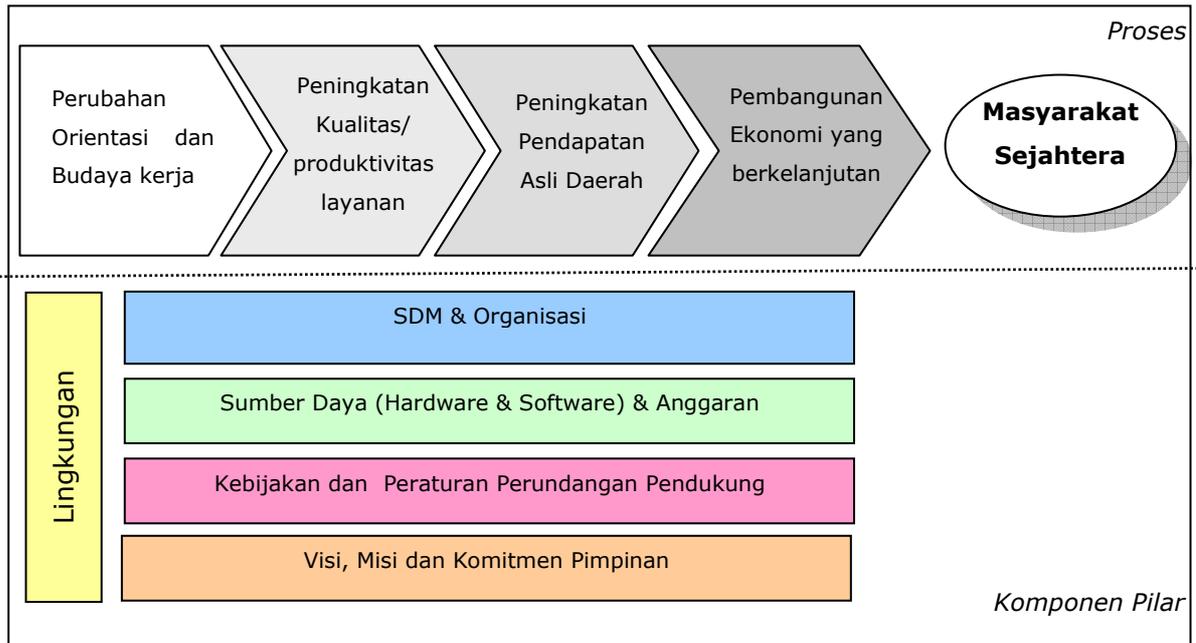
5. pengembangan layanan sistem manajemen urusan-urusan yang dilimpahkan ke pemerintahan kabupaten berbasis elektronik yang digunakan oleh setiap satuan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi terkait. Layanan sistem manajemen tersebut terintegrasi dan mendukung interoperabilitas antar sistem yang dimiliki masing-masing satuan kerja terkait

1.1.2 Model Pengembangan sistem e-Government

Mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, salah satu kunci keberhasilan dari terlaksananya pengembangan dan implementasi pelayanan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-Government*, akan sangat tergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang membangun sistem *e-Government*, yaitu infrastruktur perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang tersedia, infrastruktur aplikasi perangkat lunak yang akan dibangun atau yang telah digunakan, kompetensi SDM aparatur pendukung dan organisasi pengelola sumber daya TIK.

Pengembangan *e-Government* melalui komponen-komponen sistemnya tersebut diharapkan akan dapat memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan pemerintah, baik pelayanan kepada publik yang mencakup pelayanan dalam penyampaian informasi kepada publik, melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, menampung masukan dan keluhan publik serta meresponnya, maupun pelayanan bersifat koordinasi internal antar satuan kerja pemerintah dalam konteks *good governance*.

Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan tahapan-tahapan strategis dan sistematis yang ditopang oleh komponen-komponen e-government. Model transformasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Model Pengembangan e-Government

Berdasarkan model tersebut tampak bahwa model pengembangan e-government akan berhubungan dengan 2 dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi pilar.

Dimensi pilar e-Government merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar proses transformasi dapat berjalan dan nantinya menuju pada visi yang ingin dicapai. Komponen yang paling mendasar adalah adanya visi, misi e-Government dimana pemimpin memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Komitmen dan keinginan yang cukup kuat dari pemimpin tidak berarti apa-apa jika komitmen tersebut tidak dituangkan dalam suatu dokumen kebijakan dan peraturan perundangan yang mendukung.

Keberadaan peraturan akan menciptakan ruang dan dukungan bagi penyediaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan e-government. Ketersediaan anggaran dan sumber daya TIK (hardware & Software) juga baru akan mampu mendorong terjadinya inisiasi proses transformasi jika SDM aparaturnya dan organisasi pelaksana memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan anggaran tersebut. Lingkungan yang dalam hal ini bentuknya dapat berupa kesiapan dan tuntutan layanan publik, kemajuan teknologi informasi dianggap sebagai komponen pilar karena keberadaan lingkungan juga akan dapat menjadi engine dalam memotivasi terjadinya proses transformasi dan keberadaan dari setiap komponen pilar. Oleh karena itu keberadaan seluruh komponen pilar akan sangat menentukan berjalannya proses transformasi yang terjadi di setiap tahapnya

Sedangkan dimensi proses menunjukkan proses transformasi yang secara sekuensial dan bertahap menuju visi yang dicita-citakan dengan parameter-parameter kondisi yang harus dicapai setiap tahapnya. Berdasarkan dari model yang dikemukakan, dapat dilihat bahwa awal dari proses transformasi tersebut dimulai dari perubahan orientasi dan budaya kerja dimana lembaga pemerintah beserta aparaturnya harus mampu mengubah orientasi kerja yang lebih bersifat melayani dan budaya kerja yang memanfaatkan TIK. Artinya terjadinya perubahan orientasi dan budaya kerja merupakan prasyarat agar proses selanjutnya yaitu proses peningkatan kualitas layanan dapat berjalan. Tanpa adanya perubahan mendasar terhadap orientasi dan budaya kerja maka proses transformasi berpotensi menemui kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

1.2 Deskripsi Kondisi Sistem e-government saat ini

1.2.1 Deskripsi Kondisi saat ini dari Arah Kebijakan e-Government

Ditinjau dari arah dan strategi pengembangan e-Government, belum terdapat suatu dokumen perencanaan strategis yang di dalamnya telah menjabarkan hubungan antara visi, misi, strategi dan program dengan sistem e-Government termasuk mengatur tahapan dan substansi pengembangan e-Government yang dapat menjadi acuan bagi setiap SKPD. Sementara saat ini, pola pengembangan komponen e-government dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku saat ini dilakukan secara parsial oleh setiap SKPD. Agar pengembangan secara parsial tersebut tetap dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis di bidang pengembangan dan penerapan e-Government. Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan mengenai pengembangan sistem e-government yang terencana, terpadu, menyeluruh dan terintegrasi.

1.2.2 Deskripsi kondisi saat ini dari sisi Legalitas Pengembangan e-Government

Ditinjau dari aspek legalitas, walaupun urusan Komunikasi dan Informasi termasuk dalam urusan wajib bagi pemerintah daerah, sejauh ini belum ada peraturan daerah ataupun keputusan pimpinan daerah yang secara tersurat mewajibkan setiap SKPD mengembangkan e-Government dalam mendukung penyelenggaraan layanan SKPD berikut mekanisme asesmen dan penghargaan terhadap SKPD dalam mengembangkan sistem e-Government. Sampai saat ini acuan dalam pengembangan e-government masih berdasarkan Inpres Nomor 3 tahun 2003 mengenai Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government.

1.2.3 Deskripsi Kondisi saat ini dari sisi Organisasi Pengelolaan e-Government

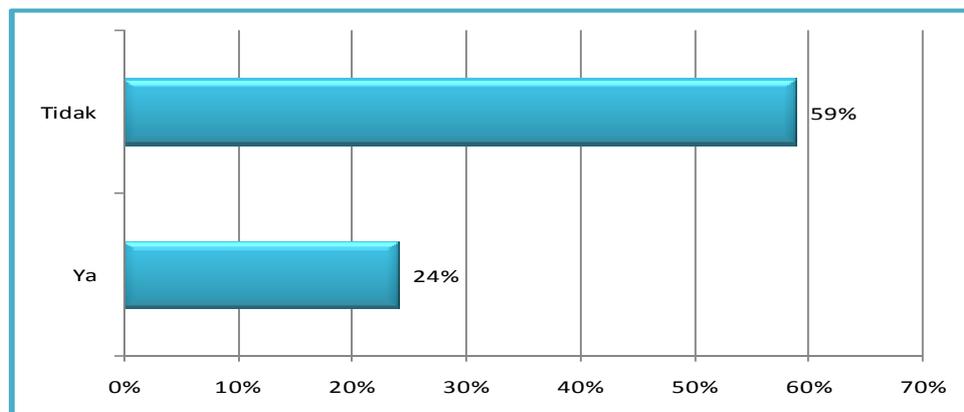
Ditinjau dari aspek struktur organisasi, Kabupaten Karangasem telah memiliki SKPD yang dapat berperan sebagai motor penggerak pengembangan sistem e-Government yaitu Dinas Kominfo yang dikepalai oleh pejabat eselon II. Hal ini menjadi salah satu modal penting dalam pengembangan e-Government. Walaupun demikian eksistensi serta kewenangan SKPD tersebut sebagai leading sector yang mengkoordinasi pengembangan komponen sistem e-Government di seluruh SKPD perlu terus ditingkatkan sehingga kedudukannya akan cukup strategis. Dengan demikian peluang pengembangan komponen e-Government antar SKPD yang terintegrasi dapat tercapai.

1.2.3 Deskripsi Kondisi saat ini dari sisi Pemanfaatan Aplikasi e-Government

- Ditinjau dari metode penyimpanan file, sebanyak 72% SKPD menggunakan metode penyimpanan file manual di lemari. Sementara metode penyimpanan dengan file elektronik yang terdistribusi di beberapa komputer dilakukan oleh 26% SKPD, tidak ada yang melakukan metode sentralisasi file, tetapi ada 4% SKPD yang menggunakan Document Management System sebagai media penyimpanan dokumen.
- Dari sisi pemanfaatan dan penggunaan aplikasi umum, penggunaan aplikasi perkantoran didominasi oleh Microsoft Word dan Excel (sebanyak 85% dan 83%) sebagai aplikasi umum perkantoran. Sedangkan untuk aplikasi database, penggunaannya masih sangat jarang kecuali Microsoft access yang telah digunakan oleh sebanyak 13 % responden.

Penggunaan perangkat lunak developer juga belum mendominasi, karena 22% responden belum pernah menggunakannya, sedangkan 13% yang pernah menggunakan visual basic

- o Ditinjau dari sisi pengadaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi khusus, beberapa SKPD di Kabupaten Karangasem telah memiliki aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi beberapa SKPD tersebut walaupun aplikasi yang ada kebanyakan berasal dari program bantuan pemerintah pusat.



Gambar 1.2 Penggunaan Aplikasi Khusus

Data yang diperoleh menunjukkan hanya 24% responden yang sudah memiliki dan menggunakan aplikasi khusus. Berikut Daftar SKPD yang telah memiliki dan menggunakan aplikasi khusus

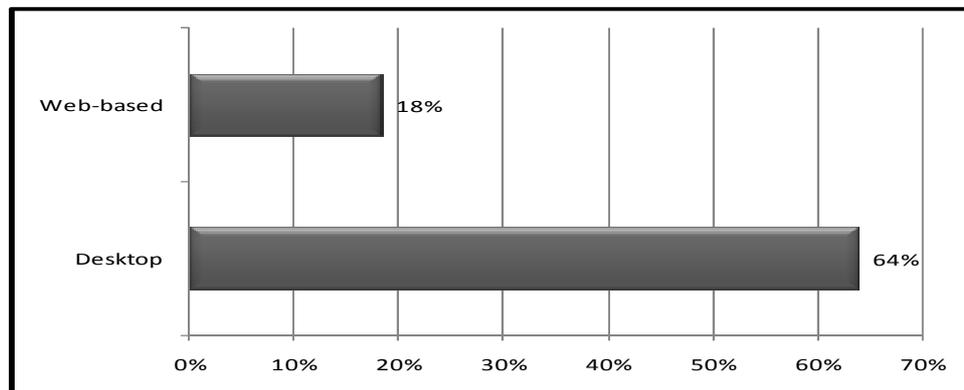
Tabel 1.1 Penggunaan Aplikasi Khusus

No	SKPD	Nama Aplikasi	Fungsi/Manfaat Aplikasi	Tahun Pembuatan	Tahun Penggunaan
1	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu	Aplikasi Perijinan	Mengolah data perijinan	2005	2005
2	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Otomasi perpustakaan	Memudahkan peminjaman dan pengembalian	2009	-

No	SKPD	Nama Aplikasi	Fungsi/Manfaat Aplikasi	Tahun Pembuatan	Tahun Penggunaan
			buku		
3	Dinas Kesehatan	SIK	Mengelola database kesehatan penduduk	2009	2009
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	SMS Gateway	Media komunikasi dan informasi publik via SMS	2009	2009
		Mail server	Media komunikasi dan informasi publik via e-mail	2009	2009
5	Bagian Keuangan	GDO	Aplikasi Daftar Gaji Pegawai	1990	1990
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Potensi Ekonomi Daerah	Menginformasikan masalah potensi ekonomi di Kab. Karangasem	2009	2009
7	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG	Informasi data pegawai	2008	2008
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIKAK	Mengolah data kependudukan	2007	-
9	Kantor Ketahanan Pangan	SAKDA	Pembuatan SP2D dan Lap.S4i	2008	2009
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	NUPTK	Pengolahan data pendidik / kependidikan	-	-
		PADATI	Pengolahan data pendidikan	-	2005
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	SPM9	Membuat SPM untuk dana APBN (TP)	2009	2009
		SIMAK BMN	Mencatat Informasi Barang Milik Negara	2008	2009
		SAK PA 08	Membuat Laporan Keuangan Dana APBN	2008	2009
		Aplikasi Persediaan	Mencatat Barang Persediaan Dana APBN	2008	2009

No	SKPD	Nama Aplikasi	Fungsi/Manfaat Aplikasi	Tahun Pembuatan	Tahun Penggunaan
		Intra Data Client v4.3	Mengirim Laporan via Internet	2008	2009
		Simonev Deptan	Melaporkan evaluasi dan monitoring ke Departemen Pertanian	2008	2009

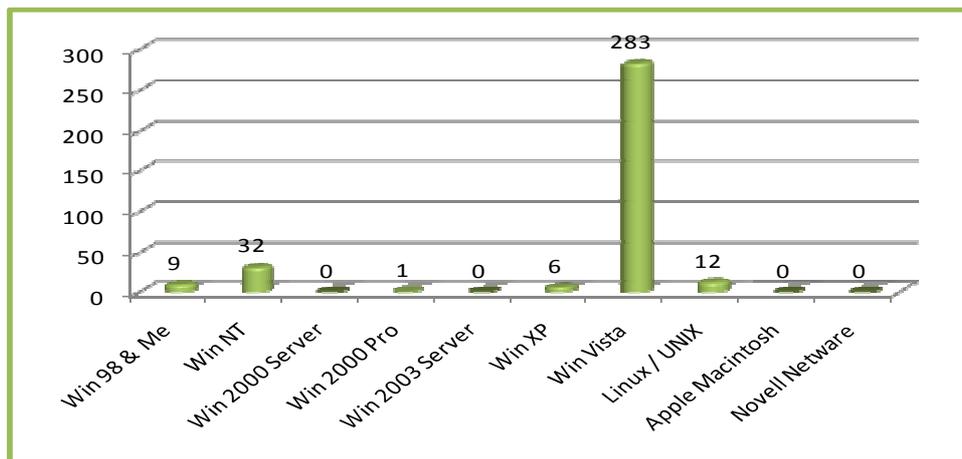
Dari daftar aplikasi khusus yang tercantum di Tabel di atas 64% merupakan aplikasi berbasis desktop. Aplikasi-aplikasi ini berplatform Visual Basic, Visual Foxpro dan PHP. Platform Database yang digunakan pada aplikasi tersebut adalah Microsoft Access, MySQL, SQL Server dan Oracle.



Gambar 1.3 Platform Aplikasi Khusus

Penggunaan aplikasi khusus tersebut hanya ditujukan untuk SKPD yang bersangkutan, tanpa ada integrasi dengan SKPD yang lain dengan tipe akses yang digunakan, untuk aplikasi yang digunakan berjaringan adalah tersentralisasi dengan intranet, tapi hanya untuk beberapa komputer di SKPD yang bersangkutan, selebihnya adalah stand alone. Aplikasi-aplikasi khusus tersebut sebanyak 55% memiliki periode utilisasi harian, selebihnya belum pernah di utilisasi sama sekali.

- o Dari sisi penggunaan Sistem Operasi komputer khususnya komputer client, lebih dari 90% menggunakan Windows Vista sebagai sistem operasi di komputernya. Sedangkan server yang ada banyak menggunakan WinNT dan linux.



Gambar 1.4 Sistem Operasi yang Digunakan

- o Ditinjau dari kepemilikan situs web resmi, dari 46 (empat puluh enam) SKPD yang terdapat di Kabupaten Karangasem, hanya ada 2 (dua) situs resmi, yaitu situs resmi Pemerintah Kabupaten Karangasem, dan situs resmi untuk Pariwisata.



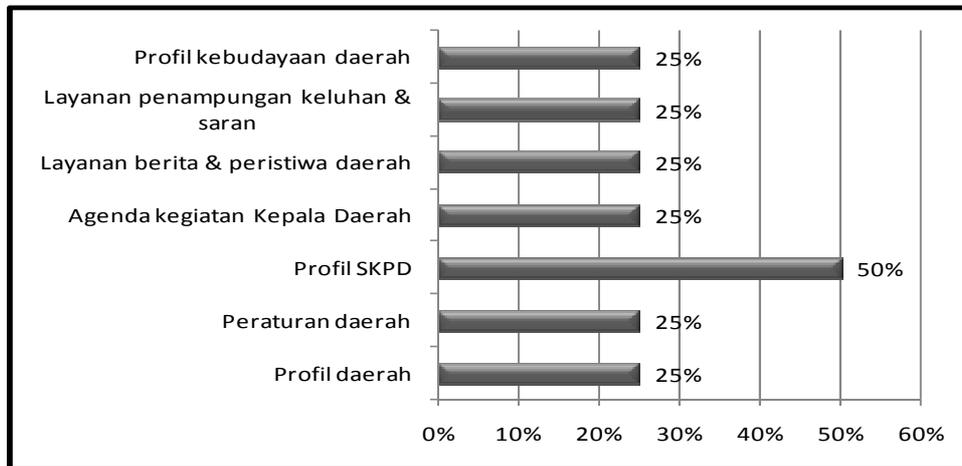
Gambaran 1.5 Tampilan Situs Web Resmi



Gambar 1.6 Tampilan Situs Resmi Pariwisata

- Ditinjau dari tingkatan proses pengembangan aplikasi e-government berdasarkan sifat transaksi informasi yang dilayani, pemerintah kabupaten Karangasem saat ini telah memasuki tahap persiapan ditandai dengan telah dilakukan pengembangan situs resmi pemkab sebagai sarana informasi publik yang saat ini dapat diakses di alamat www.karangasembkab.go.id. Keberadaan situs ini masih perlu terus disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan manfaatnya. Saat ini fungsi dari web tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara ke depan web tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh SKPD di Kab Karangasem
- Fitur yang melengkapi situs resmi tersebut adalah profil SKPD yang bersangkutan, lalu untuk situs resmi daerah dilengkapi dengan profil Kepala Daerah, agenda Kepala Daerah, peraturan daerah, profil daerah, menampung keluhan atau saran dan informasi seputar daerah. Sementara untuk situs pariwisata memiliki fitur informasi daerah, profil

kebudayaan daerah dan penampungan keluhan atau saran dari masyarakat.

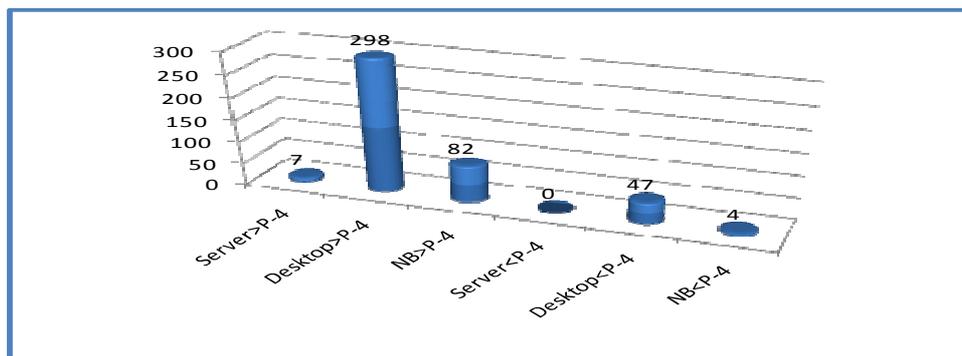


Gambar 1.7 Menu, Fitur atau Fasilitas Situs Resmi

- o 24% responden sudah memiliki e-mail, tetapi jadwal pemeriksaan e-mail dilakukan oleh 30% responden dilakukan tidak rutin, tergantung keperluan saja. Jadwal rutin harian dilakukan oleh 7% responden, dan 4% melakukannya secara mingguan. Selebihnya tidak menjawab. Sebagai pelengkap kinerja pegawai, sebanyak 4% responden diberikan fasilitas e-mail resmi.
- o Dalam perawatan aplikasi, 54% SKPD tidak menggunakan jasa pihak ketiga. Mereka yang menggunakan jasa pihak ketiga hanya 4% yang selalu menggunakan jasa pihak ketiga, 17% hanya menggunakan sebagian jasa pihak ketiga. Lingkup kerja yang dilakukan pihak ketiga adalah pemeliharaan aplikasi sebanyak 60%, pengembangan aplikasi sebanyak 30%, kegiatan lainnya adalah sebagai administrator basis data, pelayanan website dan jasa pelatihan sebanyak 10%.

1.2.4 Deskripsi Kondisi saat ini dari sisi Infrastruktur e-Government

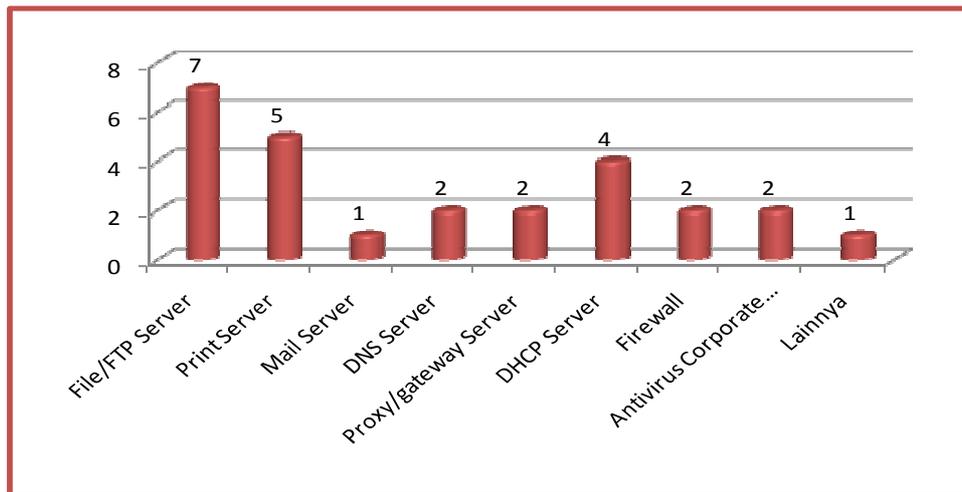
- o Sebagian besar komputer jenis Desktop dengan spesifikasi prosesor minimal Pentium 4. Notebook dan server yang digunakan juga berspesifikasi prosesor Pentium 4. Untuk yang kurang dari Pentium 4 hanya berkisar dibawah 10%.



Gambar 1.8 Ketersediaan Komputer dan Spesifikasinya

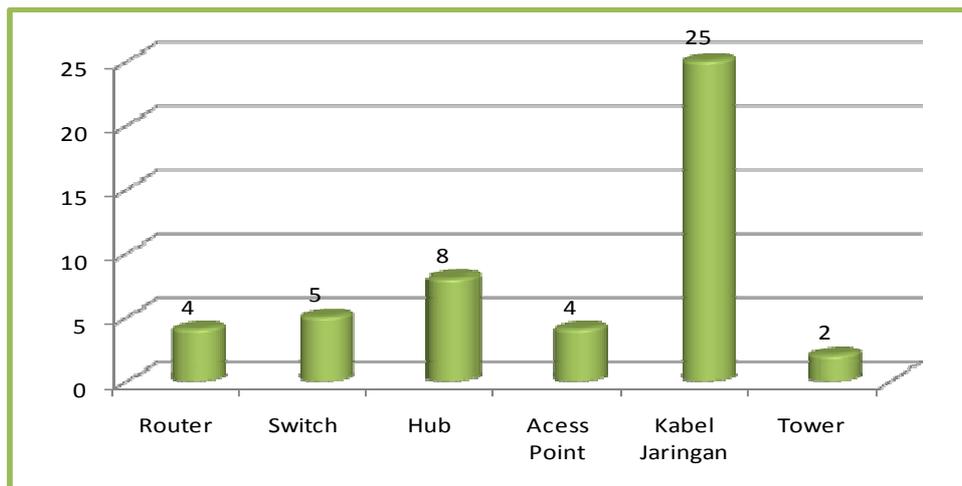
- o Keberadaan komputer dalam mendukung kinerja pegawai dirasakan tidak memadai oleh 37% responden. Bahkan yang merasa kurang memadai ada sebanyak 39%. Mereka yang merasa cukup memadai hanya 2% dan yang sudah merasa sangat memadai ada 9%. Selebihnya tidak menjawab.
- o Ditinjau dari spesifikasi komputer yang dimiliki SKPD dinilai sudah cukup memadai. Secara keseluruhan processor yang digunakan adalah Intel Pentium IV, AMD Athlon, XP, Sempron dan/atau setelahnya. Lebih dari 50% komputer-komputer dilengkapi oleh kartu memori dengan spesifikasi > 256 MB. 85% komputer memiliki hard drive yang lebih dari lebih dari 20Gb. Kartu jaringan juga telah terpasang pada 50% komputer yang dimiliki. Hanya 20% komputer yang dilengkapi dengan modem internal, sementara lebih dari 90% komputer dilengkapi dengan soundcard.

- o Dari 7 (tujuh) server yang tersedia, semuanya memiliki layanan FTP. Hanya 1 yang berfungsi sebagai mail server, 2 DNS server dan Gateway server, 4 sebagai DHCP server. 2 dari 7 server tersebut memiliki layanan firewall dan antivirus.



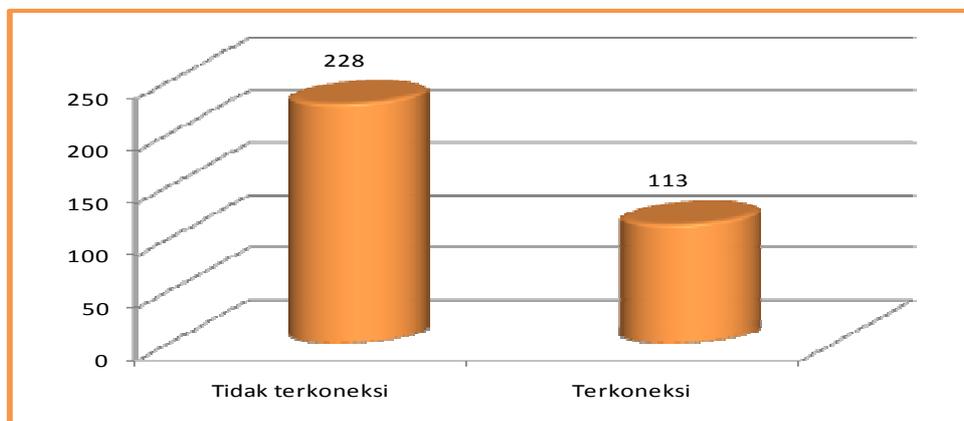
Gambar 1.9 Layanan Server

- o Perangkat jaringan yang tersedia berupa router, switch, hub, Access point, kabel jaringan dan tower, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah SKPD, jumlahnya yang sangat terbatas. Hanya sebagian SKPD yang memiliki perangkat jaringan tersebut.



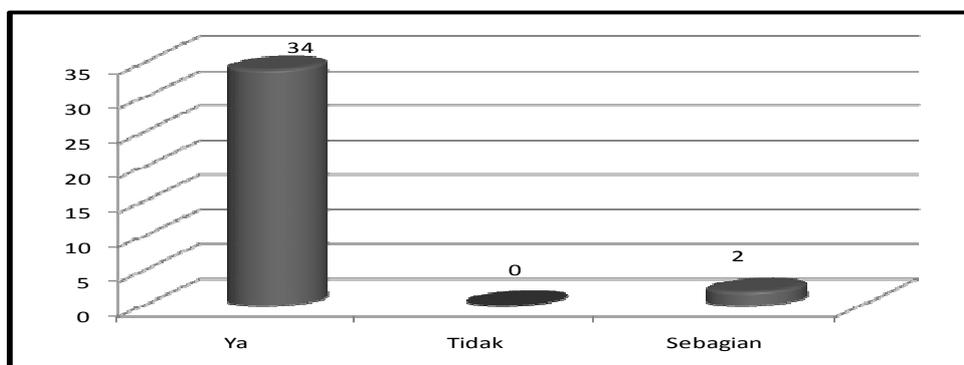
Gambar 1.10 Ketersediaan Perangkat Jaringan

- o Konektivitas komputer melalui LAN dan internet tidak merata di semua komputer. Dari jumlah komputer yang terdata di seluruh SKPD, lebih 60% Komputer belum terhubung dengan LAN. Sedangkan jumlah komputer yang dapat mengakses internet hanya sekitar 15% dimana media transmisi yang paling banyak digunakan melalui akses melalui wi-fi. Telkomnet tampaknya sangat dominan sebagai penyedia jasa internet yang paling banyak digunakan responden dalam mengakses internet. Kecepatan akses internet yang dimiliki cukup beragam dari 128 Kbps hingga 1 Mbps dengan yang terbanyak adalah 384 Kbps



Gambar 1.11 Koneksi LAN

- o Perawatan jaringan semuanya dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.



Gambar 1.12 Perawatan Jaringan oleh Pihak Ketiga

- Secara umum, ditinjau dari sisi pengadaan infrastruktur komunikasi data, tampaknya infrastruktur yang ada saat ini masih belum memadai terutama jika nantinya setiap SKPD diharapkan saling terkoneksi di dalam suatu jaringan intranet ataupun internet di lingkungan pemerintah kabupaten karangasem. Berdasarkan pengamatan, saat ini jaringan komputer dan akses internet masih terbatas di beberapa SKPD saja. Keberadaan jaringan dan akses internet tampaknya juga belum begitu dimanfaatkan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi fungsi penyelenggaraan pemerintah di setiap SKPD . Isu terbaru yang sedang hangat saat ini dan ada hubungannya dengan rencana pengaturan pembangunan infrastruktur jaringan yaitu pembangunan tower telekomunikasi yang nantinya digunakan oleh para operator seluler yang beroperasi di Kab. Karangasem. Pengaturan pembangunan tower ini diharapkan juga akan mempertimbangkan pengembangan infrastruktur jaringan yang mendukung penerapan sistem e-Government

1.2.3 Deskripsi Kondisi SDM e-Government di SKPD

- Ditinjau dari status kepegawaian SDM Pemerintah, 81% pegawai tetap dan 19% pegawai honorer. Untuk sebaran umur sangat beragam, beberapa SKPD jumlah SDM dengan umur produktif sangat banyak sementara beberapa lainnya sangat sedikit. Tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah lulusan SMA/SMK non-TIK dan Sarjana non-TIK. Tidak ada yang lulus S2 TIK, tapi 4% adalah S2 non-TIK.
- Kemampuan staf untuk mengoperasikan komputer sebanyak 33%, pejabat 14%. Staf yang tidak dapat mengoperasikan komputer ada 27%, pejabat 7%. Secara umum, baik pejabat, staf maupun tenaga honorer, memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengolah kata dan tabel. Sedangkan kemampuan khusus seperti administrator jaringan dan teknis untuk memperbaiki perangkat nyaris tidak ada.

- 13% responden mengatakan adanya unit pengolah data di SKPD nya. Dengan sebaran tenaga unit pengolah data yang dapat dilihat pada gambar berikut.
- Hanya 7% dari keseluruhan SKPD yang pernah mengadakan inhouse training TIK, sementara pengiriman pegawai pada pelatihan/training di luar instansi yang bersangkutan juga hanya sebesar 2%.
- Secara keseluruhan, sebagian besar aparatur masih belum dapat memaksimalkan fungsi komputer dan teknologi informasi yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama para aparatur yang telah memiliki masa kerja yang sudah cukup lama. Tampak pengoperasian komputer memang didominasi oleh aparatur yang relatif masih baru dan memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma, namun dari sisi jumlah masih jauh lebih sedikit.

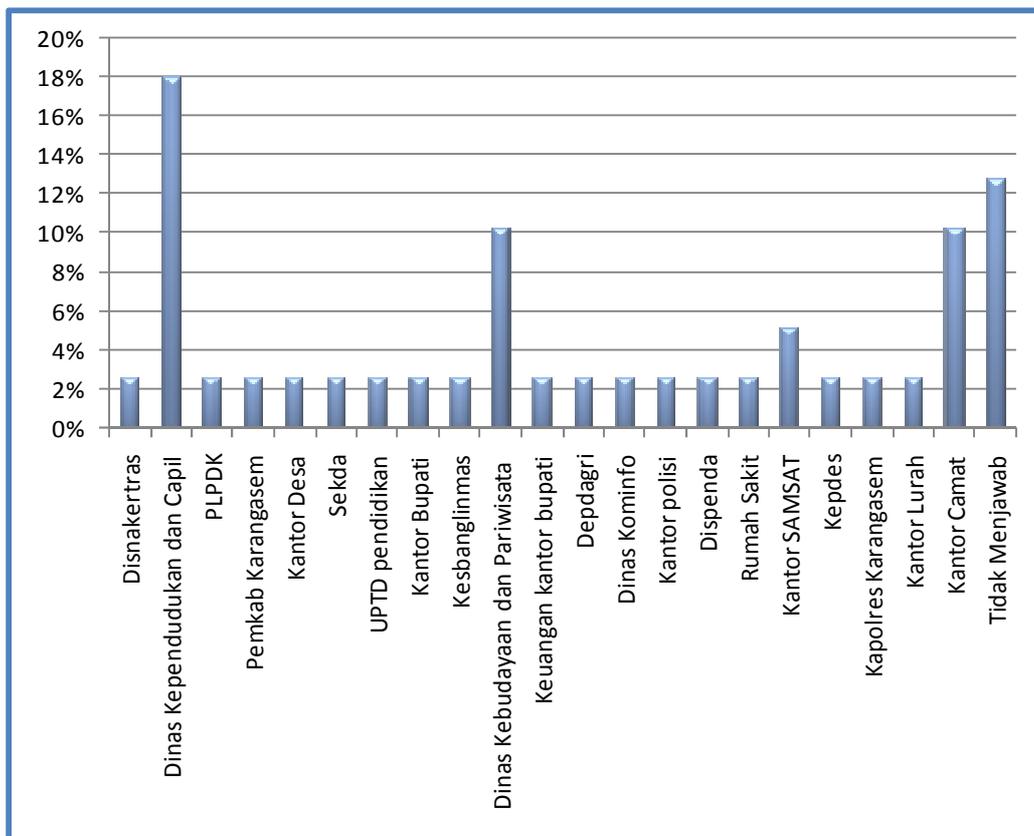
1.3 Deskripsi Kebutuhan dan Kesiapan Masyarakat Saat ini

1.3.1 Deskripsi Kebutuhan dan Kesiapan Penduduk

- Ditinjau dari latar belakang pendidikan lebih dari 50% responden berlatarbelakang pendidikan SMA dan hanya 20% yang Diploma atau sarjana.
- 68% responden memiliki komputer, tapi 77% mengatakan pernah menggunakan komputer. Hampir 80% dari responden mengaku telah menggunakan komputer lebih dari 1 tahun
- Tujuan responden menggunakan computer adalah untuk memudahkan pekerjaan sebanyak 57%, mempercepat waktu pengerjaan 14%,

dokumentasi kegiatan sebanyak 19% dan lainnya (hiburan, dll) sebanyak 10%.

- o Lebih dari 50% responden menggunakan komputer pada saat di kantor dan hanya 15% yang menggunakan komputer di rumah. Kebanyakan responden menggunakan komputer minimal 2 jam sehari
- o Aplikasi yang sering digunakan oleh responden adalah aplikasi pengolah angka (26%), berikut pengolah kata (19%), internet (14%), permainan (13%), multimedia (8%), desain grafis (5%) dan desain web (2%).
- o 51 % responden juga diketahui telah mampu mengakses internet dengan pilihan lokasi mengakses yang terbanyak adalah di warnet 36 %, diikuti di rumah dan di kantor. Tujuan pengaksesan internet terbanyak adalah untuk tujuan mendownload (23%), browsing (21%), email (25%) dan chatting (17%). Hanya 8% responden yang menggunakannya untuk transaksi online. 38% mengaku memiliki email. PC Desktop dan Laptop merupakan perangkat akses internet yang paling banyak digunakan (masing-masing sekitar 40%) dan hanya 10% yang mengakses internet melalui smartphone dan PDA. Untuk jenis koneksi yang digunakan hanya 7% yang menjawab menggunakan wireless, 8% dengan fix dial up dan Wi-Fi sebanyak 14%.
- o Kantor Disdukcapil merupakan kantor pelayanan masyarakat yang paling banyak didatangi oleh responden penduduk diikuti oleh kantor SAMSAT dan DISbudpar



Gambar 1.13 Kantor Layanan yang Pernah Dikunjungi

1.3.2 Deskripsi Kebutuhan dan Kesiapan Pengusaha

- Dari responden masyarakat pemilik usaha bisnis, diperoleh data bahwa hanya 40% dari mereka menggunakan komputer dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dari responden yang menggunakan komputer, 36% spesifikasi komputer adalah Pentium IV dan 25% dibawah pentium IV.
- Dalam penggunaan aplikasi komputer oleh pebisnis, 34% mengatakan lebih banyak menggunakan aplikasi untuk mengakses internet , diikuti dengan penggunaan aplikasi untuk mengolah kata dan angka
- Akses internet yang digunakan 50% melalui koneksi dial up selebihnya adalah leased line (25%) dan broadband (25%).

- o Responden masyarakat bisnis ini memiliki karyawan yang tidak mampu mengoperasikan komputer sebanyak 55%, yang difasilitasi dengan komputer sebanyak 24% dan yang tidak difasilitasi tapi dapat mengoperasikan komputer sebanyak 19%. 60% responden mengatakan memiliki alamat email, 64% responden mengatakan tidak memiliki unit TIK khusus,
- o Sementara dari seluruh responden pengusaha, 50% diantaranya memiliki keperluan dengan layanan pemerintah. Responden yang mengatakan memiliki keperluan dengan pelayanan pemerintahan 40% diantaranya mengatakan pernah berinteraksi langsung dengan layanan pemerintah. Kantor layanan yang paling banyak dikunjungi oleh pengusaha adalah kantor dispenda. Untuk layanan pemerintah yang diinginkan tapi belum tersedia adalah layanan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan Untuk data informasi yang pernah didapatkan adalah daftar kedatangan kapal dan majalah promosi 6 bulanan dari Dinas Pariwisata. Informasi yang diharapkan oleh responden adalah adanya informasi peluang bisnis yang dipublikasikan.
- o Cara responden memperoleh data atau informasi tersebut adalah dengan mendatangi langsung kantor instansi yang bersangkutan (50%), ke Kantor Perizinan sebanyak 30% dan via telepon sebanyak 20%. Menurut responden juga media komunikasi yang termudah adalah menggunakan telepon (39%), menggunakan fax (23%), media cetak (15%), melalui pegawai pemerintahan (15%) dan pengumuman di kantor Pemda (8%).Sementara sebagai bagian dari masyarakat bisnis, responden mengatakan media elektronik yang aman untuk berkomunikasi adalah melalui telepon (34%), internet (33%), sms (17%), e-mail dan fax sebanyak masing-masing 8%.
- o 62% responden mengatakan pernah melakukan kunjungan ke website resmi pemerintah, meskipun 29% diantaranya hanya untuk melihat-lihat dan ingin mengetahui kabar pemerintahan terbaru.

- o Menurut persepsi responden, tingkat kepentingan dari aspek-aspek kinerja pelayanan pemerintahan dinilai cukup penting oleh sebagian responden , namun ketika diukur persepsi tingkat kepuasannya, kinerja aspek kemudahan layanan dinilai tidak memuaskan

1.4 Deskripsi Kondisi Ideal yang akan dicapai

1.4.1 Gambaran Kondisi Ideal yang ingin dicapai secara umum

Secara umum kondisi ideal yang akan dicapai pada saat e-Government telah diterapkan secara utuh dan menyeluruh dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Karangasem digambarkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki portal situs web daerah yang didukung oleh ketersediaan pusat data sehingga dapat melayani kebutuhan informasi dan komunikasi baik yang bersifat G2C, G2B, G2G, yang terintegrasi. Layanan informasi dan komunikasi tersebut juga harus dapat diakses melalui teknologi yang paling umum digunakan oleh masyarakat.
2. Seluruh SKPD telah menerapkan sistem manajemen koordinasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik di lingkungan kerjanya.
3. Seluruh SKPD memiliki jaringan lokal di lingkungan kerjanya dan terhubung dalam satu jaringan kerja pemerintah daerah serta memiliki akses internet.
4. Seluruh SKPD telah menggunakan aplikasi sistem berbasis web yang terintegrasi dalam menunjang fungsi layanan pemerintahan dan

pengelolaan informasi sesuai dengan standar acuan kerangka fungsional sistem pemerintahan daerah dan tupoksi masing-masing SKPD. Berbagai aplikasi yang digunakan berbasis open-sources

5. Seluruh SDM aparatur telah menerapkan pola dan budaya kerja yang mengutamakan kepuasan stakeholder dan benar-benar memberdayakan perangkat TIK secara optimal
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem manajemen berbasis TIK yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
7. Pemanfaatan PAD dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Salah satu parameter keberhasilannya dapat ditinjau dari pengukuran tingkat kepuasan publik yang terus membaik.
9. Berkembangnya komunitas informasi masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan (dunia usaha, akademisi, praktisi, dan lain-lain) dan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang TIK sehingga mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

1.4.2 Tinjauan Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan

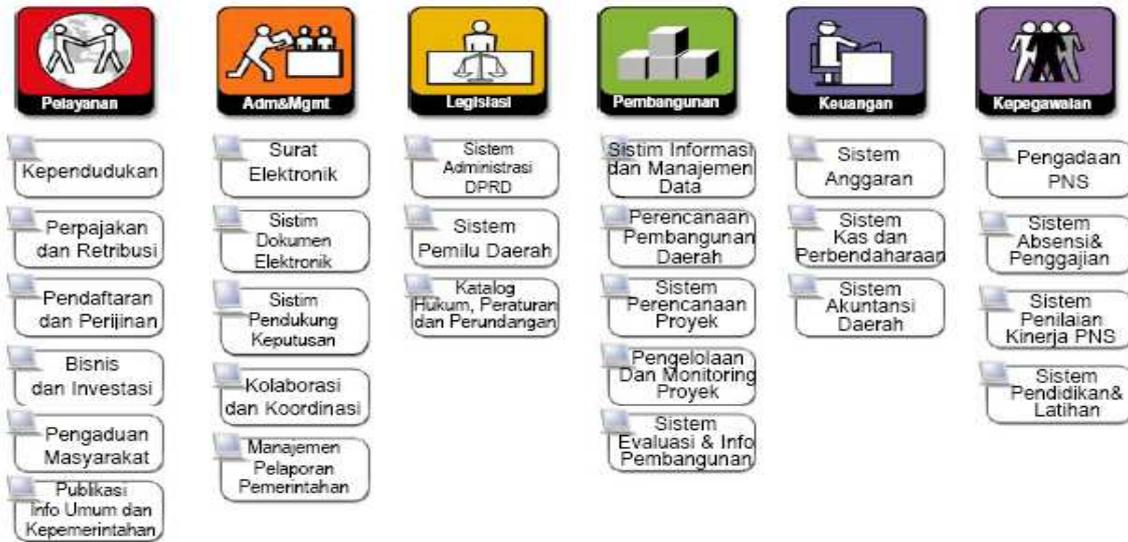
Sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta

fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokkan dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi.

Dengan pendekatan ini, fungsi pemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.

Disisi lain, sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama system tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar.

Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan. Berdasarkan Blue Print Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2005, kerangka fungsional tersebut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Kerangka Fungsional Dasar Umum (Gambar 4.1) dan Kerangka Fungsional Kelembagaan dan Kedinasan (Gambar 4.2).



Gambar 1.14 Kerangka Fungsional Dasar Umum



Gambar 1.15 Kerangka Fungsional Kelembagaan & Kedinasan

1.4.3 Tinjauan Peta Solusi Aplikasi e-Government

Aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi pemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan tersebut diatas. Dengan

mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Blueprint ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.

Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

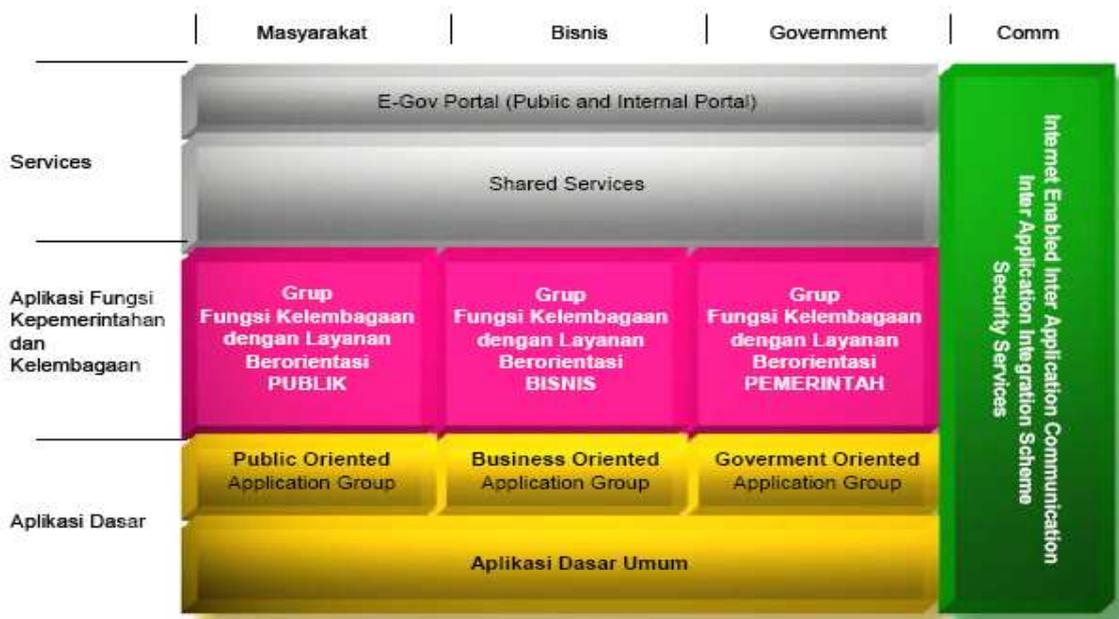
1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau

kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.



Gambar 1.16 Peta Solusi Aplikasi e-Government

1.4.4 Analisis Hubungan Tupoksi antar SKPD

Setelah dilakukan tinjauan terhadap kerangka sistem pemerintahan dan peta solusi aplikasi yang menghasilkan suatu gambaran ideal mengenai arah pengembangan aplikasi di sistem pemerintahan, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah bagaimana mencapai gambaran ideal tersebut berdasarkan kondisi spesifik suatu pemerintahan daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan jalan melakukan tinjauan analisis tugas pokok dan fungsinya dari SKPDnya, yang biasanya memang terdapat perbedaan

formasi jenis SKPD antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung dari tujuan dan titik berat program pimpinan daerah masing-masing.

Pada lembar observasi terdapat permintaan data tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD, termasuk dengan factor eksternal yang menyertainya seperti data, informasi atau layanan dari instansi lain yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD.

Informasi ini diperlukan untuk mengetahui interaksi dan jalur informasi yang terjalin antar SKPD dan antara SKPD dengan factor luar seperti pelayanan masyarakat umum dan masyarakat bisnis.

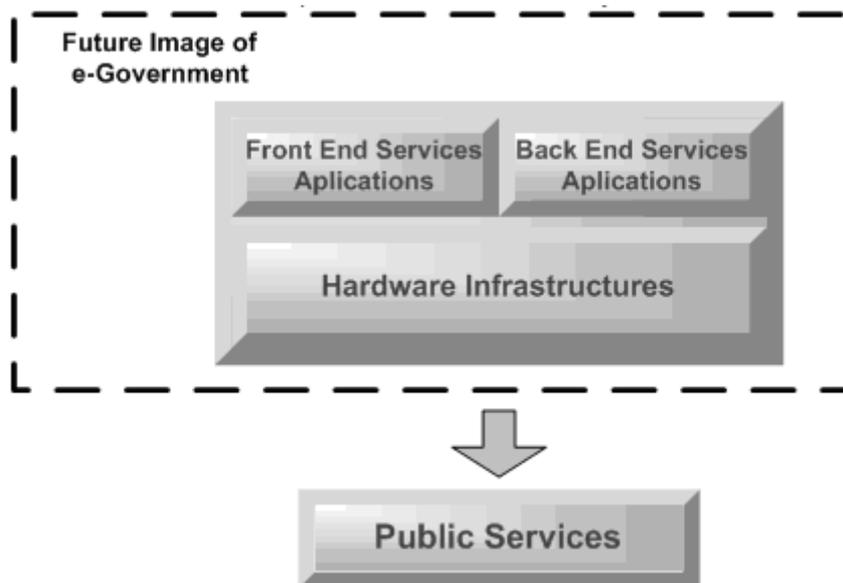
Dengan analisis tugas pokok dan fungsi yang menyeluruh, dapat disimpulkan pembangunan e-government yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD sehingga dapat menunjang kinerja dan menjadi nilai tambah bagi SKPD itu sendiri.

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi antar SKPD di Kabupaten Karangasem disusun dalam bentuk Matriks Tupoksi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 . Matriks Tupoksi secara lengkap dengan penjelasannya dapat dilihat pada lampiran.

1.4.5 Tinjauan terhadap Persyaratan Dukungan Infrastruktur

Infrastruktur perangkat keras dan jaringan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan *e-Government* karena infrastruktur tersebut merupakan perangkat pendukung berjalannya aplikasi layanan dalam *e-Government*, baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*front-end public service*) dan layanan pendukung dalam pelaksanaan operasional internal di pemerintahan (*back-end service*). Agar dapat berjalan, kedua layanan tersebut harus didukung oleh infrastruktur perangkat keras dan jaringan

Bentuk kerangka kerja yang ideal dari implementasi *e-Government* adalah sebagai berikut:



Gambar 1.17 Kondisi Ideal e-Government

Pada saat akan diterapkan, sesuai dengan pengembangan e-Government untuk mendukung layanan publik yang ada memiliki 4 (empat) tahap pengembangan, sesuai dengan kesiapan aplikasi elektronik online yang

mendukung kebutuhan layanan. Tahapan implementasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.18 Tahapan Informasi

Tentunya agar keempat tahapan ini dapat dijalankan, diperlukan perangkat keras dan jaringan pendukung dengan rasio jumlah dan kualitas yang cukup memadai

Dapat diambil kesimpulan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pengembangan dan penerapan system e-Government dari sisi infrastruktur komputer dan jaringan adalah bahwa seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Karangasem dapat terhubung dalam satu jaringan sehingga konektivitas dan integrasi aplikasi yang akan dikembangkan dapat berjalan secara efektif dan efisien

Oleh karena itu dapat diidentifikasi, persyaratan kebutuhan perangkat keras secara ideal adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya satu komputer untuk satu orang yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kualitas layanan di setiap SKPD sesuai dengan fungsi layanan
2. Tersedianya komputer yang dilengkapi dengan peripheral yang memadai di setiap unit organisasi yang sesuai dengan fungsi administrasinya terutama yang mendukung penerapan system manajemen koordinasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik
3. Tersedianya server yang dapat memenuhi kebutuhan penyimpanan dan transaksi data seluruh sistem dan antar system
4. Tersedianya perangkat pendukung jaringan LAN di masing-masing satuan kerja
5. Tersedianya perangkat pendukung jaringan WAN antar satuan kerja
6. Tersedianya perangkat pendukung jaringan untuk melakukan koneksi internet di satuan kerja yang dikelola secara terpadu
7. Tersedianya layanan *e-mail* untuk seluruh aparatur
8. Tersedianya system keamanan infrastruktur jaringan kabupaten
9. Tersedianya Infrastruktur pusat data terpadu
10. Tersedianya *Network Operation Center* terpadu
11. Tersedia Infrastruktur komunikasi internal dan eksternal berbasis IP
12. Tersedia Infrastruktur *Call-Center dan SMS Center sebagai media komunikasi dan informasi*

Penggunaan Jenis Media koneksi jaringan yang akan dibangun baik intranet maupun internet di setiap SKPD nantinya harus mempertimbangkan topologi dan jarak SKPD ke pusat Jaringan. Berikut Peta Koneksi Jaringan yang mencakup seluruh SKPD termasuk 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karangasem



Gambar 1.19 Peta Jaringan Kabupaten

Dari gambaran konektivitas jaringan tersebut, tampak ada kendala di dalam upaya membangun jaringan intranet ke SKPD sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan mengingat ada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kubu, Kecamatan Rendang, Kecamatan Manggis yang lokasinya sangat jauh dan kondisi geografis dan topografi yang tidak menguntungkan.

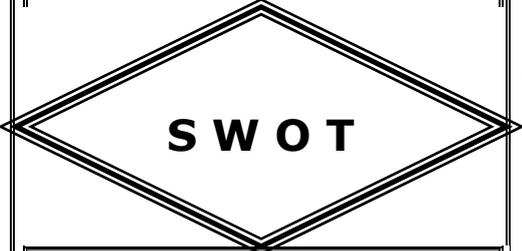
1.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kondisi aplikasi dan infrastruktur pendukung aplikasi dengan meninjau faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahannya, serta faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapi pada saat ini.

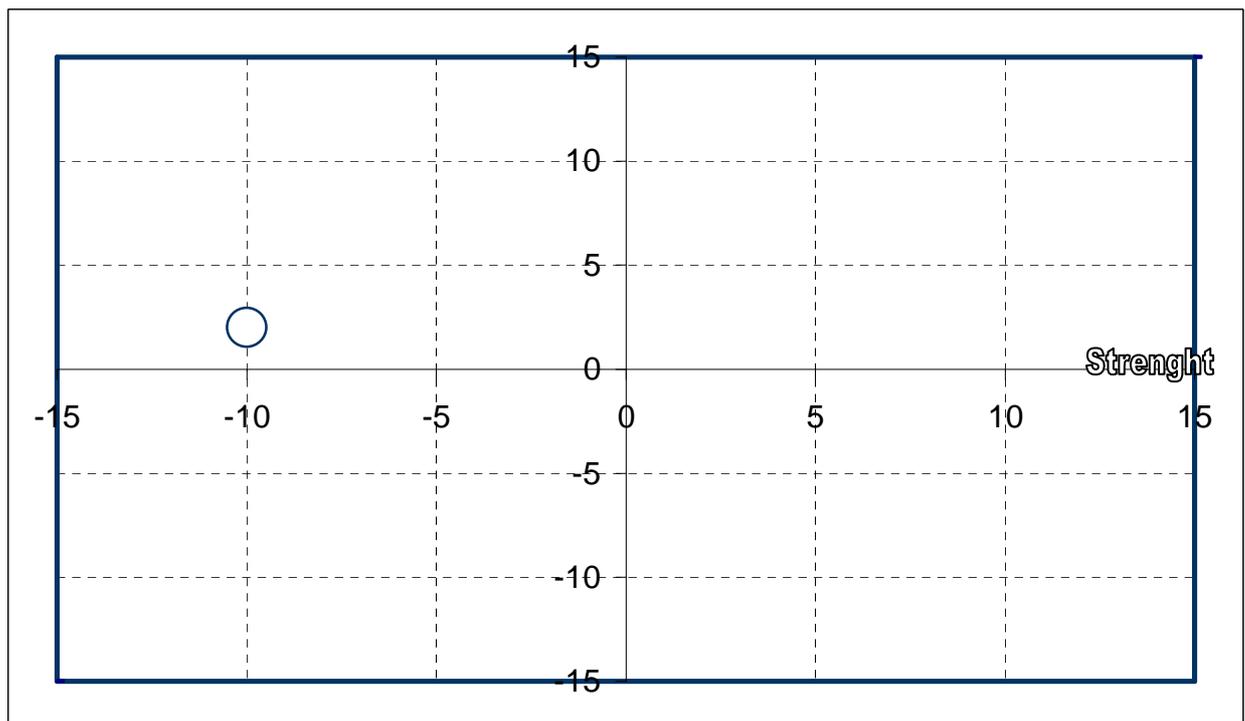
Kemampuan dalam mengenali dan memetakan kondisi saat ini nantinya akan memudahkan di dalam mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi solusi berupa formulasi strategi yang akan dijalankan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Identifikasi item di setiap faktor tersebut dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat survey baik melalui observasi maupun wawancara dengan SKPD terkait.

Berikut hasil dari penyusunan analisis SWOT terhadap kondisi aplikasi dan infrastruktur pendukung pengembangan dan penerapan e-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem

KELEMAHAN	PELUANG	KEKUATAN
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aplikasi khusus yang tersedia masih sangat terbatas • Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi sistem informasi yang menunjang tupoksi masih sangat sedikit • Data/Informasi antar instansi belum terhubung • Belum ada acuan platform dan standarisasi pengembangan aplikasi • Pengembangan aplikasi dan databasenya masih parsial belum terintegrasi dan terpadu • Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi • Belum ada prosedur standar penanganan data khususnya untuk data elektronik termasuk kemampuan mengelola dokumen elektronik • Sebagian besar data masih dalam bentuk dokumen hardcopy manual yang tersimpan di dalam lemari • Penggunaan email sebagai alat komunikasi kerja masih sangat terbatas • Sebagian besar SKPD tidak memiliki situs resmi • Kewenangan Organisasi pengelola data dan informasi dalam koordinasi belum dimaksimalkan • Pemahaman e-gov di setiap SKPD masih beragam • Masih sangat sedikit SKPD yang memiliki Jaringan Komputer Lokal (LAN) • Belum tersedianya jaringan komputer yang menghubungkan antar seluruh SKPD • Koneksi internet masih sangat terbatas dan hanya di sebagian kecil SKPD • Sebagian SDM belum dapat mengoperasikan komputer untuk mendukung tugas dan fungsi • Pemahaman SDM terhadap e-Government masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan teknologi semakin pesat • Semakin banyak pilihan jenis aplikasi dengan fitur yang dapat dikustomisasi • Ketersediaan aplikasi system dan hardware pemroses data semakin lengkap dan canggih • Semakin banyak perusahaan yang ahli dalam pengembangan aplikasi • Sudah mulai banyak berkembang sistem open-source yang relatif lebih ekonomis • Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah ttg penerapan e-Governemet di pemma semakin kuat <div data-bbox="671 1066 1193 1317" style="text-align: center;">  <p>SWOT</p> </div> <div data-bbox="692 1317 1166 1422" style="text-align: center;"> <p>ANCAMAN</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan masyarakat akan informasi publik yang cepat dan akurat • Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik sehingga kebutuhan aplikasi pendukung cukup mendesak • Tuntutan persyaratan perangkat keras yang semakin canggih dalam mendukung sistem • Ancaman terhadap keamanan dan penyalahgunaan data juga semakin tinggi • Secara geografis lokasi SKPD khususnya kecamatan masih tersebar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa aplikasi khusus yang telah dijalankan di tingkat SKPD • Terdapat situs resmi pemkab Karangasem • Sebagian SDM telah mengenal beberapa aplikasi dasar perkantoran • Terdapat kesadaran dan keinginan untuk mengembangkan e-government • Komitmen Pimpinan Daerah untuk pengembangan aplikasi e-Government cukup tinggi • Jumlah SDM yang cukup besar • Terdapat SKPD setingkat eselon II yang menangani pengembangan eGovernment

Dari hasil penguraian item dari setiap faktor internal maupun eksternal, dilakukan perhitungan nilai indeks setiap faktor untuk menentukan koordinat posisi kondisi aktual aplikasi dan perangkat pendukungnya. Posisi koordinat untuk faktor internal = jumlah item kekuatan yang teridentifikasi dikurangi dengan jumlah item kelemahan yang teridentifikasi. Sedangkan posisi koordinat faktor eksternal = jumlah item peluang dikurangi jumlah item tantangan yang teridentifikasi. Dengan asumsi bobot dari setiap faktor adalah sama, dari hasil perhitungan diperoleh indeks faktor internal = $7 - 17 = -10$ dan indeks faktor eksternal = $6 - 4 = 2$ sehingga koordinat posisi dari kondisi aplikasi dan perangkat pendukung di Kabupaten Karangasem $(-10,2)$. Hasil penentuan koordinat posisi disajikan dalam grafik di bawah ini



Dari grafik tampak bahwa posisi berada di kuadran yang dibatasi sumbu Weakness dan Opportunities, dimana strategi akan diarahkan bagaimana mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

1.6 Analisis Kesenjangan Kebutuhan Komponen e-Government

Pada prinsipnya dalam menganalisis kebutuhan komponen e-government khususnya Aplikasi dan infrastruktur dalam mendukung penerapan sistem e-Government di lingkungan Pemerintah kabupaten Karangasem harus bertitik tolak pada dua hal, yaitu:

- (1) kondisi aplikasi dan infrastruktur yang ada dan pemanfaatannya;
- (2) kondisi ideal dari sistem aplikasi dan infrastruktur yang ingin dicapai dimana kedua komponen tersebut dapat mendukung penerapan e-government di SKPD sesuai dengan tupoksi nya.

Dari perbandingan terhadap kedua kondisi tersebut akan diperoleh gambaran mengenai kesenjangan atau gap yang terjadi antara kondisi aktual saat ini dan kondisi ideal sehingga akan dapat diidentifikasi gambaran kebutuhan aktual aplikasi dan infrastruktur baik kebutuhan pengembangan aplikasi dan infrasturktur yang sudah ada maupun kebutuhan pembangunan aplikasi dan infrastruktur baru

1.6.1 Deskripsi Kesenjangan Aplikasi

Kesenjangan yang terjadi dari sisi aplikasi lebih disebabkan karena sebagian besar SKPD belum menggunakan aplikasi khusus yang meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, khusus untuk SKPD yang sudah memiliki aplikasi khusus, perlu dilakukan tinjauan mengenai lingkup yang dapat ditangani oleh aplikasi tersebut apakah sudah mampu mencakup semua tupoksi serta apakah SDM yang ditugaskan menjalankan aplikasi tersebut telah memiliki kemampuan yang memadai

Berikut peta perbandingan data aplikasi pada kondisi aktual yang diperoleh dengan kondisi ideal yang akan dicapai di setiap SKPD

Tabel 1.3 Peta kesenjangan jenis aplikasi

NO	SKPD	Aplikasi/Web		
		Eksisting	Idealnya	Gap
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	SI Potensi Ekonomi Daerah	e-Planning / SI Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	e-Planning / SI Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas	x	SI Manajemen Organisasi Non-Pemerintah SI Pilkada (Subsistem Informasi Pilkada)	SI Manajemen Organisasi Non-Pemerintah SI Pilkada (Subsistem Informasi Pilkada)
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	x	SIM Kesra (subsistem Perempuan dan KB)	SIM Kesra (subsistem Perempuan dan KB)
4	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG	SIM Kepegawaian Daerah SIM DIKlat Daerah e-Learning Pegawai	Pengembangan SIMPEG SIM DIKlat Daerah e-Learning Pegawai
5	Badan Lingkungan Hidup	x	SI Pengelolaan Lingkungan SI Perijinan (subsistem AMDAL & limbah)	SI Pengelolaan Lingkungan SI Perijinan (subsistem AMDAL & limbah)
6	Inspektorat Daerah	x	SIM Pengawasan	SIM Pengawasan
7	Sekretariat DPRD	x	e-Parliament/Sistem Informasi administrasi DPRD SI Pilkada	e-Parliament/Sistem Informasi administrasi DPRD SI Pilkada
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	NUPTK PADATI	e-education/ SI Manajemen Pendidikan SI Manajemen Sekolah SI Manajemen Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga e-Learning	e-education/ SI Manajemen Pendidikan yang sinkron dengan NUPTK dan PADATI SI Manajemen Sekolah SI Manajemen Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga e-Learning

NO	SKPD	Aplikasi/Web		
		Eksisting	Idealnya	Gap
9	Dinas Kesehatan	SIK	e-health/SI Jakesda SI Manajemen Puskesmas	Pengembangan e-health berdasarkan SIK SI Manajemen Puskesmas
10	Dinas Sosial	x	SI Manajemen Bantuan Bencana SI Jaringan Pengaman Sosial	SI Manajemen Bantuan Bencana SI Jaringan Pengaman Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	x	e-Job/e-recruitment	e-Job/e-recruitment
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIAK	e-citizen/SIAK-capil	Pengembangan SIAK sesuai kebutuhan
13	Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran	x	e-transportation/SI Manajemen Transportasi SI Perijinan (sub sistem ijin trayek) SIM Penanganan Kebakaran	e-transportation/SI Manajemen Transportasi SI Perijinan (sub sistem ijin trayek) SIM Penanganan Kebakaran
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	Situs Kab SMS Gateway Mail Server	Situs Portal Kabupaten	Pengembangan situs kab menjadi Situs Portal Informasi Publik
			SI perijinan (subsistem ijin frekuensi, tower, dll)	SI perijinan (subsistem ijin frekuensi, tower, dll)
			SI Manajemen e-mail	SI Manajemen e-mail
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Situs Informasi Pariwisata	e-Tourism SI Perijinan (subsistem ijin usaha, event, dll)	Pengembangan Situs Informasi Pariwisata menjadi e-Tourism SI Perijinan (subsistem ijin usaha, event, dll)
16	Dinas Pekerjaan Umum	x	SI Manajemen Pekerjaan Umum SI Manajemen Tata Ruang Wilayah (subsistem sarana)	SI Manajemen Pekerjaan Umum SI Manajemen Tata Ruang Wilayah (subsistem sarana)
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	x	SI Manajemen perindag SI perijinan (sub sistem ijin usaha, TDP,dll)	SI Manajemen perindag SI perijinan (sub sistem ijin usaha, TDP,dll)
18	Dinas Koperasi dan	x	SI Manajemen UKM SI Manajemen Koperasi	SI Manajemen UKM SI Manajemen Koperasi

NO	SKPD	Aplikasi/Web		
		Eksisting	Idealnya	Gap
	UKM		SI perijinan (subsistem ijin usaha)	SI perijinan (subsistem ijin usaha)
19	Dinas PTP dan Hortikultura	x	SI Manajemen Pertanian SI Perijinan (subsistem ijin usaha) GIS- Potensi daerah (subsistem Pertanian)	SI Manajemen Pertanian SI Perijinan (subsistem ijin usaha) GIS- Potensi daerah (subsistem Pertanian)
20	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan	x	SI Manajemen Peternakan SI Manajemen kelautan dan Perikanan SI perijinan (subsistem ijin usaha) GIS- Potensi daerah (subsistem peternakan & perikanan)	SI Manajemen Peternakan SI Manajemen kelautan dan Perikanan SI perijinan (subsistem ijin usaha) GIS- Potensi daerah (subsistem peternakan & perikanan)
21	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	SPM9, SIMAKBMN, SAK PA 08, Aplikasi Persediaan, Intra Data Client, Monev Deptan	SI Manajemen Kehutanan dan Perkebunan SI Perijinan (subsistem ijin usaha, HPH) GIS-Potensi Daerah (subsistem hutan dan perkebunan)	SI Manajemen Kehutanan dan Perkebunan SI Perijinan (subsistem ijin usaha, HPH) GIS-Potensi Daerah (subsistem hutan dan perkebunan)
22	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	x	SI Manajemen Tata Ruang SI Pendapatan Daerah (subsistem retribusi sampah & Parkir)	SI Manajemen Tata Ruang SI Pendapatan Daerah (subsistem retribusi sampah & Parkir)
23	Dinas Pendapatan	x	SI Pendapatan Daerah (Pajak, retribusi dll)	SI Pendapatan Daerah (Pajak, retribusi dll)
24	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu	x	SI Layanan Perijinan satu atap SI Pendapatan Daerah (subsistem pajak & biaya adm)	Pengembangan SI Layanan Perijinan satu atap SI Pendapatan Daerah (subsistem pajak & biaya adm)
25	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Otomasi Perpustakaan	SI Manajemen perpustakaan SI Manajemen Arsip Daerah	Pengembangan SIM Perpustakaan dari Otomasi Perpustakaan Manajemen Arsip Daerah

NO	SKPD	Aplikasi/Web		
		Eksisting	Idealnya	Gap
26	Kantor Ketahanan Pangan	SAKDA	SI Kesra (Subsistem Pangan)	Pengembangan Modul SAKDA dalam SIM KESra
27	Kantor Sat Pol PP	x	SI Manajemen Tata Ruang Wilayah (subsistem penertiban) SI Manajemen Asset dan Barang Daerah (subsistem pengamanan)	SI Manajemen Tata Ruang Wilayah (subsistem penertiban) SI Manajemen Asset dan Barang Daerah (subsistem pengamanan)
28	Rumah Sakit Umum Daerah	x	SI Manajemen RSUD	SI Manajemen RSUD
29	Bagian Tata Pemerintahan	x	SI Manajemen Pelaporan Kepemerintahan	SI Manajemen Pelaporan Kepemerintahan
30	Bagian Humas dan Protokol	x	Agenda Elektronik SI Manajemen Protokoler SIM Humas	Agenda Elektronik SI Manajemen Protokoler SIM HUmAs
31	Bagian Hukum dan HAM	x	SI Manajemen Katalog HUKum dan Perundangan SI Manajemen Layanan Hukum & HAM	SI Manajemen Katalog HUKum dan Perundangan SI Manajemen Layanan Hukum & HAM
32	Bagian Umum	x	SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik SI Manajemen Perjalanan Dinas	SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik SI Manajemen Perjalanan Dinas
33	Bagian Perlengkapan	x	SI Manajemen Asset dan Barang Daerah SI Manajemen Pemeliharaan e-procurement/SI Pengadaan Elektronik	SI Manajemen Asset dan Barang Daerah SI Manajemen Pemeliharaan e-procurement/SI Pengadaan Elektronik
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat	x	SIM Kesra	SIM Kesra
35	Bagian Ekonomi	x	SI Bisnis dan Investasi Daerah SI Manajemen Perekonomian Daerah GIS -Potensi Ekonomi Daerah	SI Bisnis dan Investasi Daerah SIM Manajemen Perekonomian Daerah Pengembangan SI Potensi daerah yang ada

NO	SKPD	Aplikasi/Web		
		Eksisting	Idealnya	Gap
				di Bappeda menjadi SIG Potensi ekonomi daerah
36	Bagian Pengendalian Pembangunan	x	SI Manajemen Data Pembangunan SI Evaluasi dan Pengendalian Proyek	SI Manajemen Data Pembangunan SI Evaluasi dan Pengendalian Proyek
37	Bagian Organisasi	x	SI Pendukung Keputusan SI Tata Laksana Kelembagaan	SI Pendukung Keputusan SI Tata Laksana Kelembagaan
38	Bagian Keuangan	Aplikasi Daftar Gaji Pegawai	SI Keuangan Daerah SI Akuntansi Daerah SI Manajemen BMN	Pengembangan SI Keuangan Daerah dgn mengintegrasikan aplikasi daftar gaji pegawai SI Akuntansi Daerah SI Manajemen BMN
39	Kecamatan Karangasem	x	SI Administrasi Kependudukan (subsistem layanan kecamatan) SI Perijinan (subsistem surat pengantar/rekomendasi) SI Manajemen Tata Ruang Wilayah (subsistem pertanahan kecamatan)	SI Administrasi Kependudukan (subsistem layanan kecamatan) SI Perijinan (subsistem surat pengantar/rekomendasi) SI Manajemen Tata Ruang Wilayah (subsistem pertanahan kecamatan)
40	Kecamatan Bebandem	x		
41	Kecamatan Selat	x		
42	Kecamatan Rendang	x		
43	Kecamatan Sidemen	x		
44	Kecamatan Manggis	x		
45	Kecamatan Abang	x		
46	Kecamatan Kubu	x		

Idealnya setiap aplikasi yang dimiliki setiap SKPD berbasis web dan terintegrasi dengan situs resmi dari masing-masing SKPD yang nantinya menjadi referensi link bagi portal kabupaten

1.6.2 Deskripsi Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan yang terjadi pada infrastruktur jaringan adalah belum adanya koneksi antar SKPD yang akan memudahkan hubungan antar SKPD, terutama untuk pemakaian layanan internal yang terintegrasi untuk seluruh SKPD yang ada.

Integrasi tersebut perlu memperhatikan peletakkan pusat koneksi Kabupaten Karangasem yang akan dikelola oleh Diskominfo sebagai penanggung jawab.

Koneksi *Local Area Network* di setiap SKPD perlu disediakan untuk memaksimalkan kinerja dari setiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Jenis koneksi jaringan harus disesuaikan dengan topologi daerah dan jarak SKPD.

Berikut peta perbandingan data infrastruktur komputer dan jaringan pada kondisi aktual yang diperoleh dengan kondisi ideal infrastruktur yang seharusnya tersedia

Tabel 1.4 Peta kesenjangan kondisi infrastruktur

NO	Jenis Perangkat	Jumlah dan Kondisi Perangkat	
		Eksisting	Idealnya
1	Server	7 unit	Jumlahnya bisa mencakup untuk kebutuhan layanan server seperti Web Server (utama, secondary dan Application), DNS & Bridge Server, Mail Server, Proxy Server, backup server, firewall, DHCP, Antivirus) Setiap SKPD yang memiliki dan mengelola aplikasi membutuhkan minimal 1 unit server lokal atau dapat dioptimalisasi jumlah

NO	Jenis Perangkat	Jumlah dan Kondisi Perangkat	
		Eksisting	Idealnya
			dengan membagi menurut pendekatan kluster berdasarkan lokasi terdekat dan kapasitas server. Jumlah rincinya akan dihitung sesuai kebutuhan SKPD
3	Komputer workstation (PC Desktop dan Laptop)	Total lebih dari 431 Unit, secara rata-rata 9 unit per SKPD, rasio komputer: pegawai =1:5, sebaran sangat Variatif, terdapat kesenjangan jumlah perangkat, ada SKPD yang memiliki 27 unit, ada yang hanya 1 unit	Setiap aparatur yang memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan layanan SKPD memperoleh satu unit komputer dan setiap SKPD minimal 4 unit, sampai ke tingkat kecamatan. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD
4	Perangkat Pendukung Jaringan LAN di setiap SKPD (kabel , access point, hub, switch)	Baru 9 SKPD yang telah memiliki perangkat pendukung jaringan dengan konfigurasi jaringan LAN yang bervariasi	Setiap SKPD memiliki perangkat pendukung jaringan LAN dengan Topologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD
5	Perangkat Pendukung Jaringan antar SKPD	Belum tersedia koneksi jaringan antar SKPD , tetapi terdapat 2 tower, 4 accesspoint yang dapat diberdayakan sebagai perangkat koneksi	Setiap Jaringan LAN SKPD memiliki access point dan membangun tower sesuai kebutuhan per kluster berdasarkan kedekatan lokasi. Selain itu dapat juga memanfaatkan tower, access point yang ada untuk terhubung antar jaringan tergantung dari jarak lokasi Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD
6	Perangkat Pendukung koneksi internet (Media, ISP, dll)	Baru 11 SKPD yang memiliki koneksi langsung ke internet dengan kapasitas bandwidth yang bervariasi, dengan jenis	Setiap Jaringan LAN SKPD terhubung dengan pusat jaringan, kemudian pusat jaringan yang akan mengelola gateway untuk akses koneksi ke internet

NO	Jenis Perangkat	Jumlah dan Kondisi Perangkat	
		Eksisting	Idealnya
		provider yang hampir sama	dan mengelola pengaturan kapasitas bandwidth dari setiap jaringan SKPD.
7	Perangkat Pendukung layanan Email	Pengelolaan layanan mail server oleh Diskominfo tetapi spesifikasi dan kapasitas server belum memadai dan penggunaannya masih belum optimal	Untuk setiap pegawai memiliki alamat email resmi Pemkab dengan limit space tertentu, selain itu disediakan alamat email jabatan resmi untuk kemudahan surat menyurat secara elektronik antar SKPD
8	Perangkat pendukung pengelolaan dokumen elektronik (Scanner, digital camera, dll)	Kepemilikan scanner dan digital camera masih sangat terbatas dan belum diberdayakan untuk mendukung sistem pengelolaan dokumen elektronik	Perangkat scanner sebaiknya dimiliki oleh setiap SKPD, wajib bagi bag umum, sekretariat dan dokumentasi. Sementara untuk digital camera dapat dioptimasi jumlahnya dan dikoordinir penggunaannya oleh bagian perlengkapan atau dokumentasi humas
9	Data Center terpadu	Belum tersedia	Ruangan khusus yang berisi server khusus dengan kapasitas besar untuk file dan database server untuk seluruh SKPD yang nantinya dikelola oleh Diskominfo
10	Network Operation Center Terpadu	Belum Tersedia	Ruangan khusus untuk NOC yang di dalamnya terdiri dari router, switch yang terhubung dengan seluruh jaringan SKPD, Email server dan dilengkapi perangkat penunjang sistem keamanan seperti router Firewall, bridge firewall, dll. Jika memungkinkan perangkat media transmisi menggunakan VSAT. Nantinya NOC akan dikelola oleh Diskominfo

NO	Jenis Perangkat	Jumlah dan Kondisi Perangkat	
		Eksisting	Idealnya
11	Infrastruktur Komunikasi Internal dan eksternal berbasis IP	Belum tersedia	Diadakan perangkat video conference yang memungkinkan audiensi dapat dilakukan melalui internet antar SKPD dan kepala daerah
12	Perangkat Call Center dan SMS Center	Sudah tersedia SMS Center yang dikelola Diskominfo, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya	Call Center yang dilengkapi dengan interface content management system dibangun untuk SKPD yang terkait langsung dengan layanan publik, dimana pengelolaannya dapat dikoordinir oleh Diskominfo atau bag Humas Sedangkan SMS center yang saat ini dikelola diskominfo yang ada dioptimalkan pemberdayaannya yang dihubungkan dengan interface yang telah dilengkapi dengan content management system

Berikut perhitungan kesenjangan jumlah perangkat komputer dan jaringan lokal berdasarkan SKPD

Tabel 1.5 Peta kesenjangan jumlah infrastruktur per SKPD

No	SKPD	Aktual				Ideal				Gap			
		Komputer			LAN	Komputer			LAN	Komputer			LAN
		Srv	PC	NB		Srv	PC	NB		Srv	PC	NB	
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	10	1	1	1	25	2	1	-1	-15	-1	0
2	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu	1	16	0	1	1	20	2	1	0	-4	-2	0
3	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	5	5	0	1	15	5	1	-1	-10	0	-1
4	Bagian Ekonomi	0	3	1	0	1	10	2	1	-1	-7	-1	-1
5	Bagian Pengendalian Pembangunan	0	4	3	0	1	10	3	1	-1	-6	0	-1

No	SKPD	Aktual				Ideal				Gap			
		Komputer			LAN	Komputer			LAN	Komputer			LAN
		Srv	PC	NB		Srv	PC	NB		Srv	PC	NB	
6	Bagian Umum	0	5	0	0	1	10	2	1	-1	-5	-2	-1
7	Bagian Organisasi	0	4	0	0	1	10	2	1	-1	-6	-2	-1
8	Dinas Kesehatan	0	18	8	0	1	25	8	1	-1	-7	0	-1
9	Badan Lingkungan Hidup	0	5	1	0	1	20	2	1	-1	-15	-1	-1
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	0	11	3	1	1	20	5	1	-1	-9	-2	0
11	Bagian Humas dan Protokol	0	6	1	0	1	10	4	1	-1	-4	-3	-1
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	3	1	0	1	10	2	1	-1	-7	-1	-1
13	Bagian Keuangan	0	27	2	1	1	28	5	1	-1	-1	-3	0
14	Bagian Perlengkapan	0	0	0	0	1	20	5	1	-1	-20	-5	-1
15	Bagian Hukum dan HAM	0	3	1	0	1	10	2	1	-1	-7	-1	-1
16	Bagian Tata Pemerintahan	0	2	1	0	1	10	2	1	-1	-8	-1	-1
17	Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran	0	5	1	0	1	25	5	1	-1	-20	-4	-1
18	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0	17	6	1	1	25	6	1	-1	-8	0	0
19	Badan Kepegawaian Daerah	0	10	2	1	1	25	5	1	-1	-15	-3	0
20	Sekretariat DPRD	0	2	0	0	1	10	2	1	-1	-8	-2	-1
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas	0	6	4	0	1	10	4	1	-1	-4	0	-1
22	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	0	5	0	0	1	10	2	1	-1	-5	-2	-1
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	16	2	1	1	25	5	1	0	-9	-3	0
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	10	3	0	1	25	5	1	-1	-15	-2	-1
25	Dinas Pekerjaan Umum	0	17	5	1	1	25	5	1	-1	-8	0	0
26	Dinas Sosial	1	5	1	0	1	25	5	1	0	-20	-4	-1
27	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan	0	8	0	0	1	25	5	1	-1	-17	-5	-1
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	1	10	5	1	-1	-10	-5	-1
29	Kantor Ketahanan Pangan	0	3	1	0	1	10	2	1	-1	-7	-1	-1
30	Rumah Sakit Umum	0	0	0	0	1	10	4	1	-1	-10	-4	-1

No	SKPD	Aktual				Ideal				Gap			
		Komputer			LAN	Komputer			LAN	Komputer			LAN
		Srv	PC	NB		Srv	PC	NB		Srv	PC	NB	
	Daerah												
31	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4	25	18	1	4	27	5	1	0	-2	-2	0
32	Dinas Koperasi dan UKM	0	13	2	0	1	25	5	1	-1	-12	-3	-1
33	Dinas PTP dan Hortikultura	0	16	5	0	1	25	5	1	-1	-9	0	-1
34	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0	18	3	0	1	25	5	1	-1	-7	-2	-1
35	Kantor Sat Pol PP	0	3	0	0	1	10	2	1	-1	-7	-2	-1
36	Kecamatan Karangasem	0	0	0	0	1	12	2	1	-1	-12	-2	-1
37	Kecamatan Bebandem	0	0	0	0	1	12	2	1	-1	-12	-2	-1
38	Kecamatan Selat	0	0	0	0	1	12	2	1	-1	-12	-2	-1
39	Kecamatan Rendang	0	5	0	0	1	16	2	1	-1	-11	-2	-1
40	Kecamatan Sidemen	0	5	0	0	1	16	2	1	-1	-11	-2	-1
41	Kecamatan Kubu	0	6	1	0	1	16	2	1	-1	-10	-1	-1
42	Kecamatan Manggis	0	0	0	0	1	16	2	1	-1	-16	-2	-1
43	Kecamatan Abang	0	8	0	0	1	16	2	1	-1	-8	-2	-1
44	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	0	9	0	0	1	20	2	1	-1	-11	-2	-1
45	Dinas Pendapatan	0	11	4	0	1	25	5	1	-1	-14	-1	-1
46	Inspektorat Daerah	0	0	0	0	1	25	2	1	-1	-25	-2	-1

Server yang dimaksud adalah application server yang dimiliki SKPD untuk menjalankan yang dimiliki setiap SKPD dan tidak termasuk server yang berada di Data and Network Operation Center

Rekapitulasi kesejangan perangkat komputer dan jaringan di seluruh SKPD termasuk pimpinan daerah adalah sbb:

No	Kondisi	Server (Srv)	Komp Desktop (PC)	Notebook (NB)	Paket Perangkat & Instalasi LAN
1	Aktual	7	345	86	9
2	Ideal	49	811	158	46
3	Gap	-42	-466	-89	-37

BAB II

RANCANGAN KEBUTUHAN DAN STANDARISASI APLIKASI & INFRASTRUKTUR

2.1 Rancangan Kebutuhan Aplikasi

2.1.1 Kebutuhan Aplikasi Khusus

Daftar kebutuhan aplikasi muncul dari hasil analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang akan dicapai terhadap rencana kebutuhan pengembangan aplikasi yang akan dilakukan . Secara umum hampir seluruh SKPD membutuhkan suatu aplikasi yang dapat mendukung manajemen data dan informasi serta peningkatan layanan terhadap publik, baik aplikasi yang sama sekali baru akan dibangun maupun pengembangan dari aplikasi yang saat ini sudah digunakan.

Jumlah aplikasi yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan melalui e-Government sebanyak 60 Aplikasi dengan pembagian 48 Aplikasi yang sama sekali baru dan 12 aplikasi yang sudah ada dan akan dikembangkan lebih lanjut. Dari 48 Aplikasi baru tersebut, 17 diantaranya berorientasi pada layanan publik sedangkan sisanya berorientasi pada layanan internal digunakan untuk manajemen penyelenggaraan pemerintahan . Sedangkan dari 12 aplikasi lama yang akan dikembangkan 9 diantaranya aplikasi yang berorientasi untuk melayani kebutuhan masyarakat (publik).

Berikut daftar nama aplikasi baru, SKPD pemilik dan Pihak yang menggunakan Aplikasi tersebut :

Tabel 1.6 Daftar aplikasi baru

No	Aplikasi Baru	Orientasi layanan	Pemilik	Pengguna
1	e-Agenda	Internal	Bag Humas & Protokoler	Seluruh pejabat daerah
2	e-Job/e-recruitment	Publik	Disnakertrans	Disnakertrans, Perusahaan, penduduk
3	e-Learning Dikdasmen	Publik	Disdik	Disdikpora, Siswa dan Guru Sekolah
4	e-Learning Diklat Pegawai	Internal	BKD	BKD, Pegawai
5	e-Parliament/Sistem Informasi administrasi DPRD	Publik	Setwan	Setwan, Anggota DPRD, Penduduk
6	e-Planning/SIMRENBANGDA	Internal	Bappeda	Bappeda, Seluruh SKPD
7	e-procurement/SIM Pengadaan	Publik	Bag Perlengkapan	Bag lengkap, seluruh SKPD
8	e-transportation/SIM Transportasi	Publik	Dishub	Dishubkar, Pengusaha Transport, Polisi, Pengguna jasa
9	SI Jaringan Pengaman Sosial	Internal	Dinsos	Dinsos, Bag Kesra, Kecamatan, Kelurahan
10	SI Pendukung Keputusan	Internal	Bag organisasi	Bag. Organisasi, Bupati, wabupati, Sekda dan pimp SKPD
11	SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik	Internal	Bag Umum	Bag. Umum seluruh SKPD
12	SI Pengelolaan Lingkungan	Internal	BLH	Badan LH, Dishutbun, DisPU
13	SI Pilkada	Publik	Setwan	Kesbanglinmas, Setwan, Penduduk
14	SIM Bisnis dan Investasi Daerah	Publik	Bag Ekonomi	Bag ekonomi, Kantor Perijinan, Pengusaha, Dispenda
15	SIM Akuntansi Daerah	Internal	Bag Keuangan	Bag Keuangan, seluruh SKPD
16	SIM Arsip Daerah	Internal	Kantor Perpus & Arsip	kantor Perpus & Arsip, seluruh SKPD

No	Aplikasi Baru	Orientasi layanan	Pemilik	Pengguna
17	SIM Asset dan Barang Daerah	Internal	Bag Perlengkapan	Bag Pelengkapan, Bag Keuangan, seluruh SKPD
18	SIM Penanganan Bencana	Internal	Dinsos	Dinsos, bag Kesra, Kecamatan, Kelurahan
19	SIM Data Pembangunan	Internal	Bag Dalbang	Bag Dalbang, Bappeda, DisPU
20	SIM DIKlat Daerah	Internal	BKD	BKD, Seluruh SKPD, Pegawai
21	SIM Evaluasi dan Pengendalian Proyek	Internal	Bag Dalbang	Bag. Dalbang, Bappeda, Inspektorat
22	SIM Katalog HUKUM dan Perundangan	Publik	Bag Hukum	Bag Hukum, seluruh SKPD, penduduk
23	SIM Kehutanan dan Perkebunan	Internal	Dishutbun	Dishutbun, Bag Ekonomi, Bappeda
24	SIM kelautan dan Perikanan	Internal	DisPKP	DisPKP, Bag. Ekonomi, Bappeda
25	SIM Kesra	Internal	Bag. Kesra	Bag. Kesra, BPPKB, KKP
26	SIM Koperasi	Publik	DiskopUKM	DiskopUKM, koperasi dan anggota
27	SIM Layanan Hukum & HAM	Publik	Bag Hukum & HAM	Bag Hukum, seluruh SKPD, penduduk
28	SIM Manajemen BMN	Internal	Bag Keuangan	Bag Keuangan, seluruh SKPD
29	SIM Organisasi Non-Pemerintah	Publik	Kantor Kesbanglinmas	Kantor Kesbanglinmas, LSM, Ormas, penduduk
30	SIM Pekerjaan Umum	Internal	DisPU	DisPU, Bappeda, BagDalbang, Bag Ekonomi
31	SIM Pelaporan Kepemerintahan	Internal	Bag Tata Pemerintahan	Bag tata pemerintah, seluruh SKPD s.d kelurahan
32	SIM Pembinaan Pemuda & Olahraga	Publik	Disdikpora	Disdikpora, organisasi pemuda, organisasi OR
33	SIM Pemeliharaan & Perbaikan	Internal	Bag Perlengkapan	Bag Pelengkapan, Bag Keuangan, seluruh SKPD

No	Aplikasi Baru	Orientasi layanan	Pemilik	Pengguna
34	SIM Pendapatan Daerah (Pajak, retribusi dll)	Internal	Dispenda	Dispenda, Bag Keuangan, SKPD sektoral terkait
35	SIM Pengawasan	Internal	Inspektorat	Inspektorat, seluruh SKPD
36	SIM Perekonomian Daerah	Internal	Bag. Ekonomi Daerah	Bag Ekonomi, seluruh SKPD sektoral terkait
37	SIM perindag	Internal	Disperindag	Disperindag, seluruh SKPD terkait
38	SIM Perjalanan Dinas	Internal	Bag. Umum	Bag. Umum, BKD, Bag. Keuangan dan Seluruh pejabat SKPD
39	SIM Pertanian	Internal	Distan	Distan, Bag Ekonomi, Bappeda, Penduduk
40	SIM Peternakan	Internal	DisPKP	DisPKP, Bag Ekonomi, Bappeda
41	SIM Protokoler	Internal	Bag Humas & Protokoler	Bag Humas & Protokoler, seluruh SKPD, penduduk
42	SIM Puskesmas	Publik	Dinkes	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Pasien
43	SIM RSUD	Publik	RSUD	RSUD, Dinkes, Puskesmas, Pasien
44	SIM Sekolah	Publik	Disdikpora	Disdikpora, seluruh sekolah
45	SIM Tata Laksana Kelembagaan	Internal	Bag organisasi	Bag Organisasi, Seluruh SKPD
46	SIM Tata Ruang	Internal	DisPU	DisPU, Kantor Perijinan, Dinas kebersihan, satpol PP
47	SIM UKM	Publik	DiskopUKM	DiskopUKM, UKM dan Anggotanya
48	SIM Penanganan kebakaran	Publik	Dishubkar	Dishubkar, Penduduk

Sedangkan daftar nama aplikasi yang saat ini sudah ada dan akan dikembangkan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.7 Daftar aplikasi yang akan dikembangkan

No	Aplikasi existing yang akan dikembangkan	Orientasi layanan	Pemilik	Pengguna
1	SI Administrasi Kependudukan & Capil: Saat ini sudah ada aplikasi berbasis Web dari Pemerintah Pusat, pengembangan untuk memenuhi modul capil dan yang belum tercover	Publik	Disdukcapil	Disdukcapil, Kecamatan, Kelurahan
2	e-health/SI Jakesda : Pada saat survey, sedang dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang baru diimplementasikan tahun 2010; Pengembangan ke arah modul yang belum tertangani sesuai kebutuhan satker dan daerah	Publik	Dinkes	Dinkes, Puskesmas, Bag Kesra, Penduduk
3	e-mail : Layanan email sudah ada, tetapi belum dikelola secara maksimal; Pengembangan ke arah pemanfaatan email sebagai salah satu sarana komunikasi antar satuan kerja	Internal	Diskominfo	Diskominfo, pegawai
4	Portal Informasi Kabupaten: Sudah ada Web resmi Kabupaten , tetapi masih terbatas sebagai web publikasi informasi; Pengembangan secara bertahap agar web dapat menjadi portal dan menjadi gerbang bagi seluruh pengunjung yang membutuhkan informasi dan melakukan transaksi secara online	Publik	Diskominfo	Diskominfo, Seluruh SKPD
5	SIG –Potensi Ekonomi Daerah : Saat ini sudah ada aplikasi SIM Potensi Daerah berbasis sdesktop yang dikelola Bappeda; Pengembangan ke arah SIG potensi daerah yang juga memuat data spasial potensi daerah serta berbasis web. Diusulkan SIGPE dikelola bag Ekonomi	Publik	Bag Ekonomi	Bag. Ekonomi, Bappeda, Dishutbun, distan, disKP, Pengusahadll

No	Aplikasi existing yang akan dikembangkan	Orientasi layanan	Pemilik	Pengguna
6	SIM Keuangan Daerah; layanan yang tersedia baru sebatas aplikasi Daftar gaji pegawai; Pengembangan ke arah Pembangunan SIM keuangan yang lebih komprehensif berbasis web dan mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada sebagai salah satu sub modul sistem tsb	Internal	Bag.Keu	Bag Keuangan, seluruh SKPD
7	SIM Pariwisata & Kebudayaan: Saat ini sudah tersedia layanan situs/web publikasi informasi mengenai kepariwisataan; Pengembangan di arahkan pada SIM Budpar berbasis web yang lebih komprehensif dan dikolaborasi dengan situs yang sudah ada	Publik	Disbudpar	Disbudpar, Pengusaha, Penduduk, Turis
8	SIM perpustakaan: saat ini sudah ada aplikasi otomasi perpustakaan berbasis desktop; Pengembangan ke arah SIM Perpustakaan berbasis web dengan modul-modul yang lebih komprehensif dan dapat dilakukan pemesanan secara online oleh peminjam	Publik	Kantor Perpus & Arsip	Kantor Perpus & Arsip, seluruh SKPD, pengunjung
9	SIM Perijinan Terpadu : Saat ini sudah ada aplikasi pengolahan data perijinan menggunakan Access; Pengembangan ke arah SIM perijinan Terpadu dengan platform database yang sesuai untuk jaringan dan berbasis web.	Publik	Kantor Perijinan terpadu	kantor Perijinan, seluruh SKPD terkait
10	SIM Kepegawaian Daerah: saat ini sudah ada aplikasi SIMPEG berbasis Desktop, yang mengolah informasi data kepegawaian. Pengembangan diarahkan pada SIM PEG berbasis web yang memiliki modul-modul yang tidak hanya mengelola informasi data kepegawaian, tetapi juga melakukan pencatatan terhadap rekam jejak pegawai dan	Internal	BKD	BKD, Seluruh SKPD, Pegawai

No	Aplikasi existing yang akan dikembangkan	Orientasi layanan	Pemilik	Pengguna
	pengembangan karir			
11	e-education/ SIMDIKDA: saat ini yang baru digunakan adalah aplikasi dari depdiknas mengenai pendataan pendidik dan tenaga kependidikan serta pangkalan data dan Informasi lembaga sekolah secara terpusat. Pengembangan di arahkan pada SIM Pendidikan Daerah berbasis web yang lebih rinci dan komprehensif spesifik dalam lingkup kabupaten dan dapat terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada.	Publik	Disdikpora	Disdikpora, seluruh sekolah
12	SIM Humas: saat ini sudah ada layanan SMS Gateway, sebagai media komunikasi via SMS dan dikelola Diskominfo; Pengembangan ke arah SIM HUMAS berbasis Web melalui SMS gateway. Disarankan untuk pengelolaan infrastruktur tetap di diskominfo, sedangkan pengelolaan konten diserahkan ke bag Humas & protokoler	Publik	Diskominfo & Bag Humas	Diskominfo, Bag Humas & protokoler, Inspektorat, penduduk

Deskripsi modul sistem dari setiap aplikasi yang telah teridentifikasi, disajikan mengacu format properti modul sistem aplikasi yang terdapat pada panduan penyusunan blueprint aplikasi e-government yang dikeluarkan Departemen Komunikasi dan Informatika. Uraian deskripsi aplikasi secara rinci dapat dilihat pada bagian lampiran 2.

2.1.2 Pemetaan Untuk Proses Pengembangan Aplikasi

Agar mempermudah proses pengembangan aplikasi khusus yang telah teridentifikasi sehingga data antar aplikasi yang berhubungan dapat terintegrasi secara secara lebih efektif dan efisien, maka pengembangan

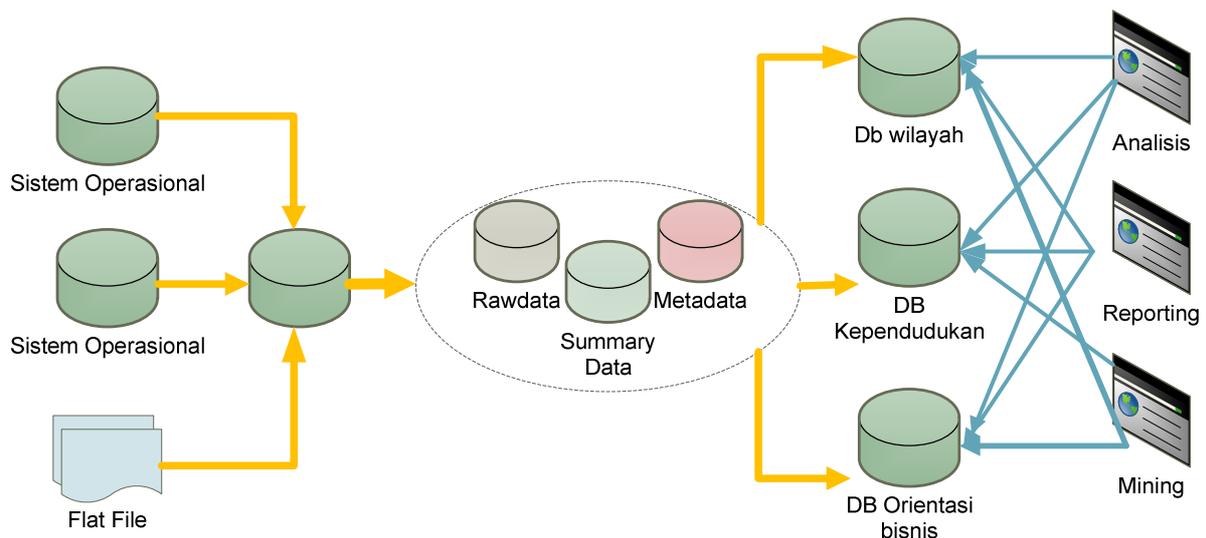
setiap aplikasi harus mengacu kepada peta solusi aplikasi e-Government yang terdiri dari 4 kategori besar yaitu

1. aplikasi layanan Government to Government (G2G), baik yang sifatnya layanan internal maupun antar pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Domain dari pengembangan pada aplikasi layanan G2G berdasarkan pada layanan sistem administrasi pelaporan dan pengelolaan dokumen elektronik.
2. aplikasi layanan Government to Citizen (G2C), yaitu aplikasi-aplikasi yang berorientasi pada layanan yang berhubungan dengan kebutuhan penduduk, seperti layanan administrasi kependudukan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, transportasi publik. Untuk meningkatkan integritas dan konsistensi data, domain pengembangan aplikasi-aplikasi yang termasuk pada layanan G2C berdasarkan kepada sistem informasi administrasi kependudukan.
3. aplikasi layanan Government to Business (G2B), yaitu aplikasi-aplikasi yang berorientasi pada layanan yang berhubungan dengan kebutuhan dunia bisnis. Domain pengembangan aplikasi-aplikasi yang termasuk pada layanan G2B berdasarkan pada sistem informasi perijinan terpadu.
4. aplikasi dasar umum, yaitu aplikasi dasar perkantoran di luar aplikasi khusus. Aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan berbasis open source

Untuk setiap aplikasi yang menjadi bagian dari masing-masing kategori layanan diharapkan dapat dikembangkan dengan basis platform teknologi dan database yang sama kecuali aplikasi yang saat ini sudah digunakan dan memiliki platform teknologi yang berbeda

2.1.3 Integrasi dan Interoperabilitas Data dan Aplikasi

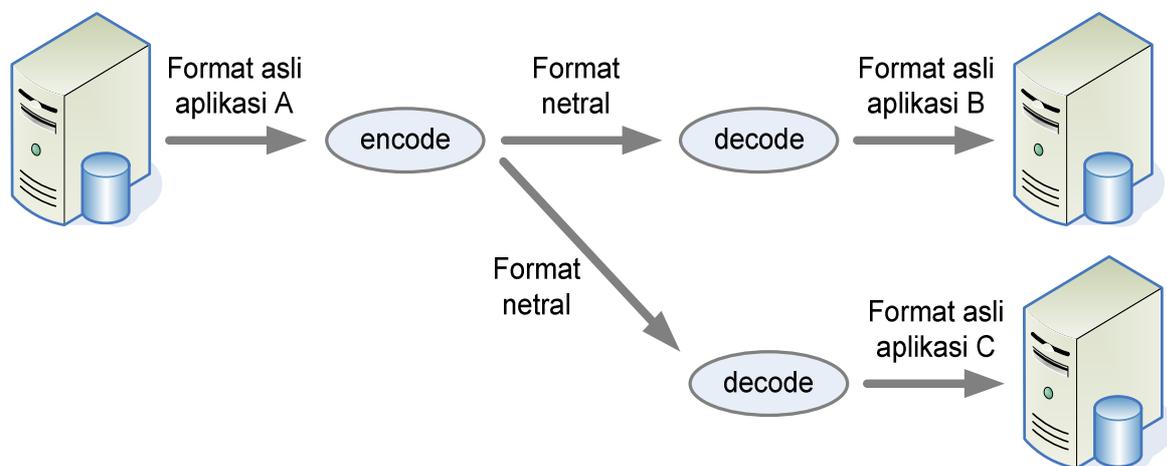
Pengintegrasian aplikasi perlu dilakukan untuk menjamin konsistensi data dan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya dari sisi data, ditawarkan konsep pengelolaan data ke arah pengembangan data warehouse. Data warehouse adalah sebuah konsep dimana data di ekstrak atau dipisahkan dari sistem operasional dan diolah agar tersedia sebagai sebuah rekaman historis untuk permintaan-permintaan tertentu dan laporan terjadwal. Karakteristik yang memisahkan data yang berada di data warehouse dari data yang ditemukan pada lingkungan operasional adalah disusun sebagaimana bagian-bagian kecil dari data di satukan untuk akses yang lebih mudah, beberapa duplikat data dari berbagai waktu disimpan bersama, dan setelah data diletakkan pada data warehouse data tersebut tidak diperbaharui. tetapi, disegarkan kembali secara periodik dengan data dari database operasional.



Gambar 1.20 Skema Data Warehouse

Selain pengintegrasian data, yang tidak kalah penting adalah bagaimana interoperabilitas antar aplikasi untuk mengantisipasi adanya kemungkinan dinas atau instansi yang membangun aplikasinya sendiri atau memperoleh bantuan aplikasi dengan platform yang berbeda-beda.

Dalam pertukaran data antar aplikasi komputer yang berbeda, masalah utamanya terletak pada format data. Perbedaan format data menyebabkan data dari satu aplikasi tidak bisa begitu saja dikirimkan ke dan digunakan oleh aplikasi lainnya. Untuk itu diperlukan sebuah format "netral" yang disepakati oleh kedua aplikasi. Kata "netral" berarti tidak memihak ke format yang digunakan oleh salah satu aplikasi. Format netral ini kemudian digunakan sebagai format "antara" dalam pengiriman data, seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah mengenai Penggunaan format netral juga meningkatkan ekstensibilitas. Aplikasi yang lain dapat pula memanfaatkannya, tanpa harus mengetahui format aslinya.



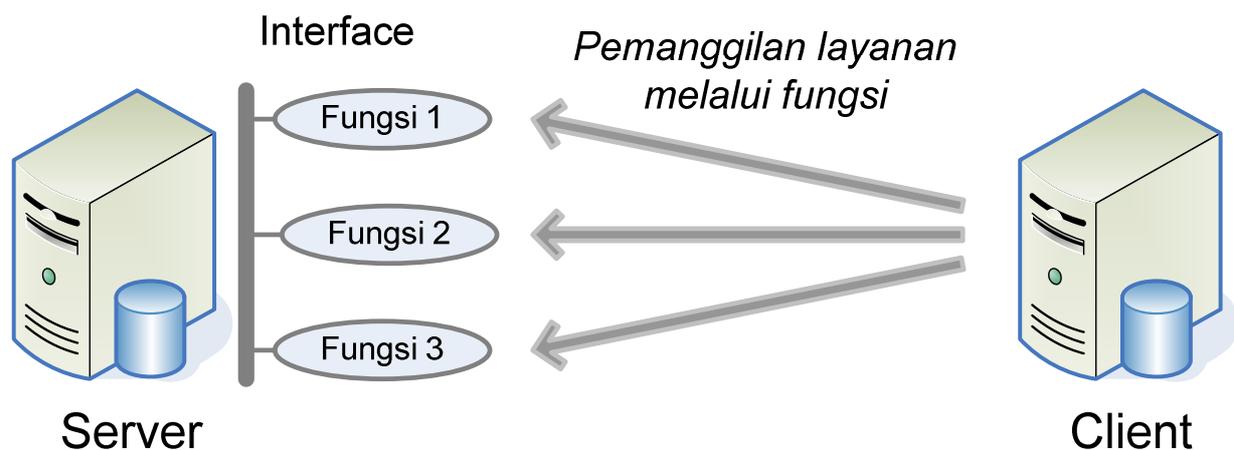
Gambar 1.21 Penggunaan Format Netral untuk ekstensibilitas

Sejauh ini, format netral untuk pertukaran data banyak dijalankan oleh **XML** (eXtensible Markup Language). XML adalah sebuah format dokumen yang mampu menjelaskan struktur dan semantik (makna) dari data yang

dikandung oleh dokumen tersebut [1]. Berbeda dengan HTML yang lebih berorientasi pada tampilan (*appearance*), XML lebih fokus pada substansi data, sehingga lebih cocok digunakan sebagai media pertukaran data. Kelebihan XML dibandingkan format teks biasa adalah dengan XML, struktur data yang ditransfer tidak "hilang", demikian juga deskripsi tentang semantik datanya. Dengan karakteristiknya ini, XML telah menjadi standar *de-facto* bagi pertukaran data antar aplikasi komputer. Spesifikasi formatnya pun telah distandarkan untuk menjadi referensi yang sama bagi tiap aplikasi komputer yang memerlukannya.

Selain format, masalah lain dalam pertukaran data antar aplikasi komputer adalah mekanisme pertukarannya. Aplikasi-aplikasi yang berkomunikasi biasanya independen satu sama lain. Keduanya dibuat oleh pengembang yang berbeda, pada saat yang tidak sama pula. Padahal untuk bisa berkomunikasi, sebuah aplikasi harus tahu tentang cara menghubungi dan berbicara dengan aplikasi mitranya serta struktur data yang terlibat. Memberitahu semua ini berarti memberitahu detail internal dari aplikasi tersebut, dan ini yang sering menimbulkan kesulitan, karena tidak semua instansi bersedia membuka detail internal aplikasinya ke pihak lain, dengan alasan keamanan data dan sebagainya. Oleh karena itu, belakangan ini yang banyak dilakukan orang adalah menggunakan **Service-Oriented Architecture (SOA)**. SOA adalah sebuah skema yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi dilakukan secara *loosely-coupled*, artinya masing-masing pihak tidak perlu punya ketergantungan yang tinggi satu sama lain. Dalam SOA, komunikasi didasarkan pada konsep layanan (*service*). Komunikasi berbasis layanan ini menggunakan prinsip *client-server*. Ada aplikasi yang menyediakan layanan, dan aplikasi lain bisa meminta layanan tersebut. Permintaan terhadap layanan dilakukan dengan cara memanggil sebuah fungsi yang merepresentasikan layanan tersebut. Bila sebuah fungsi dipanggil, maka aplikasi penyedia layanan wajib memberikan layanannya ke aplikasi pemanggil.

Keunggulan SOA adalah bahwa detail-detail internal yang terlibat dalam pemanggilan fungsi layanan sepenuhnya "dibungkus" (disembunyikan) di balik fungsi tersebut. Ada "interface" yang secara tegas memisahkan bagian yang bersifat publik (boleh diketahui oleh aplikasi-aplikasi lain), dan bagian yang bersifat privat (aplikasi lain tidak perlu tahu). Dengan adanya interface ini, aplikasi *client* tidak perlu tahu tentang detail-detail internal, cukup sintaks fungsinya saja yang perlu diketahui. SOA bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak: *server* tidak perlu menunjukkan detail-detail data yang mungkin bersifat sensitif atau rahasia, sementara sebuah *client* tetap bisa meminta data yang diinginkannya kepada *server*. Gambar di bawah menunjukkan mekanisme SOA yang bersifat *loosely-coupled*.

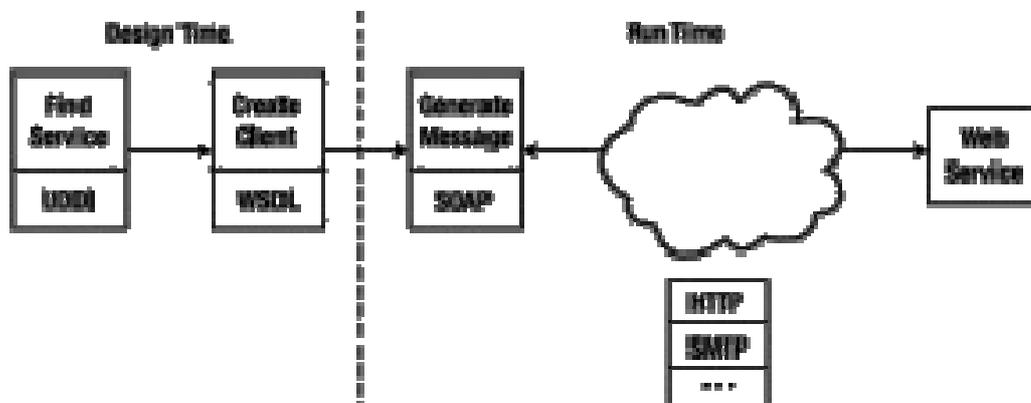


Gambar 1.22 mekanisme SOA

Dalam lingkungan aplikasi berbasis Web, SOA diimplementasikan dengan teknologi **web service**. *Web service* menggunakan konsep seperti pada Gambar tersebut. *Web service* juga menyediakan abstraksi yang seragam bagi aplikasi-aplikasi *client* dan *server*. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi lagi. Pada dasarnya aplikasi *server* dan *client* dapat dikembangkan dengan berbagai perangkat keras, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan

sistem basis data. Kemudian aplikasi ini dikemas sehingga bisa diakses dengan menggunakan protokol dan format standar web (http dan XML). Karena web sendiri sudah berkembang sebagai sebuah platform standar, maka web service menjadi sebuah pilihan yang menjanjikan. Teknologi dalam Web service terdiri dari beberapa komponen yaitu:

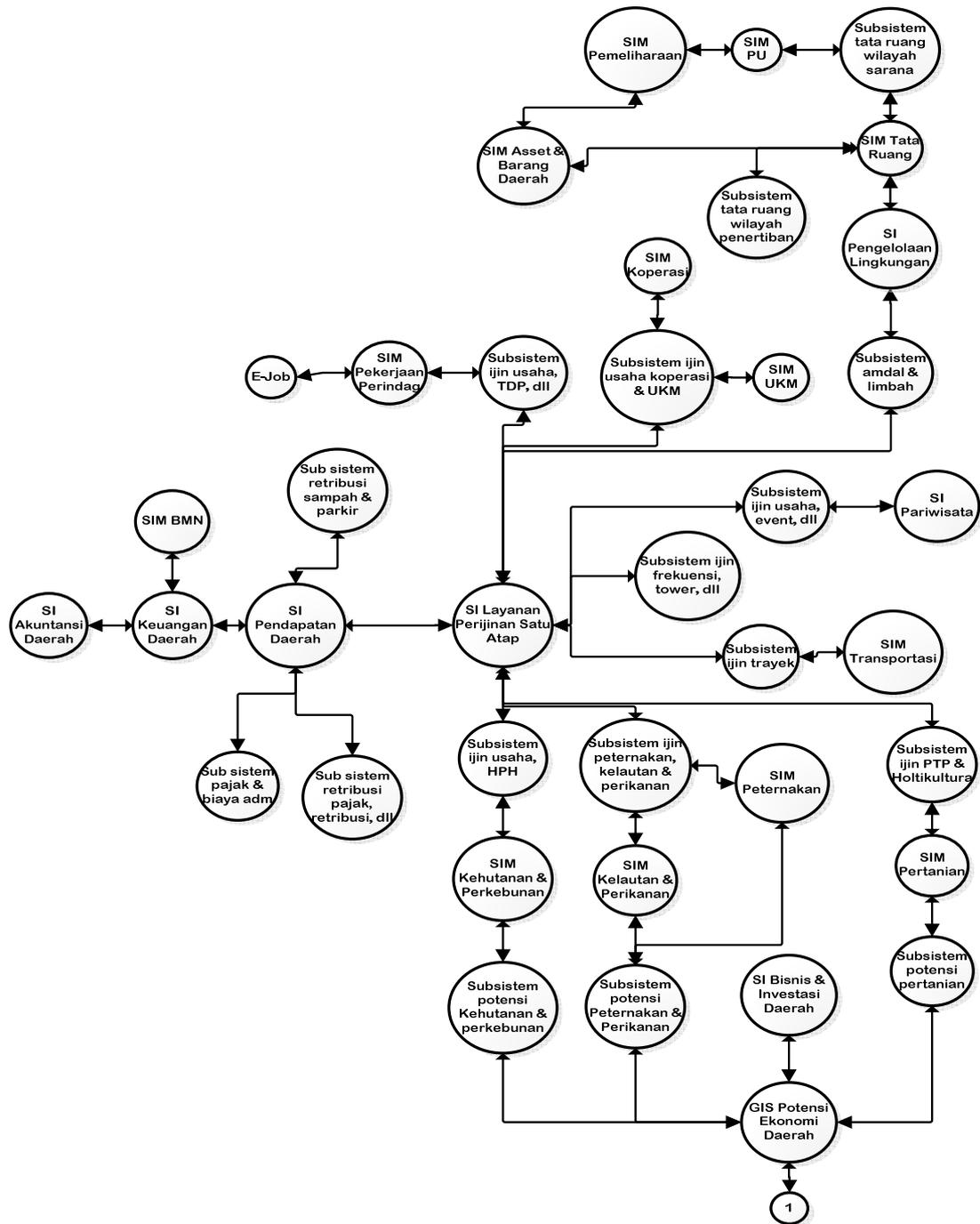
- Simple Object Access Protocol (SOAP) yang merupakan teknologi transportasi dan pertukaran dokumen XML. Dokumen XML merupakan presentasi data berbasis standar terbuka yang dipergunakan untuk penyebaran data pada berbagai sistem.
- Web Service Definition Language (WSDL) merupakan antar muka web service yang menyatakan parameter masukan dan keluaran untuk pemanggilan servis secara eksternal, struktur penanda fungsi yakni cara pemanggilan (apakah hanya pemanggilan saja, pemanggilan dan pembalikan hasil dan sebagainya)
- Universal Description, Discover, and Integration (UDDI) merupakan direktori yang menampilkan daftar layanan disediakan.

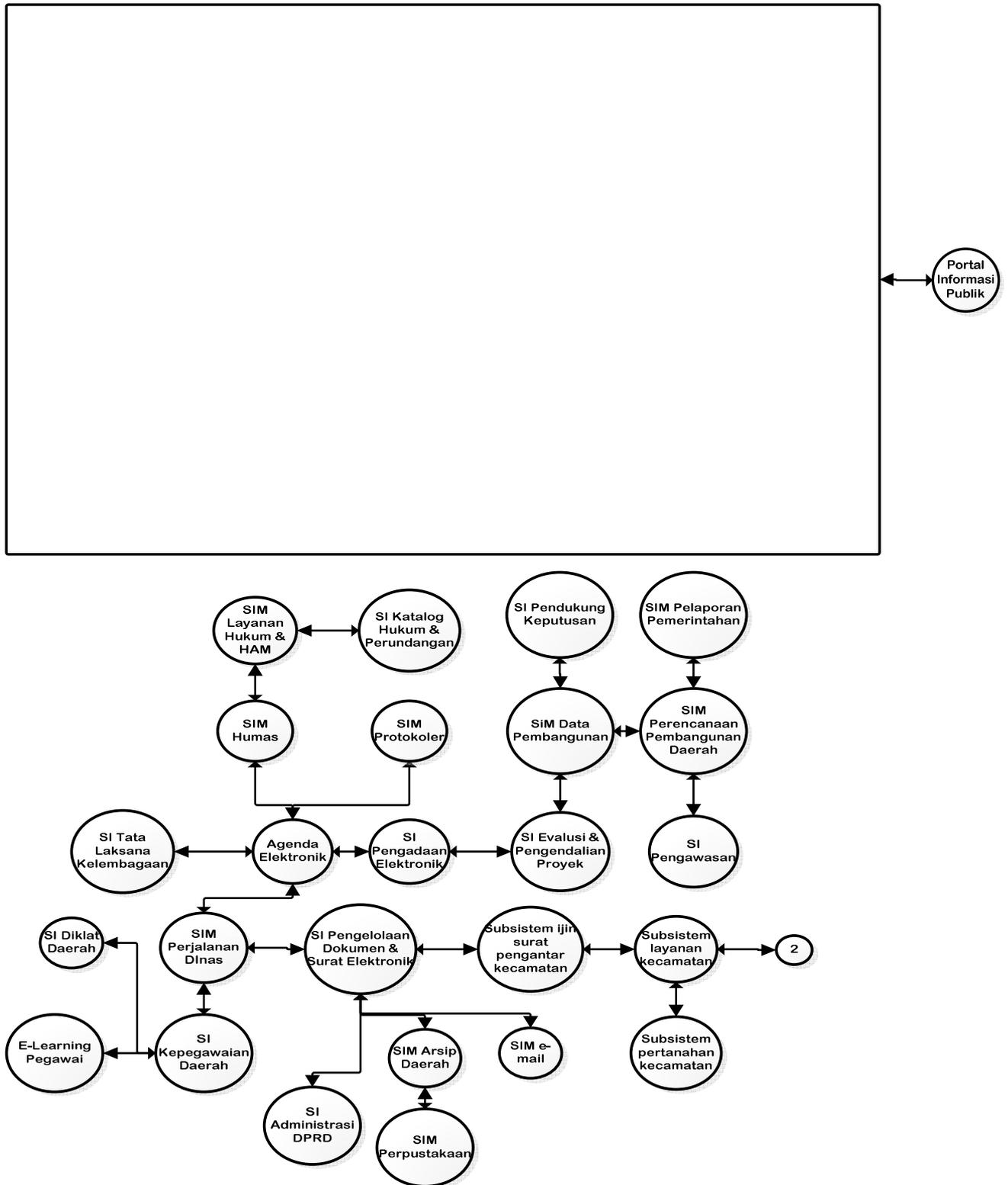


Gambar 1.23 Gambar Komponen Teknologi Web Service

2.1.4 Pemetaan Hubungan Antar Aplikasi Khusus

Berikut disajikan gambaran mengenai hubungan antar aplikasi yang akan dibangun berdasarkan adanya kebutuhan interaksi data antar aplikasi satu sama lain.



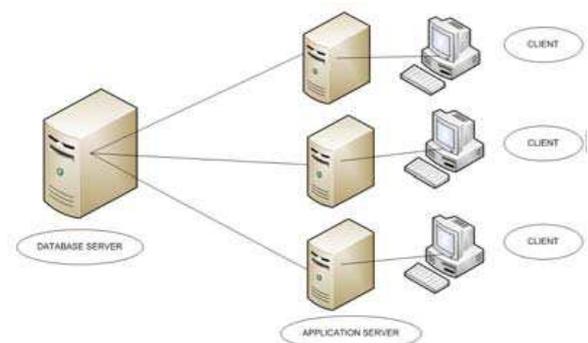
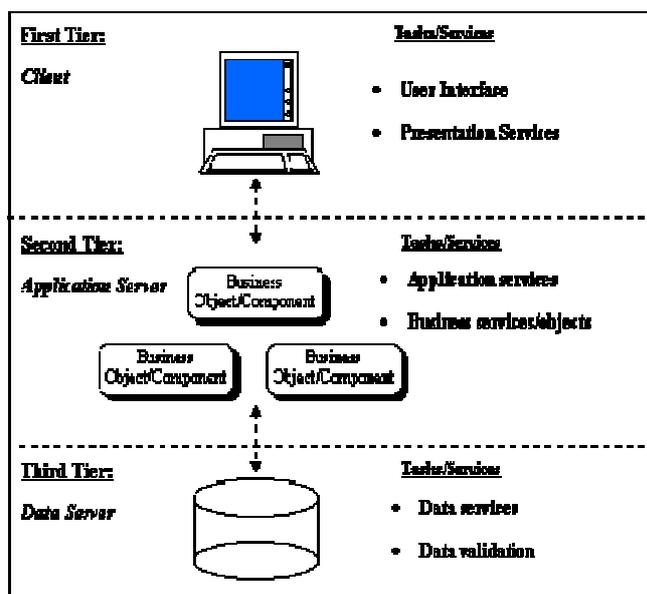


Gambar 1.24 Konsep hubungan antar aplikasi

2.1.5 Model Arsitektur Aplikasi

Dalam membangun suatu sistem yang terintegrasi, pilihan model arsitektur aplikasi menjadi sangat penting. Dalam pengembangan aplikasi yang akan digunakan dalam penerapan e-Government di Kabupaten Karangasem, Arsitektur Aplikasi yang digunakan adalah arsitektur 3-tiers. Arsitektur ini dipilih karena merupakan model arsitektur yang mampu mengakomodasi faktor-faktor penting dalam membangun atau pengembangan suatu sistem aplikasi seperti produktivitas, fleksibilitas, skalabilitas, reusabilitas. Arsitektur Aplikasi 3-tiers, dibagi menjadi 3 bagian (lapisan/layer) :

1. Lapisan Basis Data (Database Layer)
2. Lapisan Layanan (Service Layer, component Layer, Business Logic Layer)
3. Lapisan Client (User/Client Layer, Presentation Layer)



Gambar 1.25 arsitektur aplikasi 3-tier

Lapisan basis data

Selain berisi data tabel dan view, database mampu menyediakan stored Procedure (SP) dimana segala aktifitas yang berhubungan dengan manipulasi tabel dan view dapat terpenuhi. Secara teknis dari lapisan beberapa obyek

yang di sediakan seorang administrator Database seperti : Tabel dan view, Store Procedure berkaitan dengan aktifitas insert,delete,update, Store procedure yang lebih kompleks misalnya untuk keperluan reporting dll yang mana obyek yang tersedia akan dikonsumsi pada saat pembangunan service layer. MS SQL server , mysql, sysbase dan Oracle adalah beberapa contoh database yang banyak digunakan dilapisan ini.

Lapisan Layanan

lapisan tengah ini berfungsi sebagai jembatan (interface) antara database layer dengan presentation/user layer. Programmer membuat metode yang bersifat global , mengatur cara bagaimana resource/obyek di lapisan data dapat digunakan di presentation/user layer. Banyak cara yang digunakan untuk membangun ini seperti beberapa bentuk middleware(RFC,RPC ,CORBA) ,Webservice, TCP/IP (telnet,winsoc,socket), WCF dari .NET framework 3.5 dan lain lain.

Lapisan Klien

Banyak jenis aplikasi yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi layanan di service layer baik aplikasi desktop maupun web base. Dengan memanfaatkan service yang ada, lapisan ini diharapkan dapat berinteraksi dengan database. Dalam proses pengembangan modul presentasi, setiap perubahan di satu modul tidak berdampak pada modul lain. Hal inilah menjadi salah satu keuntungan arsitektur 3-tier.

Arsitektur Three Tier ini banyak sekali diimplementasikan dengan menggunakan Web Application. Karena dengan menggunakan Web Application, Client Side (Komputer Client) hanya akan melakukan instalasi Web Browser. Dan saat komputer client melakukan inputan data, maka data tersebut dikirimkan ke Application Server dan diolah berdasarkan business process-nya. Selanjutnya Application Server akan melakukan komunikasi

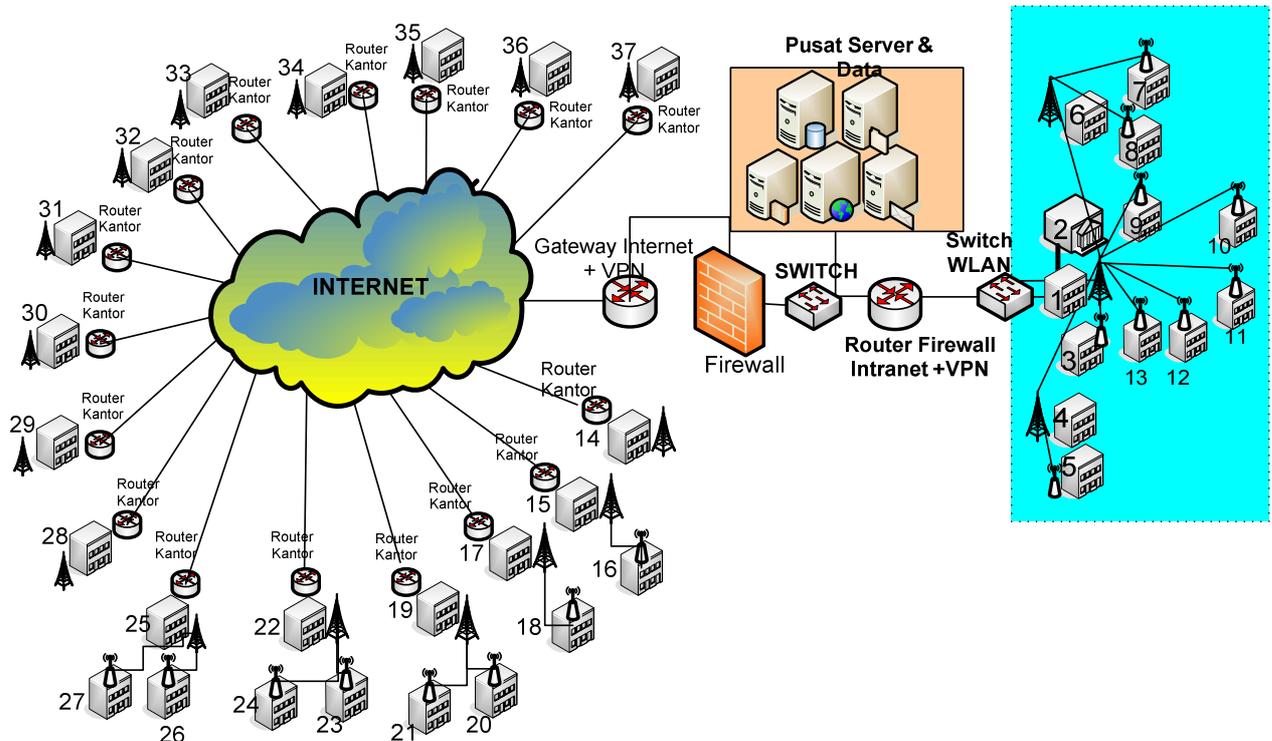
dengan database server. Biasanya, implementasi arsitektur Three Tier terkendala dengan network bandwidth. Karena aplikasinya berbasis web, maka Application Server selalu mengirimkan Web Application-nya ke computer Client. Jika kita memiliki banyak sekali client, maka bandwidth yang harus disiapkan akan cukup besar, Sedangkan network bandwidth biasanya memiliki limitasi. Oleh karena itu biasanya, untuk mengatasi masalah ini, Application Server ditempatkan pada sisi client dan hanya mengirimkan data ke dalam database server

2.2 Rancangan Kebutuhan Infrastruktur

Rancangan kebutuhan infrastruktur dibuat berdasarkan hasil analisis kesenjangan antar kondisi aktual dan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai.

Setelah mempertimbangkan kondisi geografis dan sebaran lokasi SKPD yang beberapa di antaranya cukup jauh jaraknya dari pusat pengoperasian jaringan, perancangan kebutuhan infrastruktur khususnya jaringan yang nantinya akan menghubungkan seluruh SKPD ke kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem akan dibagi tiga berdasarkan jarak lokasi terhadap pusat pengoperasian jaringan, yaitu : (1) kebutuhan infrastruktur di pusat data dan pengoperasian jaringan, yang dalam rancangannya akan memiliki lokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika; (2) Kebutuhan infrastruktur yang menghubungkan pusat data dan pengoperasian jaringan dengan jaringan seluruh SKPD dan jaringan antar SKPD termasuk kecamatan, rencananya akan menggunakan kombinasi media koneksi kabel Fiber Optic (FO), wireless dan Virtual Private Nertwork (VPN); (3) kebutuhan infrastruktur LAN di masing-masing SKPD menggunakan media koneksi kabel UTP.

Skema koneksi jaringan yang dibangun antara Pusat data dan jaringan dengan klien (SKPD) maupun jaringan antar SKPD dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.



Keterangan Legend

- 1 Diskominfo - Pusat Data & Operasi Jaringan
- 2 Kantor Bupati
 - a. R. Bupati
 - b. R. Wakil Bupati
 - c. R. Setda + Asisten Setda
 - d. Bag. Ekonomi
 - e. Bag. Pengendalian Pembangunan
 - f. Bag. Umum
 - g. Bag. Organisasi
 - h. Bag. Humas dan Protokol
 - i. Bag. Kesejahteraan Rakyat
 - j. Bag. Keuangan
 - k. Bag. Perlengkapan
 - l. Bag. Hukum dan HAM
 - m. Bag. Tata Pemerintahan
 - o. Dinas Pendapatan Daerah
- 3 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
- 4 Badan Lingkungan Hidup
- 5 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 6 Dinas Peternakan, Kelautan & Perikanan
- 7 Dinas Sosial
- 8 Rumah Sakit Umum Daerah
- 9 Dinas Kehutanan & Perkebunan
- 10 Badan Pemberdayaan perempuan & KB
- 11 Sekretaris Dewan
- 12 Kantor Kesbanglinmas
- 13 Kantor Satpol PP
- 14 Kantor Pelayanan & Perijinan Terpadu
- 15 Dinas Perhubungan dan Kebakaran
- 16 Dinas Koperasi & UKM
- 17 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
- 18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 19 Kecamatan Karangasem
- 20 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 21 Inspektorat darah
- 22 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
- 23 Dinas Kesehatan
- 24 BPMPD
- 25 Dinas Pendidikan, Pemuda & OR
- 26 Badan Kepegawaian Daerah
- 27 Kantor Ketahanan Pangan
- 28 Dinas Pekerjaan Umum
- 29 Dinas Perindustrian & Perdagangan
- 30 Kecamatan Bebandem
- 31 Kecamatan Manggis
- 32 Kecamatan Sidemen
- 33 Kecamatan Selat
- 34 Kecamatan Rendang
- 35 Dinas Pertanian, TP & Holtikultura
- 36 Kecamatan Abang
- 37 Kecamatan Kubu

Gambar 1.26 Skema infrastruktur Jaringan Kabupaten Karangasem

2.2.1 Daftar Kebutuhan Infrastruktur di Pusat Data and Operasional Jaringan Kabupaten

Pusat Data akan sangat berperan sebagai lokasi penyimpanan, dan pengelolaan data secara terpusat dan sebagai data warehouse kabupaten. Sedangkan pusat operasional jaringan, melakukan fungsi pengelolaan keamanan dan pengaturan koneksi jaringan serta akses internet seluruh Kabupaten. Mengingat fungsi dan efisiensi area, lokasi kedua pusat ini di satukan dan berada dalam satu ruangan tersendiri yang memenuhi spesifikasi ruangan khusus yang sifatnya restricted area yang terletak di kantor Dinas Kominfo atau berdekatan dengan Diskominfo, sebagai penanggung jawab dan pengelola Pusat data dan jaringan Kabupaten Karangasem.

Kondisi saat ini , Diskominfo memiliki komputer yang difungsikan sebagai gateway server dan DHCP Server. Selain itu terdapat tower dan WaveLAN yang digunakan sebagai media transmisi dan akses untuk internet untuk kantor Diskominfo dan kantor-kantor disekitarnya.

Tabel 1.20 Kebutuhan Data & NOC

No	Jenis Perangkat	Kuantitas	Keterangan
1	File Server (termasuk Software)	1 unit	Incl Software
2	Mail server (termasuk Software)	1 unit	Incl Software
3	DNS & proxy server	1 unit	Incl Software
4	Web server for portal	1 unit	Incl OS
5	Database server	4 unit	Incl OS
6	Back up server	2 unit	Incl OS
7	Internet Connection VPN	16 MBps	

No	Jenis Perangkat	Kuantitas	Keterangan
8	Router- VPN & security	2 unit	
9	Catalist & switch	4 unit	
10	Rack mount	4 unit	
11	DNOC Room equipment	1 unit	
12	Installation	1 paket	
13	UPS	2 unit	
14	Tower	1 unit	Tidak diperlukan jika dapat memanfaatkan tower yang sudah ada di Diskominfo
15	Antenna pada Tower	1 unit	

Secara umum jaringan komputer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jaringan publik, jaringan lokal, dan *Demilitarized Zone* (DMZ). **Bagian pertama** berupa jaringan publik, yaitu internet yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna yang ingin memanfaatkan sumber daya yang berada pada jaringan publik ini. **Bagian kedua**, yaitu jaringan lokal, adalah suatu lingkungan tertutup yang hanya dapat diakses dari lingkungan jaringan SKPD. Tidak seluruh orang yang terhubung ke jaringan komputer dapat mengakses langsung komputer-komputer yang berada pada lingkungan ini. Jaringan lokal yang digunakan berupa sebuah jaringan intranet private yang hanya dapat diakses oleh seluruh SKPD. **Bagian ketiga**, yaitu DMZ atau *Demilitarized Zone*, adalah suatu lingkungan jaringan yang dapat diakses dari jaringan publik dan dapat mengakses lingkungan jaringan lokal. Pada DMZ ini, seluruh server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh *dua firewall*.

Firewall pertama merupakan *external firewall* yang menggunakan perangkat firewall (diletakkan pada Gateway Server Center Kabupaten). Pada gateway kabupaten diberikan fasilitas VPN (*Virtual Private Network*). *Firewall kedua* diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan VPN server yang

dipasang pada router. Sedangkan dari sisi komputer SKPD diberi software VPN klien atau juga hardware berupa router VPN klien untuk mengantisipasi pemberdayaan koneksi untuk sekitar klien SKPD.

VPN sendiri merupakan teknologi WAN yang dilewatkan di jaringan publik internet, namun datanya dibungkus, di enkripsi, dan dilewatkan dengan *tunneling* di internet. Teknologi ini memungkinkan dapat mereduksi biaya dan aman karena menggunakan metode enkripsi sehingga dapat menjamin kerahasiaan pengiriman data, baik voice atau non voice antara Pusat Pengoperasian Jaringan dengan SKPD maupun antar SKPD. Selain media koneksi VPN yang akan sangat membantu koneksi jaringan antar kantor pusat dengan SKPD yang jaraknya jauh, digunakan juga media koneksi kabel *fiber optic* dan WLAN. Kabel *fiber optic* akan menghubungkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat data dan pengoperasian jaringan dengan Kantor Bupati yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) ruangan pejabat daerah, 3 (tiga) ruang Asisten Sekda, dan 10 Bagian Setda ditambah dengan Dinas Pendapatan.

2.2.2 Kebutuhan Infrastruktur Koneksi Jaringan antar SKPD

Daftar Infrastruktur dibawah untuk memenuhi kebutuhan koneksi jaringan antara pusat jaringan dengan SKPD dan koneksi jaringan antar SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem. Jenis Koneksi jaringan yang akan digunakan sangat tergantung dari kondisi geografis dan topografis lokasi SKPD berada.

Berdasarkan kondisi lokasi dari seluruh SKPD yang telah diidentifikasi, maka metode koneksi jaringan yang akan digunakan terdiri dari:

1. Koneksi wireless
2. Koneksi VPN client

3. Koneksi Fiber Optic

Koneksi Wireless, dialokasikan untuk koneksi jaringan Wireless LAN SKPD yang berada di luar kompleks perkantoran Bupati, Setda dan Diskominfo dan masih memungkinkan untuk terjangkau dengan menggunakan wireless.

Beberapa SKPD yang dimaksud : (1) Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah, (2) Badan Lingkungan Hidup; (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan; (4) Dinas Peternakan, Kelautan dan perikanan; (5) Dinas Sosial; (6) Rumah sakit Umum Daerah; (7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, (8) Badan Pemberdayaan perempuan dan KB, (9) Sekretariat DPRD, (10) Kantor Kesbanglinmas, (11) Kantor Satpol PP

Koneksi VPN intranet klien dialokasikan untuk koneksi jaringan intranet dan dengan SKPD selain yang terkoneksi dengan WLAN. Penggunaan VPN akan sangat membantu koneksi jaringan antar kantor pusat dengan SKPD

Daftar kebutuhan perangkat untuk membangun jaringan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.21 Kebutuhan Koneksi Jaringan Wireless

No	Jenis Perangkat	Kuantitas	Keterangan
1	Router Klien VPN	14 unit	Remote Router
2	Tower Klien (SKPD)	17 unit	
3	Antenna Grid pada Tower	17 unit	
4	Accesspoint	17 unit	

Namun untuk koneksi ke kecamatan khususnya untuk kecamatan-kecamatan yang jarak lokasinya sangat jauh dan kondisi geografis dan topografinya kurang menguntungnya seperti Kecamatan Kubu, Kecamatan

Rendang, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan manggis, perlu disiapkan alternatif lain selain menggunakan koneksi VPN untuk mengantisipasi belum adanya layanan VPN dari penyedia jasa jaringan, minimal untuk di tahun-tahun awal. Salah satu alternative yang ditawarkan adalah kecamatan tersebut tidak terhubung dengan jaringan intranet kabupaten, tetapi langsung berlangganan mengakses internet yang disediakan oleh jasa penyedia internet yang cakupan layanannya sudah masuk ke kecamatan-kecamatan tersebut. Untuk alternatif tersebut, praktis tidak dibutuhkan perangkat jaringan tambahan mengingat biasanya perangkat koneksi atau modem akan dipinjamkan oleh jasa penyedia internet selama masa berlangganan.

Sedangkan koneksi Fiber Optic akan digunakan untuk menghubungkan Pusat data dan pengelolaan Jaringan dengan kantor Bupati. Daftar kebutuhan perangkat adalah sebagai berikut:

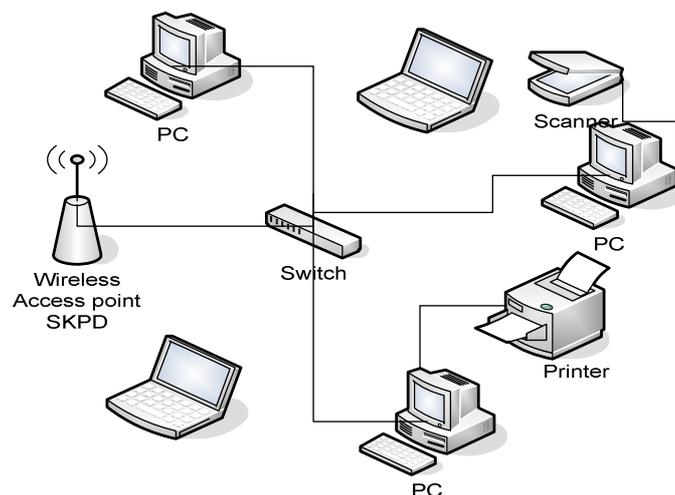
Tabel 1.22 Kebutuhan Koneksi Jaringan FO

No	Jenis Perangkat	Kuantitas	Keterangan
1	Fiber Optic Cable	500 m	
2	Converter	28 unit	
3	Segmen STP	2 sgm	
4	Switch 24 Port w/ 2 port FO	14 unit	
5	UPS -FO	1 unit	
6	UTP Cabel	7 rol	
7	UTP Connector	7 set	
8	Installation FO	500 m	
9	Installation terminasi	14 core	

2.2.3 Kebutuhan Infrastruktur Komputer Koneksi Jaringan lokal SKPD

Daftar kebutuhan infrastruktur jaringan lokal (LAN) di masing-masing SKPD disusun dengan melihat kondisi aktual yang ada. Saat ini baru ada 9 SKPD yang memiliki LAN dalam lingkungan kerjanya, namun kondisi dan konfigurasi belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan koneksi dari seluruh aparatur di SKPD tersebut .

Selain itu, topologi jaringan LAN yang akan dibangun pada masing-masing SKPD juga akan menentukan jumlah kebutuhan dari perangkat yang akan digunakan .Dari Tiga topologi yang selama ini dikenal yaitu Ring, Bus dan Star, jaringan LAN di setiap SKPD akan menggunakan topologi Star. Walaupun konsumsi kabel lebih banyak namun topologi ini memungkinkan untuk mendeteksi terjadinya gangguan pada jaringan yang terhubung pada suatu komputer dan tidak akan mengganggu jaringan pada komputer lain jika terjadi kerusakan pada suatu komputer yang berada pada satu jaringan yang sama. Berikut skema jaringan LAN pada suatu SKPD:



Gambar 1.27 Topologi STAR pada LAN

Selain perangkat jaringan LAN, penambahan komputer kerja dan *application server* yang mendukung standar arsitektur aplikasi yang akan diterapkan juga akan dilakukan dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan secara kontinyu.

Agar dapat membangun jaringan dengan topologi tersebut, maka daftar kebutuhan per SKPD adalah sbb:

Tabel 1.23 Kebutuhan Infrastruktur per SKPD

No	SKPD	Komputer			Scanner	Paket LAN	Indoor Wireless AP
		Serv	PC	NB			
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	15	1	1	0	1
2	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu	0	4	2	1	0	1
3	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	10	0	1	1	1
4	Bagian Ekonomi	1	7	1	1	1	0
5	Bagian Pengendalian Pembangunan	1	6	0	1	1	0
6	Bagian Umum	1	5	2	1	1	0
7	Bagian Organisasi	1	6	2	1	1	0
8	Dinas Kesehatan	1	7	0	1	1	1
9	Badan Lingkungan Hidup	1	15	1	1	1	0
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	1	9	2	1	0	0
11	Bagian Humas dan Protokol	1	4	3	1	1	0
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	7	1	1	1	0
13	Bagian Keuangan	1	1	3	1	0	0
14	Bagian Perlengkapan	1	20	5	1	5	2
15	Bagian Hukum dan HAM	1	7	1	1	1	0
16	Bagian Tata Pemerintahan	1	8	1	1	1	0
17	Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran	1	20	4	1	1	0
18	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1	8	0	1	0	0
19	Badan Kepegawaian Daerah	1	15	3	1	0	0
20	Sekretariat DPRD	1	8	2	1	1	1
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas	1	4	2	1	1	0
22	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	1	5	2	1	1	0

No	SKPD	Komputer			Scanner	Paket LAN	Indoor Wireless AP
		Serv	PC	NB			
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	9	3	1	0	1
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	15	2	1	1	1
25	Dinas Pekerjaan Umum	1	8	0	1	0	0
26	Dinas Sosial	0	20	4	1	1	1
27	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan	1	17	5	1	1	1
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	10	5	1	1	1
29	Kantor Ketahanan Pangan	1	7	1	1	1	1
30	Rumah Sakit Umum Daerah	1	10	4	1	1	1
31	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0	2	2	1	0	0
32	Dinas Koperasi dan UKM	1	12	3	1	1	0
33	Dinas PTP dan Hortikultura	1	9	0	1	1	0
34	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	7	2	1	1	0
35	Kantor Sat Pol PP	1	7	2	1	1	0
36	Kecamatan Karangasem	1	12	2	1	1	1
37	Kecamatan Bebandem	1	12	2	1	1	1
38	Kecamatan Selat	1	12	2	1	1	1
39	Kecamatan Rendang	1	11	2	1	1	1
40	Kecamatan Sidemen	1	11	2	1	1	1
41	Kecamatan Kubu	1	10	1	1	1	1
42	Kecamatan Manggis	1	16	2	1	1	1
43	Kecamatan Abang	1	8	2	1	1	1
44	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1	11	2	1	1	0
45	Dinas Pendapatan	1	14	1	1	1	0
46	Inspektorat Daerah	1	25	2	1	1	0
		42	466	91	46	41	22

Rekapitulasi kebutuhan LAN seluruh SKPD adalah sebagai berikut

No	Jenis Perangkat	Kuantitas	Keterangan
1	Application Server	42unit	Termasuk Software
2	PC Desktop	466 unit	Termasuk OS & Software
3	Notebook	89 unit	Termasuk OS & Software

No	Jenis Perangkat	Kuantitas	Keterangan
4	Scanner + Digital camera	46 unit	
5	Paket LAN	41 paket	Termasuk Switch, Kabel UTP, Connector
6	Indoor WLAN	22 unit	
7	Perangkat Video COnference	1 set	Dialokasikan di kantor bupati dan aula pertemuan Konfigurasi dtangani oleh diskominfo

2.3 Standardisasi Pemenuhan Kebutuhan Aplikasi

2.3.1 Parameter Aplikasi yang memenuhi standar

Standar parameter aplikasi yang akan dibangun/dikembangkan haruslah:

- a) Reliable; dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem informasi dan bug free.
- b) Interoperable; dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem sesuai dengan lingkup yang difasilitasi.
- c) Scalable; dapat ditingkatkan kemampuannya terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan pengelolaan data yang lebih besar.
- d) User friendly; mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.
- e) Integrated; mudah untuk diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah ataupun dengan pemerintah daerah yang lain.

2.3.2 Parameter Standar Mutu, jangkauan pelayanan dan pengembangan aplikasi layanan publik

Standar mutu, jangkauan pelayanan dan pengembangan aplikasi layanan publik/masyarakat:

- a) Ketersediaan dalam waktu; terukur dengan angka presentase layanan elektronik yang dapat digunakan oleh publik. Sebagai contoh layanan tertentu diharapkan tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun dengan toleransi kerusakan 24 jam dalam setahun.
- b) Jangkauan; yaitu ketersediaan di area geografis tertentu. Sebagai contoh diperlukan alternative jenis layanan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur di daerah tertentu dimana satu jenis layanan lebih tersedia dibanding layanan yang lain.
- c) Waktu proses; sebagai contoh pengurusan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk selesai dalam waktu 2 jam.
- d) Waktu tanggap; waktu yang diperlukan suatu instansi untuk memberikan tanggapan atas satu permintaan layanan dari masyarakat. Sebagai contoh dalam 2 hari kerja email yang masuk harus dijawab dengan email konfirmasi tentang permintaan yang telah diterima serta memberikan nomor referensi tindak lanjut, sehingga proses penanganannya (status penanganan) dapat dipantau lebih lanjut.
- e) Kelengkapan, akurasi dan keterkinian dari informasi yang disediakan
- f) Kemudahan dan kenyamanan; ukuran yang dapat dilihat dari berapa besar upaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan pelatihan.

- g) Kemudahan prosedur dan tata cara; persyaratan dan prosedur aplikasi perijinan yang sederhana dan wajar sesuai dengan kebutuhan administrasi.
- h) Pilihan media; seperti telepon, fax, email, loket offline, loket online.
- i) Keseragaman antar instansi; pengacuan kepada standar layanan publik yang lain.
- j) Biaya

2.3.3 Standard Tahapan Prosedur Pengembangan aplikasi sistem

Standar prosedur dalam pengembangan suatu aplikasi sistem, secara garis besar harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

b) Analisis

Dalam tahap analisis ini, kegiatan yang dilakukan mencakup: Pendeteksian masalah, Penyelidikan awal, analisis kebutuhan (penetapan sistem ideal), mengidentifikasi berbagai alternatif sistem, memilih sistem yang sesuai

c) Desain

Dalam tahap desain ini, kegiatan yang dilakukan mencakup: desain output (laporan), desain input dan desain file

d) Implementasi

Dalam tahap implementasi ini, kegiatan yang dilakukan mencakup: pemrograman dan testing, pelatihan pengguna sistem, rencana perubahan (jadwal dan metode) perubahan sistem ,

2.3.4 Standar Dokumentasi Pengembangan aplikasi Sistem

Standar dokumentasi yang harus dilakukan oleh pengembang aplikasi e-Government (baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri atau pun pihak lain) untuk menjaga kesinambungan aplikasi tersebut adalah:

- a) Spesifikasi fungsional; fungsi-fungsi yang dijalankan, masukan, keluaran, laporan dan lain-lain.
- b) Spesifikasi teknis; desain, proses, struktur data, interkoneksi dan lain-lain.
- c) Prosedur Standar Operasi (SOP) dan petunjuk pemakaian (user manual).
- d) Kode program (source code) menjadi hak milik instansi pemakai dan dapat digunakan lebih lanjut untuk kepentingan kesinambungan aplikasi tersebut ataupun pengembangannya.
- e) Dokumentasi lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

2.3.5 Standar Dukungan teknis dalam pengembangan aplikasi

Standar bentuk dukungan teknis yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Layanan purna jual; harus dijabarkan secara spesifik dengan ukuran-ukuran yang jelas sesuai dengan lingkup tanggung jawab.
- b) Alih teknologi; menyertakan dokumentasi (dalam bahasa Indonesia) dan pelatihan yang terjadwal.
- c) Pendampingan dalam penyesuaian kompetensi yang diperlukan dalam alih teknologi (minimal 3 bulan).
- d) Diperlukan prosedur kerja yang mengatur masalah antar instansi dengan pihak pengembang aplikasi termasuk untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan aplikasi.

2.3.6 Standar Pemilihan Teknologi dalam pengembangan aplikasi

Standar teknologi yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Jenis perangkat keras (hardware); seperti jenis processor dan lainnya.
- b) Sistem operasi yang digunakan
- c) Basis data yang digunakan
- d) Jenis user interface (client-server, web-based, dan lainnya)
- e) Jenis teknologi pengamanan data (enkripsi dan lainnya)
- f) Jenis development tools (bahasa pemograman dan lainnya)
- g) Jenis teknologi akses (internet, telepon dan lainnya)
- h) Jenis bentuk informasi (tabulasi, text, grafik, gambar, suara, video, data spatial dan lainnya).

2.3.7 Standar Penggunaan Database

Database yang digunakan untuk membangun aplikasi haruslah memenuhi kriteria-kriteria seperti berikut:

- Kompatibel dengan beragam system operasi seperti Windows, Linux, Mac, Unix.

Dalam hal ini karena lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem menggunakan alternative Windows dan Linux maka diutamakan kompatibel untuk kedua system operasi tersebut.

- Kemampuan menyimpan data, jumlah baris yang tak terbatas, ukuran table space yang besar, mampu menyimpan minimal 1000 kolom per baris, character size minimal 4000B, number size 126 byte/unlimited, date value -4712 s.d 9999, ukuran nama kolom lebih dari 30.
- Memiliki kemampuan pendukung seperti temporary table.

- Memiliki metode keamanan seperti enkripsi, aturan password dan Security Certification.
- Memiliki dukungan vendor yang cukup handal bagi DBMS yang license

2.3.8 Standar Penggunaan Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman digunakan untuk mengatur cara kerja mesin (dalam hal ini komputer). Dengan beragamnya bahasa pemrograman yang ada dan munculnya bahasa pemrograman yang baru setiap tahun, maka perlu dibuat poin-poin yang dapat membantu pemilihan bahasa pemrograman yang akan dipakai.

- Penggunaannya dimaksudkan untuk Web, server-side atau aplikasi.
- Memiliki kemampuan untuk mengirim pesan kesalahan (*error message*) saat terjadi kegagalan saat input atau output.
- Sedapat mungkin memanfaatkan bahasa pemrograman berbasis open source

2.3.9 Standar Penggunaan Sistem Operasi

Untuk pemilihan system operasi yang akan digunakan tentunya tidak sesulit pemilihan database dan bahasa pemrograman, karena kedua hal tersebut justru harus kompatibel dengan system operasi yang digunakan. Meski demikian terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam menentukan pemakaian sistem operasi.

- Mendukung system file ext2, ext3, ext4, ReiserFS, FAT, ISO 9660, UDF, NTFS.
- Memiliki manajemen pemutakhiran yang terjadwal.
- Memiliki firewall yang terintegrasi.

- Memiliki system file yang terenkripsi.
- Sedapat mungkin berbasis open sources

2.4 Standardisasi Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur

2.4.1 Bandwith

Hal yang perlu dipertimbangkan untuk koneksi internet adalah kecepatan koneksi. Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem, diperlukan kecepatan akses yang dapat memenuhi kebutuhan kinerja dan mendukung efektifitas kerja. Kelancaran atau kecepatan koneksi dipengaruhi oleh besat jalur koneksi atau bandwidth.

Seterusnya, kebutuhan bandwith sangat bergantung banyak terminal yang terkoneksi dalam jaringan internal. Koneksi internet yang efisien berkisar antara 6 hingga 16 Kbps per PC. Tetapi jika penggunaan bandwith berganti dan saling mengisi, maka tidak diperlukan perhitungan kebutuhan bandwith setiap terminal.

Tabel 1.24 Perbandingan Jumlah Terminal dan Kebutuhan Bandwidht

Jumlah PC	Kebutuhan bandwidth
1-12	64 - 128 Kbps
12-24	128 - 256 Kbps
24-40	256 - 512 Kbps
40-60	512 - 1024 Kbps/1 Mbps
60-80	1 Mbps - 1,5 Mbps
80-100	1,5 mbps - ~

Source: http://wiki.irwinday.web.id/index.php?title=Koneksi_internet

2.4.2 Koneksitas

Ada beberapa cara untuk melakukan koneksi internet berikut kelebihan dan kekurangan dari tipe koneksi internet Bridge dan PPP (*Point-to-Point Protocol* adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network).

Beberapa alasan memilih bridge:

- Koneksi internet digunakan pada 1 PC saja, atau koneksi internet di-share dengan beberapa PC menggunakan server/access point,
- Koneksi internet menggunakan pilihan paket quota, sehingga tidak selalu terhubung ke internet selama 24 jam,
- Menginginkan kerja modem yang lebih ringan, karena jika koneksi di-share maka modem tidak dijadikan sebagai server untuk membagi bandwidth, sehingga modem lebih awet. Namun konsekuensinya, untuk membagi bandwidth diperlukan tambahan server/access point.

Beberapa alasan memilih PPP:

- Koneksi internet digunakan sendiri atau dibagi ke beberapa PC menggunakan switch/HUB,
- Koneksi internet menggunakan pilihan paket unlimited, sehingga tidak masalah jika selalu terhubung ke internet selama 24 jam,
- Menginginkan agar tidak menggunakan server/access point untuk membagi bandwidth, karena modem dapat bertindak sebagai server untuk membagi bandwidth serta menggunakan switch/HUB. Namun, konsekuensinya adalah beban kerja

modem bertambah, sehingga umur modem menjadi lebih singkat.

Setiap pengguna Internet mempunyai preferensi, tingkat kebutuhan dan kemampuan pembiayaan yang berbeda. Pilihan teknologi, kapasitas dan jenis layanan akses ditentukan oleh faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dilihat untuk penggunaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebaiknya menggunakan tipe koneksi PPP. Untuk meringankan beban modem dapat diatasi dengan menggunakan manajemen penggunaan bandwidth.

Tabel 1.25 Perbandingan Kapasitas Koneksi

Koneksi	Kapasitas
Dial Up Analog	33,6 kbps 1 - 4 kbps/pc 1 - 3 pc
Dial Up Digital	56 kbps 1 - 8 kbps/pc 1 - 5 pc
ISDN Telkom	64 - 144 kbps 1 - 8 kbps/pc 8 - 16 pc
Leased Channel Frame Relay	64 kbps - 2 mbps 4 kbps/pc 16 - 512 pc
xDSL	64 kbps - 2 mbps 4 kbps/pc 16 - 512 pc

Koneksi	Kapasitas
WLAN	64 kbps - 2 mbps 4 kbps/pc 16 - 512 pc
VSAT	64 kbps - 45 mbps 4 kbps/pc ratusan pc

Source: <http://www.seminyak.com/net/modules.php?name=Compare>

2.4.3 Pemilihan Provider

Ada beberapa Kriteria yang dapat digunakan dalam pemilihan Internet Service Provider (ISP) diantaranya adalah:

a) Kecepatan transfer data.

Perhatikan rasio jumlah saluran yang dimiliki ISP dengan jumlah pelanggannya (normalnya maksimal 1 saluran untuk 10 pelanggan)

b) Bandwidth yang dimiliki ISP.

Semakin besar bandwidth yang dimiliki maka semakin banyak data dapat ditransmisikan serta semakin banyak orang dapat memakai saluran yang sama tanpa berkurang kecepatan aksesnya. Jumlah pelanggan yang melebihi rasio bandwidth dan terjadinya beban puncak mengakibatkan browsing menjadi lambat

c) Mempunyai server proxy.

Proxy adalah server khusus yang bertugas sebagai cache bagi pelanggan ISP. Server proxy adalah sebuah indeks alamat2 (host) favorit berikut isinya yang sering dikunjungi oleh masing2 pelanggan. Proxy berguna sebagai akselerator akses

disaat jaringan (baik ISP maupun host tujuan) berada pada beban puncak (peak). Sekaligus menghemat bandwidth yang dimiliki ISP karena dengan bantuan proxy server maka pengguna tidak perlu melakukan koneksi keluar untuk melihat isi host favoritnya

d) Backbone

Backbone adalah saluran koneksi utama yang menghubungkan jaringan ISP dan Internet. Kebanyakan ISP di Indonesia menyewa backbone dari pihak ketiga karena membangun backbone sendiri membutuhkan teknologi yang berat dan dana yang sangat besar. Semula ISP memiliki (menyewa) backbone sendiri, namun kini 1 backbone bisa dipakai oleh banyak ISP karena krisis ekonomi (fluktuasi nilai tukar mata uang – tarif backbone dalam US\$), akibatnya kinerja masing2 rendah karena harus berbagi pakai dengan pengguna backbone (ISP) lainnya.

e) Keamanan Data.

Hampir setiap host di Internet menerapkan metode Firewall yaitu suatu cara verifikasi identitas berdasarkan pengenalan kode sistem yang masuk. Setiap pengguna memiliki kode sistem yang khas baik itu alamat (IP address) node (titik dimana komputer terhubung), nama user, password, sistem yang dipakai dan sebagainya masing2 secara unik. Firewall bekerja secara software dan hardware sekaligus sehingga memperkecil kemungkinan sistem keamanan ini ditembus.

f) Layanan yang diberikan.

Kita juga perlu tahu layanan apa saja yang diberikan oleh sebuah ISP, apakah berupa account e-mail, apakah ISP nya menyediakan spam filter dan lainnya.

g) Biaya.

Biaya merupakan sebuah kriteria yang penting yang pastinya kalian perhatikan. Perlu diketahui sistem pembayaran yang dilakukan apakah berdasarkan perbulan atau berdasarkan lama pemakaian, atau berdasarkan quota banyaknya data yang digunakan (kb). Beberapa ISP biasanya menggunakan system paket, bahkan ada yang berupa pra bayar.

h) Hardware (perangkat kerasnya).

Kita perlu tahu perangkat keras yang digunakan. Apakah itu modem internal/external, modem ADSL atau modem untuk internet broadband. Hal tersebut perlu diketahui, karena akan mempengaruhi terhadap layanan yang diperoleh dari ISP tersebut.

i) Teknologi.

Sebab teknologi menentukan kualitas layanan. Apa berupa teknologi dial up 56 kbps melalui saluran telepon, layanan koneksi melalui jaringan GPRS, atau jaringan 3G, bahkan beberapa ISP menggunakan teknologi HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) yang memiliki kecepatan sampai 7.2 Mbps.

2.5 Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan dan Implementasi e-Government

Berdasarkan hasil identifikasi perangkat infrastruktur dan aplikasi yang diperlukan, dilakukan perhitungan estimasi kebutuhan anggaran untuk memenuhi kondisi ideal yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Besarnya estimasi kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan simulasi dari asumsi harga satuan perangkat dan aplikasi yang berlaku saat ini. Dalam melakukan estimasi, ditetapkan tiga skenario yang merepresentasikan tingkatan spesifikasi dari perangkat yang berdampak kepada biaya pengadaan dan pengembangan yang diperlukan dengan jumlah perangkat yang sama. Skenario High mewakili infrastruktur jaringan yang memiliki spesifikasi teknis dengan harga yang cukup premium, pengembangan aplikasi yang melibatkan komponen sistem operasi, database dan bahasa pemrograman licensed serta biaya pengembangan SDM yang premium. Skenario Skenario Low menggambarkan infrastruktur jaringan dengan lebih memperhatikan keberfungsian perangkat, seluruh komponen dalam pengembangan aplikasi berbasis open source, serta biaya kegiatan pengembangan SDM yang minimal. Sedangkan skenario moderate mewakili spesifikasi antara high dan Low

Berikut rekapitulasi hasil estimasi kebutuhan anggaran pengembangan dan implemementasi e-Government selama 5 tahun ke depan

Kebutuhan selama 5 tahun	Moderate	High	Low
Software	14,648,000,000	19,875,000,000	8,781,000,000
Hardware	9,724,560,000	11,210,360,000	8,490,405,000
biaya SDM	3,699,000,000	4,967,100,000	2,757,500,000
Total Hardware+Software	24,372,560,000	31,085,360,000	17,271,405,000
Total Hardware+Software+SDM 5 tahun	28,071,560,000	36,052,460,000	20,028,905,000
Rata-rata kebutuhan pertahun	5,614,312,000	7,210,492,000	4,005,781,000
Asumsi Rata-rata potensi APBD per tahun	600,000,000,000	600,000,000,000	600,000,000,000
% biaya eGov terhadap APBD	0.936%	1.202%	0.668%

Berdasarkan simulasi perhitungan estimasi di atas, maka dapat disimpulkan kebutuhan anggaran selama 5 tahun berkisar antara Rp 20 Milyar – 38 Milyar dengan rata-rata kebutuhan anggaran per tahun mencapai Rp 4 - 7 Milyar. Atau jika diasumsikan APBD Kabupaten Karang asem selama 5 tahun rata-rata mencapai Rp 600.000.000,- maka alokasi anggaran untuk pengembangan e-Government mencapai 0,6% - 1,2 % terhadap APBD.

BAB III

PETA TAHAPAN PENGEMBANGAN APLIKASI & INFRASTRUKTUR

3.1 Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan analisis kebutuhan aplikasi baru dan aplikasi lama yang akan dikembangkan, maka rencana pemenuhan kebutuhan atas aplikasi-aplikasi dari masing-masing SKPD dituangkan dalam suatu jadwal tahapan pengembangan dan pembangunan aplikasi

Penjadwalan dimaksudkan agar kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi dari setiap SKPD dapat dilakukan secara bertahap dan terpadu sehingga seluruh aplikasi sistem yang diperlukan dapat dibangun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi, yaitu :

1. Langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah membangkitkan kesadaran dan kebutuhan dari setiap SKPD bahwa dalam menjalankan tupoksi diperlukan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja serta kualitas output layanannya. Kesamaan pandangan bahwa aplikasi menjadi salah satu bagian dari kebutuhan kerja di setiap SKPD menjadi modal yang sangat penting dalam menghindari ketimpangan sistem yang sangat mungkin terjadi. Bisa dibayangkan jika ada satu SKPD yang memiliki aplikasi membutuhkan data dan informasi dari SKPD lain yang semua datanya masih di atas

kertas, maka yang terjadi adalah ketimpangan dalam sistem yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap kinerja sistem

2. Secara berkesinambungan dan konsisten, selalu melakukan pembaharuan web resmi yang mengarah kepada bentuk portal kabupaten . Seiring dengan hal tersebut, pengembangan portal kabupaten akan dilakukan setiap tahun sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan oleh masing-masing SKPD
3. Beberapa aplikasi dari masing-masing kelompok aplikasi layanan G2C, G2G dan G2B akan dipilih dan dikembangkan secara paralel pada tahun-tahun awal
4. Pengembangan aplikasi yang termasuk kelompok aplikasi layanan pemerintahan (G2G) diutamakan pada aplikasi yang mendukung terjadinya perubahan cara dan budaya kerja para aparatur dalam menjalankan tugas melayani masyarakat
5. Beberapa aplikasi yang berorientasi kepada layanan publik (penduduk dan pebisnis) juga mendapatkan prioritas untuk dikembangkan di tahun-tahun awal, dengan harapan agar masyarakat dapat segera memanfaatkan layanan dalam mendukung aktivitasnya. Khusus untuk aplikasi yang menjadi domain pengembangan aplikasi G2C dan aplikasi G2B, akan dimonitor setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
6. Proses pengembangan dan penerapan sebagian besar aplikasi akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Hal ini untuk memberikan jeda waktu yang memadai dalam mengevaluasi hasil pengembangan aplikasi yang telah dilakukan sekaligus melakukan sinkronisasi dengan aplikasi lain yang terkait. Berdasarkan evaluasi akan dapat diketahui apakah hasil evaluasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung peningkatan kinerja layanan di SKPD.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, berikut disajikan jadwal pengembangan dari seluruh aplikasi e-government yang dibutuhkan di Kabupaten Karangasem

No	Aplikasi	2010	2011	2012	2013	2014
I. Kelompok Aplikasi Layanan yang beorientasi G2G						
1	Portal Kabupaten					
2	SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik					
3	e-mail					
4	e-Agenda					
5	SIM Pelaporan Pemerintahan					
6	SIM Pendapatan Daerah					
7	e-Planning/SIMRENBANGDA					
8	SIM Akuntansi Daerah					
9	SIM Kepegawaian Daerah					
10	e-Learning Diklat Pegawai					
11	SIM Diklat Daerah					
12	SIM Data Pembangunan					
13	SI Pilkada					
14	SIM Keuangan Daerah					
15	SIM Arsip Daerah					
16	SIM Asset dan Barang Daerah					
17	SIM Pemeliharaan & Perbaikan					
18	SIM Perjalanan Dinas					
19	SIM Evaluasi dan Pengendalian Proyek					
20	SIM Humas					
21	SIM BUMD					
22	SIM Pengawasan					
23	SIM Tata Laksana Kelembagaan					
24	SIM Protokoler					
25	SI Pendukung Keputusan					
II. Kelompok Aplikasi Layanan yang beorientasi G2B						
26	SIM Perijinan Terpadu					
27	SIM Bisnis dan Investasi Daerah					
28	SIM Pariwisata & Kebudayaan:					

No	Aplikasi	2010	2011	2012	2013	2014
29	SIM Pertanian					
30	SIM Peternakan					
31	SIM Perekonomian Daerah					
32	SI Pengelolaan Lingkungan					
33	SIM Kehutanan dan Perkebunan					
34	SIM kelautan dan Perikanan					
35	SIM Pekerjaan Umum					
36	e-procurement/SIM Pengadaan					
37	SIM perindag					
38	SIM Koperasi					
39	SIM UKM					
40	SIG –Potensi Ekonomi Daerah					
41	SIM Tata Ruang					
III. Kelompok Aplikasi Layanan yang beorientasi G2C						
42	SI Administrasi Kependudukan & Capil					
43	e-health/SI Jakesda					
44	SIM Kesra					
45	e-Job/e-recruitment					
46	SIM RSUD					
47	SIM Puskesmas					
48	SIM Sekolah					
49	e-transportation/SIM Transportasi					
50	SIM Pembinaan Pemuda & Olahraga					
51	e-education/ SIMDIKDA					
52	SIM Katalog HUKum dan Perundangan					
53	e-Parliament					
54	e-Learning Dikdasmen					
55	SIM Organisasi Non-Pemerintah					
56	SI Jaringan Pengaman Sosial					
57	SIM perpustakaan					
58	SIM Penanganan Kebakaran					
59	SIM Bantuan dan Bencana					
60	SIM Layanan Hukum & HAM					

Gambar 3.1 Peta Pengembangan Aplikasi

Agar dapat menjamin interoperabilitas antar aplikasi yang dibangun, satuan kerja yang memiliki kewenangan melakukan monitoring terhadap pengembangan aplikasi yang dilakukan setiap SKPD perlu menyusun tahapan kegiatan yang dapat memastikan bahwa komunikasi data antar aplikasi atau interoperabilitas aplikasi dapat berjalan

No	Aktivitas	2010	2011	2012	2013	2014
1	Integrasi Aplikasi yang berorientasi layanan G2G					
2	Integrasi Aplikasi yang berorientasi layanan G2C					
3	Integrasi Aplikasi yang berorientasi layanan G2B					
4	Interoperabilitas aplikasi intra-layanan					
5	Interoperabilitas aplikasi inter-layanan					

Gambar 3.2 Peta Pengembangan Interoperabilitas Aplikasi

3.2 Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Database

Seiring dengan pengembangan aplikasi, hal yang paling penting diperhatikan agar aplikasi yang dikembangkan dapat saling berinteraksi atau memenuhi prinsip interoperabilitas, terintegrasi dan konsisten dalam menghasilkan informasi, adalah adanya pengembangan struktur data lintas aplikasi SKPD yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Mengingat bahwa saat ini belum pernah dilakukan standarisasi struktur dan pendefinisian data secara terpadu dan terintegrasi, perlu disusun suatu jadwal tahapan pembenahan database seperti disajikan pada gambar dibawah ini:

No	Aktivitas	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pembuatan Standarisasi Definisi Data					
2	Implementasi Standarisasi Definisi Data					
3	Pembuatan Datawarehouse					
4	Pengembangan dan implementasi proses analisis data					

Gambar 3.2 Peta Pengembangan Database Aplikasi

Diperkirakan pembenahan struktur data sampai menjadi suatu data warehouse sampai pengembangan pendekatan proses analisis data akan dapat tercapai pada akhir tahun 2012. Dengan adanya penjadwalan secara bertahap, maka diharapkan aplikasi yang dibangun dengan data yang telah terstruktur akan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan aplikasi e-Government dan mendukung proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang lebih baik dan tepat

3.3 Tahapan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Berdasarkan rancangan kebutuhan infrastruktur maka disusun jadwal tahapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Perangkat pada Data dan Network Operational Center rencananya akan diadakan pada tahun pertama . Sedangkan untuk kebutuhan di tingkat SKPD seperti komputer , scanner, notebook yang jumlahnya cukup besar, akan diadakan secara bertahap mulai tahun 2010. Diperkirakan pembenahan system jaringan dan peningkatan kapasistas dapat diselesaikan pada akhir tahun 2011, sehingga pada tahun-tahun berikutnya akan lebih ditekankan kepada kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan yang ada.

Berikut penjadwalan peta pengembangan infrastruktur.

No	Jenis Perangkat	Jlh	2010	2011	2012	2013	2014
Perangkat Pusat Data dan Operasi Jaringan							
1	File Server (termasuk Software)	1 unit					
2	Mail server (termasuk Software)	1 unit					
3	DNS & proxy server (termasuk Software)	1 unit					
4	Web server for portal (termasuk OS)	1 unit					
5	Database server (termasuk OS)	4 unit					
6	Back up server (termasuk OS)	2 unit					
7	Internet Connection VPN	16 MBps					

No	Jenis Perangkat	Jlh	2010	2011	2012	2013	2014
8	Router- VPN & security	2 unit					
9	Catalist & switch	4 unit					
10	Rack mount	4 unit					
11	DNOC Room equipment	1 unit					
12	Installation	1 paket					
13	UPS	2 unit					
14	Tower	1 unit					
15	Antenna pada Tower	1 unit					
Koneksi Jaringan melalui VPN IP (Pusat Jaringan - SKPD)							
1	Router Klien VPN	14 unit					
Koneksi Jaringan melalui WLAN (antar SKPD)							
1	Tower Klien (SKPD)	17 unit					
2	Antenna Grid pada Tower	17 unit					
3	Accesspoint	17 unit					
Koneksi Jaringan Fiber Optic (Pusat Jaringan - Kantor Bupati)							
1	Fiber Optic	1000 m					
2	Converter	30 unit					
3	Segmen STP	2 sgmn					
4	Switch 24 Port w/ 2 port FO	2 unit					
5	UPS -FO	1 unit					
6	Installation FO	1000 m					
7	Installation terminasi	30 core					
Perangkat Komputer, Jaringan LAN dan Peripheral (masing-masing kantor SKPD)							
1	Application Server (termasuk software)	42unit					
2	UPS	466 unit					
3	PC Desktop (termasuk OS & Software)	89 unit					
4	Notebook (termasuk OS & Software)	37 unit					
5	Scanner+Printer	37 unit					
6	Digital Camera	18 unit					
7	LCD Projector	30 unit					
8	Web Cam	50 unit					
9	Cable	41 rol					

No	Jenis Perangkat	Jlh	2010	2011	2012	2013	2014
10	Switch 24 Port	41 unit					
11	Connector						
12	Pacth Panel						
13	Kiosk Information	12 unit					
14	LCD Matriks Display	4 unit					
15	Indoor Accesspoint WLAN	22 unit					
16	Perangkat Video COnference	1 set					

Gambar 3.3 Peta Pengembangan Perangkat Pendukung

Khusus mengenai pengadaan koneksi jaringan menggunakan koneksi VPN, akan sangat tergantung dari ketersediaan layanan jaringan VPN yang ditawarkan jasa penyedia jaringan internet yang menjangkau suatu wilayah tertentu

BAB IV

REKOMENDASI STRATEGI IMPLEMENTASI

Rekomendasi strategi implementasi terhadap master plan ini, disusun berdasarkan beberapa pertimbangan serta beberapa faktor yang selama ini ikut mempengaruhi keberhasilan penerapan e-government pada suatu wilayah , yaitu (1) Kepemimpinan, (2) Manajemen SDM, (3) Manajemen organisasi, (4) manajemen teknologi; (5) Manajemen Anggaran ; (6) Manajemen Perubahan

4.1 Kepemimpinan

Belajar dari pengalaman beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang dikatakan mampu memberikan hasil positif terhadap pengembangan dan penerapan e-Government dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, komponen pendukung e-Government yang paling mendasar ternyata bukan infrastruktur perangkat yang sudah tersedia atau aplikasi yang canggih, melainkan komitmen dan karakter kepemimpinan yang kuat dari para pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah untuk turut mendukung berjalannya pengembangan e-Government di daerahnya.

Karakter kepemimpinan yang kuat dan didukung oleh pengetahuan yang memadai mengenai konsep dasar e-Government serta ditambah dengan kewenangan yang dimilikinya akan sangat membantu Kepala daerah melakukan perencanaan dan pengawasan serta memberikan arahan secara tepat mengenai penerapan e-Government sesuai dengan yang dituangkan dalam dokumen master plan e-government

Selain itu hambatan-hambatan birokratis yang selama ini dituding sebagai salah satu faktor penghambat penerapan e-Government di pemerintah daerah, juga akan dapat diatasi oleh para pimpinan daerah tersebut.

Banyak dari pimpinan pemerintah daerah yang penerapannya e-government ternyata tidak memiliki latar belakang keilmuan di bidang TIK, namun mereka menyakini bahwa e-Government akan membawa dampak positif terhadap kualitas layanan pemerintahannya. Keyakinan positif ini perlu ditularkan dan disebarluaskan secara konsisten kepada seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya.

Pemimpin daerah juga dapat menyadari bahwa dalam konteks membangun suatu sistem pelayanan publik yang prima dan sistem kerja pemerintahan yang produktif, komponen TIK hanya merupakan komponen pendukung dan tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan dukungan dari sistem kerja yang sudah mapan dan cara kerja standard yang selama ini dijalankan.

Terkait dengan aspek kepemimpinan, beberapa langkah yang dapat dilakukan :

1. Secara konsisten selalu mengingatkan para pejabat dan staf untuk senantiasa memperbaiki kualitas layanan yang selama ini diberikan
2. Menjadi role model bagi pejabat dan staf di jajaran dalam memanfaatkan perangkat TIK dalam menunjang aktivitas kerjanya sehari-hari
3. Menerapkan beberapa fasilitas yang disediakan TIK terutama dalam pengelolaan dokumen secara elektronik

4. Memberikan apresiasi kepada jajarannya yang mampu menunjukkan kinerja pengembangan e-government yang sangat baik
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai pelaksanaan proyek e-Government yang harus mengacu kepada dokumen perencanaan strategis e-government yang telah ditetapkan
6. Komitmen dan keinginan yang kuat dari pimpinan harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi setiap pegawai di jajarannya. Dengan kewenangan yang dimiliki, perlu dilakukan penetapan melalui surat keputusan kepala daerah atau bahkan perda mengenai penggunaan dokumen master plan sebagai acuan bersama dalam mengembangkan e-Government di Kabupaten Karangasem
7. Melakukan pemberdayaan komunitas informatika yang ada di daerah sehingga dapat menjadi mitra sejajar pemerintah dalam pengembangan dan penerapan e-government

4.2 Manajemen SDM

Tidak dapat dipungkiri bahwa motor penggerak dari berbagai upaya pengembangan dan penerapan e-Government sangat tergantung dari jumlah dan kualifikasi SDM aparaturnya. Oleh karena itu dalam pengelolaan SDM e-Government beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Menyusun rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi aparatur yang akan menangani pengoperasian aplikasi e-government yang melayani masyarakat. Idealnya apabila aplikasi dan infrastruktur yang direncanakan pada master plan dapat direalisasikan maka setidaknya di setiap SKPD terdapat minimal 2 orang yang secara khusus mengelola aplikasi, data elektronik dan pemeliharaan jaringan

2. Melakukan pengadaan calon aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk pengembangan e-Government
3. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dan pemerataan kemampuan aparatur melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, dll
4. Perlu menghimpun para ahli atau pemerhati di bidang TIK dan melakukan pembinaan terhadap komunitas atau kelompok informasi yang terdapat di masyarakat khususnya yang concern terhadap pengembangan SDM yang memiliki kemampuan di bidang e-government

4.3 Manajemen Organisasi

Sejauh ini keberadaan diskominfo sebagai leading sector dalam pengembangan dan penerapan e-government belum dapat berfungsi secara maksimal . Hal ini karena fungsi koordinasi di bidang pengembangan TIK antar SKPD yang menjadi salah satu tupoksinya belum dapat berjalan dengan semestinya .

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dari aspek manajemen organisasi :

1. Membentuk Dewan TIK Kabupaten yang dikepalai Kepala daerah, dan beranggotakan Diskominfo, dinas lain, kelompok Informasi dan masyarakat pemerhati TIK. Keberadaan Dewan TIK diharapkan akan merumuskan arah pengembangan TIK, memberikan masukan dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontekstual terhadap pengembangan e-government.
2. Mereview dan menyusun kembali peraturan daerah yang terkait dengan tupoksi Diskominfo. Diskominfo memiliki wewenang mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Kepala Daerah perlu

memberikan penekanan mengenai peranan diskominfo terkait dengan pengemangan e-Government di depan seluruh pimpinan SKPD

3. Sudah harus mulai dipersiapkan di setiap SKPD agar memiliki sub bagian atau minimal kelompok tenaga fungsional yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PDE dan pemeliharaan komputer dan jaringan .
4. Faktor egosektoral antar SKPD yang sering menjadi kendala harus dapat dihilangkan. Salah satu pendekatan dari sisi organisasi adalah Kepala daerah selaku pimpinan tertinggi di daerah dapat memastikan bahwa proses perencanaan dan pengembangan suatu infrastruktur ataupun aplikasi dilakukan secara transparan dan saling melibatkan antar satu SKPD dengan SKPD lain yang terkait

4.4 Manajemen Teknologi

Beberapa rekomendasi terkait dengan manajemen teknologi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengembangan jaringan dan pengadaan perangkat keras pendukung, perlu ditetapkan target awal mengenai koneksi jaringan antar SKPD. Disarankan untuk tahun pertama, target dari sisi pembangunan jaringan antar SKPD adalah ditetapkannya bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai pusat data dan jaringan. Seiring dengan pembangunan tersebut, perlu juga ditargetkan terbangunnya jaringan intranet antar Pusat data dan jaringan dengan kantor bupati menggunakan kabel FO dan juga dengan kantor di sekitar Jalan Ngurah Rai dengan menggunakan koneksi Wireless LAN. Selama tahun pertama tersebut kebutuhan koneksi di luar jangkauan Wireless pusat data dapat dipenuhi dengan koneksi internet menggunakan jasa penyedia internet yang telah menjangkau SKPD tersebut. Setelah tercapai kondisi koneksi jaringan

di lingkungan ngurah rai maka dilakukan peninjauan ke penyedia jasa dalam rangka melakukan kelayakan biaya dan ketersediaan perangkat untuk kebutuhan penerapan teknologi VPN yang direncanakan.

2. Terkait dengan pengembangan aplikasi khusus e-Government, sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa yang terkait aplikasi, pada tahun awal perlu dilakukan kajian terhadap sejumlah aplikasi pemerintahan yang telah dikembangkan secara open source oleh beberapa departemen seperti Depkominfo atau BPPT. Sedapat mungkin ditahap awal untuk aplikasi-aplikasi yang baru akan diterapkan di Kabupaten Karangasem, menggunakan aplikasi berbasis open source tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk tim teknis yang mengkaji dan memberikan rekomendasi pemberdayaan aplikasi-aplikasi tersebut. Beberapa pilihan yang mungkin muncul terhadap pemberdayaan aplikasi-aplikasi tersebut, misalnya apakah aplikasi tersebut layak untuk digunakan secara penuh, atau apakah perlu dilakukan modifikasi terlebih dahulu terhadap aplikasi atau dilakukan ujicoba untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang sampai saat ini belum dikembangkan, dapat dilakukan pengadaan dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan pada master plan. Khusus untuk penggunaan sistem operasi dan aplikasi dasar yang secara umum digunakan oleh seluruh aparatur, untuk meminimasi munculnya biaya pengadaan dan langganan lisensi aplikasi disarankan untuk memperkuat penggunaan sistem operasi dan aplikasi perkantoran yang berbasis opensource secara bertahap. Kecuali terdapat beberapa aplikasi yang memang hanya dapat dijalankan di sistem operasi berlisensi

3. Untuk menjaga konsistensi pengembangan aplikasi berdasarkan orientasi layanan yang telah dibuat (G2G, G2C dan G2B), setiap pengadaan aplikasi yang dilakukan SKPD dan terkait dengan kelompok layanan tertentu, SKPD tersebut harus melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan domain pengembangan. Misalnya untuk pengembangan aplikasi sistem informasi kesehatan, karena aplikasi tersebut berada pada domain kependudukan, maka Dinkes harus melakukan koordinasi dengan Disduk Capil terkait entitas data yang terkait dengan penduduk dan Diskominfo sebagai SKPD yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengembangan sistem e-Government.

4.5 Manajemen Anggaran

Beberapa rekomendasi yang terkait dengan manajemen anggaran

1. Diupayakan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia dalam menghasilkan produk-produk produk-produk e-Government yang bermanfaat. Oleh karena itu kemampuan pejabat daerah selaku kuasa pengguna anggaran dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pekerjaan dan hasil pengembangan infrastruktur dan aplikasi e-Government harus senantiasa ditingkatkan
2. mengingat biaya investasi untuk perangkat komputer, jaringan dan aplikasi untuk menerapkan e-Government sangatlah besar, upayakan juga untuk mencari alternatif Sumber pembiayaan dari lembaga atau negara donor.
3. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi dilakukan secara bertahap sehingga pembiayaannya dapat dilakukan secara bertahap dan lebih terjangkau

4. Diupayakan untuk melakukan sharing budget apabila terdapat satu aplikasi yang saling beririsan antar SKPD

4.6 Manajemen Perubahan

Sesuai dengan model pengembangan e-government yang telah dibahas di bagian awal, pada dasarnya keberhasilan pengembangan dan penerapan e-Government akan sangat tergantung terhadap proses perubahan orientasi dan budaya kerja dari setiap aparatur pemerintah.

Oleh karena itu perubahan tersebut perlu dikelola sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah :

1. Untuk mengubah cara dan budaya kerja dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena perlu dilakukan inisiasi-inisiasi pendampingan secara berjenjang secara intens sehingga secara perlahan terjadi perubahan pola dan budaya kerja.
2. Seluruh aktivitas kerja sebaiknya diarahkan untuk menggunakan TIK sebagai enabler dalam kegiatannya sehari-hari. Untuk itu perlu dirancang program-program inisiasi yang akan mendorong secara alami pemanfaatan TIK dalam menunjang pekerjaan seluruh aparatur Pemkab. Beberapa program yang dapat dijadikan inisiasi adalah:
 - a. Mengaktifkan email sebagai sarana utama dalam berkomunikasi secara internal. Laporan-laporan yang berisi data dan informasi yang terkait dengan pekerjaan diarahkan agar disampaikan melalui email dan akan ditanggapi melalui email
 - b. Melakukan inisiasi mengenai pemanfaatan internet dan messenger untuk beberapa kegiatan koordinasi dan pertemuan virtual antara pimpinan SKPD dengan kepala daerah

- c. Melakukan inisiasi mengenai pemanfaatan scanner dalam mendukung program pengelolaan dokumen secara elektronik yang juga berdampak pada penghematan bahan habis pakai di lingkungan kerja
- d. Mengakstifkan mailing list sebagai sarana sharing informasi dan komunikasi dalam satu komunitas. Dapat dimulai dari komunitas di dalam SKPD sampai komunitas Aparatur dalam satu kabupaten

Beberapa pendekatan di atas diharapkan apabila dapat dimulai dan dilakukan secara konsisten, maka perubahan orientasi, pola dan budaya kerja yang mengarah ke pelayanan digital akan dapat berjalan dengan lancar. Lakukan secara bertahap, seiring dengan proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan aplikasi e-Government .

LAMPIRAN

- 1. Daftar SKPD Kab Karangasem yang diobservasi**
- 2. Daftar Deskripsi Modul Aplikasi Khusus**
- 3. Rincian Simulasi Estimasi Kebutuhan Biaya Pengembangan dan Implementasi e-Government**

1. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem

No.	Nama SKPD
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
4	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Lingkungan Hidup
6	Inspektorat Daerah
7	Sekretariat DPRD
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Dinas Kesehatan
10	Dinas Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran
14	Dinas Komunikasi dan Informasi
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Dinas Pekerjaan Umum
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Koperasi dan UKM
19	Dinas PTP dan Hortikultura
20	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan
21	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
22	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
23	Dinas Pendapatan
24	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
25	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
26	Kantor Ketahanan Pangan
27	Kantor Sat Pol PP
28	Rumah Sakit Umum Daerah
29	Bagian Tata Pemerintahan
30	Bagian Humas dan Protokol
31	Bagian Hukum dan HAM
32	Bagian Umum

No.	Nama SKPD
33	Bagian Perlengkapan
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Bagian Ekonomi
36	Bagian Pengendalian Pembangunan
37	Bagian Organisasi
38	Bagian Keuangan
39	Kecamatan Karangasem
40	Kecamatan Bebandem
41	Kecamatan Selat
42	Kecamatan Rendang
43	Kecamatan Sidemen
44	Kecamatan Manggis
45	Kecamatan Abang
46	Kecamatan Kubu

2. Daftar Deskripsi Modul per masing-masing Aplikasi

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil

Modul	KEPENDUDUKAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pendaftaran penduduk - Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk - Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP - Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak) - Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu - Pelaporan data kependudukan
Narasi	<p>Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.</p>
Organisasi Integrasi	<p>Dinas Kependudukan dan Capil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kabupaten lain - Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain - Sistem Kependudukan di tingkat Nasional
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Hukum: Kepmendagri 54/1999 - Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic data synchronization, distributed processing

2.5.1.1 SIM Pendapatan Daerah

Modul	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos / sumber pendapatan kabupaten - Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya pajak, retribusi, penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain. - Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi pendapatan tahun berjalan. - Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan Pemkab tahun depan, dengan asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada sub rincian obyek pendapatan lokal. <ul style="list-style-type: none"> o Perubahan sub rincian obyek pendapatan termasuk berubahnya volume obyek sesuai dengan rekening subrincian, atau bahkan terjadinya penambahan atau pengurangan rincian obyek pendapatan.
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten (Dinas Pendapatan) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan.</p> <p>Berbeda dari Sistem Keuangan, sistem ini membantu Eksekutif Kabupaten untuk secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber pendapatan.</p>
Organisasi	Dispenda Bagian Keuangan
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Perpajakan dan Retribusi Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Info Tambahan	Nama alias: MAPATDA, SIMPENDA

2.5.1.2 Sistem Informasi Perijinan Terpadu

Modul	PENDAFTARAN DAN PERIJINAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Admnistrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberian pelayanan perijinan dengan beberapa tujuan, seperti: - Pengelolaan dan pengurusan ijin <ul style="list-style-type: none"> ◦ Peruntukan tanah dan IMB ◦ SIUP ◦ HO ◦ Penyelenggaraan reklame ◦ Usaha Tetap (IUT) ◦ Usaha Industri (IUI) ◦ Lokasi - Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tanda Daftar Perusahaan ◦ Tanda Daftar Industri ◦ Tanda Daftar Perdagangan - Pengelolaan pendaftaran dan perijinan yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kehutanan ◦ Pertanian dan Perkebunan ◦ Perikanan dan Kelautan ◦ Pertambangan dan Energi ◦ Kepariwisata ◦ Industri Kecil dan Menengah
Narasi	Modul Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan

	<p>pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi: jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan. Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di download atau diisi secara on-line.</p> <p>Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai untuk mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis data sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib administrasinya.</p>
Organisasi	<p>Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Dinas PTP dan Holtikultura Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Dinas Koperasi & UKM Dinas Kehutanan & Perkebunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas kebersihan & Pertamanan Badan Lingkungan Hidup</p>
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan - Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Alias: SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran - Dasar Hukum: Peraturan Daerah - Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu yang melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.

2.5.1.3 Sistem Informasi Bisnis dan Investasi daerah

Modul	BISNIS DAN INVESTASI
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub Blok Fungsi	

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sektor Kehutanan ◦ Sektor Pertanian dan Perkebunan ◦ Sektor Perikanan dan Kelautan ◦ Sektor Pertambangan dan Energi ◦ Sektor Pariwisata ◦ Sektor Industri Kecil dan Menengah - Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan tatalaksana investasi dan pengusaha kegiatan bisnis lainnya - Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan tersebut
Narasi	<p>Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Kabupaten Karangasem.</p> <p>Pemerintah Kabupaten dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di daerah tersebut.</p>
Organisasi	Bagian Ekonomi
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan - Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi - Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya.

2.5.1.4

Sistem Informasi Hubungan Masyarakat

Modul	PENYEBARAN INFORMASI DAN PENAMPUNGAN PENGADUAN MASYARAKAT
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi - Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
Narasi	Salah satu tugas Pemerintah Kabupaten adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat.
Organisasi	Inspektorat Daerah
Integrasi	- Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	Nama Alias: SIM Pengaduan Masyarakat

2.5.1.5 Web Portal Kabupaten

Modul	PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPERINTAHAN
Blok Fungsi	PELAYANAN
Sub Blok Fungsi	

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	- Publikasi informasi
Narasi	Mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.
Organisasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
Integrasi	- Semua aplikasi e-Government yang membutuhkan publikasi informasi ke masyarakat
Info Tambahan	- Nama Alias: e-Gov Portal - Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat (public portal)

2.5.1.6

Sistem Informasi Pengelolaan dokumen Elektronik

Modul	DOKUMEN ELEKTRONIK
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi. - Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat. - Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lainlain.
Narasi	<p>Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa memakan waktu lama dan berhari-hari. Dengan sistem elektronik, maka proses tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat kurang lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan</p>
Organisasi	Bagian Umum
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: e-Mail, SIM Surat - Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan kabupaten, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.

2.5.1.7 Sistem Informasi Pengelolaan E-mail

Modul	SURAT ELEKTRONIK		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C		

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik untuk internal pemerintah kabupaten, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi. - Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat. - Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lainlain.
Narasi	Dalam sistem e-mail bisa, semua orang bisa mengirimkan apapun kepada siapapun. Pada system ini, diatur akur email resmi yang sesuai dengan system pemerintahan dengan batasan kuota untuk menjaga penggunaannya dari konten yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.
Organisasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
Integrasi	--
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: e-Mail, SIM Surat - Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan kabupaten, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.

2.5.1.8

SIM Arsip Daerah

Modul	SURAT DOKUMEN ELEKTRONIK		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT		
Sub Blok Fungsi			
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C		

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi. - Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan. - Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Kabupaten (yang ditempatkan dalam Lembaran Kabupaten), arsip daerah, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy. - Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen. - Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, versi / revisi, nomor, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional</p> <p>Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambil an keputusan bagi pimpinan.</p>
Organisasi	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Integrasi	
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: Document Management, SIM Arsip - Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Kabupaten, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.

2.5.1.9 Sistem Informasi Pendukung Keputusan

Modul	SURAT PENDUKUNG KEPUTUSAN
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	

Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat. - Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat, masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informasi bisa dari kalangan internal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun pemerintah yang lebih tinggi. - Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja. - Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi ini lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.
Narasi	<p>Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda-beda.</p> <p>Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai. Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi tersebut.</p>
Organisasi	Bagian Organisasi
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Semua system yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif kabupaten
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: DSS - Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan (mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapkan untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai dengan yang diharapkan.

2.5.1.10 E-Agenda (Agenda elektronik)

Modul	SURAT DOKUMEN ELEKTRONIK
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda kerja tiap unit organisasi - Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian ruang rapat dan sebagainya. - Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara elektronik. - Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti forum, chat, news, poling, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi Rapat On-Line
Narasi	<p>Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada kemudahan proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai.</p> <p>Misalnya: dengan mempublikasikan agenda ke setiap unit organisasi akan memudahkan sinkronisasi pekerjaan, terutama antara agenda pimpinan dan kepala dinas/lembaga teknis KABUPATEN terkait. Misalkan ada beberapa kegiatan yang terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui sebelumnya sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan.</p> <p>Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual (misalnya: TV atau layar komputer).</p>
Organisasi	Bagian Humas dan Protokol

Integrasi	
Info Tambahan	- Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.

2.5.1.11 SIM Pelaporan Kepemerintahan

Modul	SURAT MANAJEMEN DAN PELAPORAN
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Admnistrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana pelaporan eksekutif (Pemerintah Kabupaten) kepada instansi yang lebih atas sampai ke pemerintah pusat melalui Mendagri - Menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah diolah. Melalui sistem ini, eksekutif sudah tidak perlu lagi mengolah data yang masih mentah. - Menyediakan sarana pelaporan kepala dinas dan lembaga kepada WALIKABUPATEN melalui sekretaris kabupaten. - Menyediakan sarana pelaporan kepala daerah kepada DPRD.
Narasi	Dalam sistem pemerintahan kabupaten ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan. Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten dalam membuat sistem pelaporan elektronik (penyiapan dan pengolahan data pelaporan secara elektronik) sehingga mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Organisasi	Bagian Tata Pemerintahan
Integrasi	
Info Tambahan	- Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.

2.5.1.12 Sistem Informasi Administrasi DPRD/e-parliament

Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub Blok Fungsi	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD <ul style="list-style-type: none"> o Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD o Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD - Memfasilitasi pekerjaan DPRD <ul style="list-style-type: none"> o Penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat o Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah
Narasi	<p>Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang tergabung dalam collaboration and coordination.</p> <p>Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.</p>
Organisasi	Sekretariat DPRD
Integrasi	-

2.5.1.13 Sistem Informasi Pilkada

Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub Blok Fungsi	
Fungsi	- Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.
Narasi	UU 32/2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sendiri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilu daerah adalah proses yang kompleks (sama dengan pemilu nasional, hanya dengan lingkup yang lebih kecil). Oleh karena itu dengan bantuan sistem elektronik, proses pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan lebih sukses, transparan, dan cepat.

Organisasi	Sekretariat DPRD
Integrasi	-

2.5.1.14 SIM Katalog Hukum dan Perundangan

Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub Blok Fungsi	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan basis data semua produk hukum, peraturan dan perundangundangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, juga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. - Menyediakan fungsi klasifikasi dan kategorisasi produk hukum sesuai dengan sifat dan tujuannya, seperti perijinan, otonomi daerah, pemerintahan, kedinasan, kelembagaan, dan lain-lain - Menyediakan fungsi Query yang memudahkan untuk pencarian cepat produk hukum, peraturan dan perundang-undangan berdasarkan nomor, tanggal terbit, judul, kategori, dan lain-lain.
Modul	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi dan Mgm Data Pembangunan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Sistem Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan dan Monitoring Proyek - Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Organisasi	Bagian Hukum dan HAM
Integrasi	-

2.5.1.15 SIM Layanan Hukum dan HAM

Blok Fungsi	LEGISLASI
Sub Blok Fungsi	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan layanan hukum dan HAM bagi masyarakat yang umumnya awam dengan tujuan sebagai fasilitas masyarakat dalam layanan hukum. o Menyediakan fasilitas diskusi online untuk membahas masalah-masalah hukum dan HAM.

Narasi	Dengan adanya system ini, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai hukum dan HAM secara online, diskusi yang ditangani oleh ahlinya secara langsung.
Organisasi	Bagian Hukum dan HAM
Integrasi	-

2.5.1.16 *SIM Data Pembangunan*

Blok Fungsi	PEMBANGUNAN
Sub Blok Fungsi	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Modul pembangunan menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan kabupaten. - Proses kerja pembangunan kabupaten meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, termasuk dengan instansi pusat di daerah. o Penyusunan rencana strategis kabupaten dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan ke dalam program nasional. o Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten. o Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan kabupaten. o Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas kabupaten o Pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan
Modul	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi dan Mgm Data Pembangunan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Sistem Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan dan Monitoring Proyek - Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Organisasi	Bagian Pengendalian Pembangunan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Keuangan - Blok Fungsi Administrasi dan Management

2.5.1.17 *SIM Perencanaan Pembangunan Daerah/e-planning*

Modul	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-------	--------------------------------

Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Admnistrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan Pemda. - Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun). - Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak. - Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Narasi	<p>Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).</p> <p>Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut.</p>
Organisasi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Alias: SimBangDa - Dasar Hukum: UU 32/2004 - Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

2.5.1.18

SIM Pengadaan/e-procurement

Modul	SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan KepPres 80/2003. - Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah dilaksanakan Pemkab. - Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah Pemerintahan Kabupaten. - Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek. - Menyediakan sarana untuk pengumuman pekerjaan (d disesuaikan dengan sifat pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Pemkab, termasuk pengumuman siapa yang menjadi pemenang (pelaksana) pekerjaan.
Narasi	Sistem ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas dan penyedia barang / jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing. Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan barang sebelum kontrak. Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan (proyek) selanjutnya dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring Proyek.
Organisasi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bagian Perlengkapan
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Alias: SimProyek, e-Procurement. - Dasar Hukum: KepPres 80/2003. - Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kabupaten.

2.5.1.19 SIM Evaluasi dan Pengendalian Proyek

Modul	PENGLOLAAN DAN MONITORING PROYEK
-------	----------------------------------

Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemkab, termasuk Kecamatan dan Kelurahan. - Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs kemajuan fisik). - Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut.
Narasi	<p>Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemkab dalam 1 tahun jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif kabupaten membutuhkan informasi tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain.</p> <p>Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan rinci kepada eksekutif kabupaten sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.</p>
Organisasi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bagian Perlengkapan
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Alias: SimProyek - Dasar Hukum: KepPres 80/2003 - Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kabupaten.

2.5.1.20 SIM Pengawasan

Modul	PENGLOLAAN DAN MONITORING PROYEK
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Admnistrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan Kelurahan. - Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan. - Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (walikabupaten dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan di kabupaten Karangasem.
Narasi	<p>Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan kabupaten. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang.</p> <p>Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat Pemerintah Kabupaten sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas / lembaga yang ada.</p>
Organisasi	<p>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>Inspektorat Daerah</p>
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Alias: SIMBANGDA - Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kabupaten.

--	--

2.5.1.21 SIM Keuangan Daerah

Modul	SISTEM ANGGARAN
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran. - Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan. <ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan. o Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai sebagai rujukan.
Narasi	Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses data anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi penggunaan anggaran belanja.
Organisasi	Bagian Keuangan
Integrasi	Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah
Info Tambahan	- Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran

	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 - Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi kabupaten.
--	---

2.5.1.22 SIM Akuntansi Daerah

Modul	SISTEM AKUTANSI DAERAH
Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Admnistrasi <input type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan kabupaten. - Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan kabupaten, mengidentifikasi dan mengelompokkan data-data transaksi untuk keperluan penyusunan buku besar. - Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif kabupaten, berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan lainnnnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik publik maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan dll. <ul style="list-style-type: none"> o Resume bisa dilakukan setiap saat. o Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan memberikan informasi startegis keuangan misalnya: terjadinya bisa dari perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau belanja.
Narasi	<p>Sistem ini mengidentifikasi, dan mengelompokkan data-data transaksi yang tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan sub-ledger). Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian, dan laporan konsolidasi (laporan keuangan Pemkab).</p>
Organisasi	Bagian Keuangan
Integrasi	<p>Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran</p> <p>Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan</p>
Info Tambahan	

	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah - Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 - Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntansi kabupaten.
--	---

2.5.1.23 *SIM Perekonomian Daerah*

Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub Blok Fungsi	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Modul ini berfungsi untuk mengelola data perekonomian dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian kabupaten. - Proses kerja perekonomian kabupaten meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perencanaan perekonomian dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, termasuk dengan instansi pusat di daerah. ◦ Penyusunan rencana strategis kabupaten dan dokumen perencanaan perekonomian daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan ke dalam program nasional. ◦ Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten. ◦ Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan kabupaten. ◦ Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas kabupaten ◦ Pelaporan kegiatan pelaksanaan perekonomian
Narasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi dan Mgm Data perekonomian - Perencanaan perekonomian Daerah - Sistem Evaluasi Perekonomian
Organisasi	Bagian Pengendalian Pembangunan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Keuangan - Blok Fungsi Administrasi dan Management

2.5.1.24 *Sistem Informasi Geografis Potensi Ekonomi Daerah*

Blok Fungsi	KEUANGAN
Sub Blok Fungsi	

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi ekonomi kabupaten, yang menjadi sektor unggulan daerah. - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi ekonomi daerah - Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi ekonomi daerah dalam program pembangunan kabupaten - Menyajikan/merepresentasikan potensi ekonomi daerah dalam peta tematik
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten mempromosikan semua potensi ekonomi kabupaten yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Oleh karena itu, info potensi kabupaten harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundangundangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perijinan usaha.</p>
Organisasi	Bagian Perekonomian
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: - - Dasar hukum: -- - Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi ekonomi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.

2.5.1.25 SIM Kepegawaian daerah

Modul	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi	

Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaan pegawai sipil, termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekrutmen. - Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekrutmen pegawai PNS dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima). - Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang dapat diklasifikasikan, misal per periode pengadaan, jenis kelamin, kelompok umur, daya tampung, - Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja. - Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk di dalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai. - Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi / pemda tertentu. - Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi penggajian pegawai dll. - Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per satuan kerja, dll.
Narasi	<p>Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan.</p> <p>Sistem payroll (penggajian) yang disatukan dengan absensi akan mempermudah Pemda dalam mengontrol kinerja pegawainya, terutama jika diinginkan menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman yang dikaitkan dengan penerimaan pendapatan.</p>
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah
Integrasi	

	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIMPEG - Dasar hukum: PP 11/2002 (perubahan PP 98/2000) - Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e-Government bertema keuangan.

2.5.1.26 E-Learning Pegawai

Modul	PENDIDIKAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan pegawai ◦ Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai ◦ Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya ◦ Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT ◦ Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer 		
Narasi	Melalui sistem ini pegawai dapat mendapatkan pengajaran secara online, ujian online dan memperoleh sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.		
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.		
Info Tambahan	Nama alias: SIMDIKDA		

2.5.1.27 SIM Diklat Pegawai daerah

Modul	SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi	
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai. - Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya. - Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT. - Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer.
Narasi	<p>Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi.</p>
Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIMDIKLAT - Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitasnya.

2.5.1.28

SIM Aset dan Barang Daerah

Modul	PENGELOLAAN BARANG DAERAH
-------	---------------------------

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang kabupaten, memperkirakan kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini. - Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah. - Pemeliharaan barang kabupaten. - Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, pemanfaatan dan sebagainya. - Perubahan status hukum barang daerah, memproses administrasi semua barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya. - Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadi bagian yang produktif terutama yang tidak bergerak dan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset. - Pengamanan barang kabupaten. - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang kabupaten. - Pembiayaan pengelolaan barang kabupaten. - Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh Pemkab dalam menjalankan pemerintahan. - Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses pemeliharaan dan sebagainya. - Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten. - Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun pembuatan, lokasi, unit kerja, dll. - Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan anggaran pengadaan barang.
Narasi	<p>Tujuan sistem pengelolaan barang kabupaten adalah: terciptanya efisiensi pengelolaan barang kabupaten, optimalnya pemanfaatan barang kabupaten untuk meningkatkan pendapatan kabupaten serta meningkatnya manfaat barang kabupaten</p>

	yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Organisasi	Bagian Perlengkapan
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIMBADA - Dasar hukum: Kepmendagri 152/2004 - Rekomendasi: (1) Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi dengan sistem perencanaan dan sistem monitoring proyek (barang dalam proyek menjadi aset setelah proyek selesai). (2) Memastikan bahwa sistem pengelolaan barang bisa memberikan bantuan ke sistem keuangan terutama perkiraan dan perencanaan anggaran.

2.5.1.29 *SIM Protokoler*

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Modul ini berfungsi untuk mengelola protokoler dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan system protokoler pemerintahan
Narasi	Sistem ini mengatur keprotokoleran alur perintah dan koordinasi di pemerintahan kabupaten.
Organisasi	Bagian Humas dan Protokol
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Dinas dan Kelembagaan - Blok Fungsi Administrasi dan Management

2.5.1.30 *SIM Tata Laksana Lembaga*

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Modul ini berfungsi untuk mengelola tata usaha organisasi pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten.

Narasi	Sistem ini mengatur koordinasi antar SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten.
Organisasi	Bagian Organisasi
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Dinas dan Kelembagaan - Blok Fungsi Administrasi dan Management

2.5.1.31 SIM Perjalanan Dinas

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Modul ini berfungsi untuk mengelola agenda perjalanan dinas
Narasi	Sistem ini mengatur koordinasi antar SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten agar agenda perjalanan dinas yang dilakukan tidak berganda dan tidak tepat sasaran.
Organisasi	Bagian Umum
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Dinas dan Kelembagaan - Blok Fungsi Pemerintahan

2.5.1.32 SIM Pemeliharaan dan Perbaikan

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Modul ini berfungsi untuk mengelola pemeliharaan asset dan barang milik negara
Narasi	Sistem ini mengatur pengelolaan, anggaran dan penanggungjawab dalam pemeliharaan barang milik negara.
Organisasi	Bagian Perlengkapan
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Fungsi Dinas dan Kelembagaan

	- Blok Fungsi Pemerintahan
--	----------------------------

2.5.1.33 SIM Tata Ruang Wilayah

Modul	TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan tanah. <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pertanahan Pemerintah Kabupaten o Pembuatan peta tematik peruntukan tanah / lahan sesuai dengan rencana umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah resapan, daerah hutan, persawahan, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan. - Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat. - Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk perumahan, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem tata ruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke Pemerintah Kabupaten dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah, misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain. Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan dengan lebih akurat dan lebih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.</p>
Organisasi	<p>Dinas PU Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p>

	Kecamatan Kantor Satpol PP
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	- Nama alias: SIM Tata Ruang - Rekomendasi: membangun sistem tataruang dan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.

2.5.1.34 SIM Pengelolaan Lingkungan Hidup

Modul	PENGLOLAAN LINGKUNGAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi lingkungan hidup, yang menjadi sektor unggulan daerah. - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data lingkungan hidup - Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan lingkungan hidup dalam program pembangunan kabupaten - Menyajikan/merepresentasikan lingkungan hidup dalam peta tematik
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten mempromosikan semua daerah lingkungan hidup yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik, dan diharapkan dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Oleh karena itu, info potensi kabupaten harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundangundangan yang berhubungan.</p>
Organisasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan
Info Tambahan	- Nama alias: --

	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum: -- - Rekomendasi: membangun sistem informasi lingkungan hidup dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggungjawab dari sektor unggulan daerah.
--	---

2.5.1.35 SIM Potensi Daerah

Modul	POTENSI DAERAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi kabupaten, yang menjadi sektor unggulan daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kehutanan ◦ Pertanian dan Perkebunan ◦ Perikanan dan Kelautan ◦ Pertambangan dan Energi ◦ Pariwisata ◦ Industri Kecil dan Menengah - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah - Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan kabupaten - Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten mempromosikan semua potensi kabupaten yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Oleh karena itu, info potensi kabupaten harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundangundangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perijinan usaha.</p>
Organisasi	Dinas Kehutanan & Perkebunan

	Dinas Peternakan, Kelautan & Perikanan Dinas PTP dan Holtikultura
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan	- Nama alias: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA - Dasar hukum: -- - Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggungjawab dari sektor unggulan daerah.

2.5.1.36 SIM Kehutanan dan Perkebunan

Modul	PERTANIAN, PERTENAKAN DAN PERKEBUNAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/> Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Admnistrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	G2B G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi kabupaten, terutama di sektor kehutanan & perkebunan, termasuk didalamnya. <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah hutan dan perkebunan (raw data) o Pembuatan peta penggunaan tanah untuk perkebunan, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain o Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun) - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perkebunan dan hutan - Menyediakan sistem informasi kehutanan dan perkebunan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Membentuk jaringan informasi kehutanan dan perkebunan antara dinas serta masyarakat o Inventarisasi usaha pengolahan hasil hutan dan perkebunan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan perkebunan o Menjembatani antara hasil kebun, pasar hasil kebun, usaha alat-alat perkebunan, serta hasil-hasil penelitian bidang perkebunan. 		

Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perkebunan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolaanya.</p> <p>Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil perkebunan serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil perkebunan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi perkebunan, dan sebagainya.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kabupaten.</p>
Organisasi	Dinas Kehutanan & Perkebunan
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIM Pertanian, SIM Perkebunan - Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dan perkebunan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

2.5.1.37 SIM Perikanan dan Kelautan

Modul	PERIKANAN DAN KELAUTAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B G2C		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi KABUPATEN, terutama di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (raw data) o Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan, misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan lain-lain - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan - Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan 		

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perikanan dan kelautan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten dalam mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kabupaten.</p>
Organisasi	Dinas Peternakan, Kelautan & Perikanan
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan - Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi kabupaten.

2.5.1.38

SIM Pertanian Dan tanaman Holtikultura

Modul	PERTANIAN, PERTENAKAN DAN PERKEBUNAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office 		
	Layanan Utama <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya 		
	Fungsi Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik 		
	Obyek Layanan <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> G2G 	G2B	G2C

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi kabupaten, terutama di sektor Pertanian Perkebunan, termasuk didalamnya. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pemetaan wilayah pertanian (raw data) ◦ Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain ◦ Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun) - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian - Menyediakan sistem informasi pertanian, meliputi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Membentuk jaringan informasi pertanian antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat ◦ Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian ◦ Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alat-alat pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertanian, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolaanya.</p> <p>Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil pertanian tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi pertanian, dan sebagainya.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kabupaten.</p>
Organisasi	Dinas PTP & Holtikultura
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIM Pertanian - Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

2.5.1.39

SIM Peternakan

Modul	PERTANIAN, PERTENAKAN DAN PERKEBUNAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN

Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi kabupaten, terutama di sektor peternakan, termasuk didalamnya. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pemetaan wilayah peternakan(raw data) ◦ Pembuatan peta penggunaan tanah untuk peternakan, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain ◦ Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun) - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data peternakan - Menyediakan sistem informasi peternakan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Membentuk jaringan informasi peternakan antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat ◦ Inventarisasi usaha pengolahan hasil peternakan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan peternakan ◦ Menjembatani antara hasil ternak, pasar hasil peternakan, usaha alat-alat peternakan, serta hasil-hasil penelitian bidang peternakan.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi peternakan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan peternakan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para peternak dapat mengetahui harga dasar hasil peternakan serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil peternakan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi peternakan, dan sebagainya.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kabupaten.</p>
Organisasi	Dinas peternakan Kelautan & Perikanan
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIM Peternakan - Rekomendasi: membangun sistem informasi Peternakan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

Modul	PARIWISATA
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya <ul style="list-style-type: none"> o Pemetaan wilayah pariwisata (raw data) o Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lainlain. o Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site map wisata). - Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata - Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain. o Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain. - Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi <ul style="list-style-type: none"> o Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll) o Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb) o Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah)
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Kabupaten untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kabupaten.</p>
Organisasi	Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.
Info Tambahan	- Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata - Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.

2.5.1.41 SIM UKM

Modul	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor UKM. - Mendokumentasikan (basis data) kegiatan UKM, meliputi jenis bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-lain. - Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya - Menyediakan sistem informasi UKM kepada organisasi pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi UKM, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan UKM serta memberikan pembinaan untuk peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga keuangan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	Dinas Koperasi & UKM
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.
Info Tambahan	- Nama alias: SIM IKM, SIM UKM

	- Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi kabupaten.
--	---

2.5.1.42 SIM Koperasi

Modul	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p> <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p> <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama koperasi. - Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi, meliputi jenis bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-lain. - Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya - Menyediakan sistem informasi koperasi kepada organisasi pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi koperasi, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan koperasi serta memberikan pembinaan untuk peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga keuangan.</p> <p>Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.</p>
Organisasi	Dinas Koperasi & UKM
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah.
Info Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama alias: SIMKOP - Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi

potensi kabupaten.

2.5.1.43 SIM Puskesmas

Modul	KESEHATAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain. - Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah o Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Narasi	<p>Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi nama dan tempat lokasi puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.</p> <p>Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program Kerja di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus dan tepat sasaran.</p>
Organisasi	Dinas Daerah (Dinas Kesehatan) Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMKES

2.5.1.44 SIM Jaringan Kesehatan Daerah

Modul	KESEHATAN
-------	-----------

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi jaringan kesehatan daerah kepada masyarakat meliputi program kesehatan pemerintah dan tempat-tempat yang menjadi pusat layanannya. - Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah ◦ Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium kesehatan dan sebagainya.
Narasi	<p>Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar program kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan program kesehatan tersebut.</p> <p>Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status program kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan rencana program Kerja di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus dan tepat sasaran.</p>
Organisasi	Dinas Daerah (Dinas Kesehatan) Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMKES

2.5.1.45 SIM RSUD

Modul	KESEHATAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain. - Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah o Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat.
Narasi	<p>Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.</p> <p>Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program Kerja di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus dan tepat sasaran.</p>
Organisasi	Dinas Daerah (Dinas Kesehatan) Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMKES

2.5.1.46

E-Learning Dikdasmen

Modul	PENDIDIKAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan siswa ◦ Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi siswa ◦ Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya ◦ Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju masyarakat berbasis IT ◦ Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer
Narasi	Melalui sistem ini pegawai dapat mendapatkan pengajaran secara online, ujian online dan memperoleh sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMDIKDA

2.5.1.47

SIM Pendidikan Daerah/e-Education

Modul	PENDIDIKAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C		

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruan tinggi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Info sekolah dan alamatnya. ◦ Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajarmengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. ◦ Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional. - Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. - Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain. ◦ Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu institusi pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemkab.
Narasi	<p>Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.</p> <p>Untuk kepentingan Pemkab, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.</p>
Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMDIKDA

2.5.1.48 SIM Sekolah

Modul	PENDIDIKAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi sekolah, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruan tinggi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Info sekolah dan alamatnya. o Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajarmengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. o Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional. - Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain.
Narasi	<p>Melalui sistem informasi sekolah dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.</p> <p>Untuk kepentingan Pemkab, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.</p>
Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMSEKOLAH

2.5.1.49

SIM Perindag

Modul	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain. - Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan waktu pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi konsultasi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultasi bisnis / pembinaan usaha IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar saham, dan lain-lain.</p> <p>Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Kabupaten dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang UKM Salah satu medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultasi on-line melalui internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain.</p>
Organisasi	Dinas Koperasi & UKM
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan
Info Tambahan	Nama alias: SIMINDAG

2.5.1.50

SIM Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Modul	KETENAGAKERJAAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA

Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	- Memberikan informasi tentang kegiatan pemuda dan olahraga yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. - Memberikan informasi umum tentang kegiatan pemuda dan olahraga.
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi kegiatan pemuda dan olahraga. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi. Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat.
Organisasi	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: --

2.5.1.51 E-Job/E-recruitmen

Modul	KETENAGAKERJAAN
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi / lembaga / perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain. - Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning) - Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain) - Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain. - Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> o Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan yang berlaku o Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan yang umum seperti konstruksi, pertambangan, eksplorasi, dan lain-lain. o Sistem jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja, sistem pensiun dan penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi / lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain.</p> <p>Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya, dan lain-lain.</p>
Organisasi	Dinas Tenaga Kerja
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMNAKER

2.5.1.52 SIM Jaringan Pengaman Sosial

Modul	JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
-------	--------------------------

Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARAKATAN
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, dan lain-lain. - Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan lain-lain. - Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan tatacara / prosedur penanggulangannya. Beberapa masalah yang dibahas terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti: pengangguran (kehilangan pekerjaan), kekurangan makanan, obat-obatan, air bersih, dan lain-lain. Termasuk didalamnya tentang tatacara permohonan bantuan untuk bencana alam, kebakaran, phk massal (penutupan perusahaan), dan lain-lain. - Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhubungan.
Narasi	<p>Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah terlambat mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya / atau terlambatnya data yang masuk ke Pemerintah dan institusi sosial lainnya.</p> <p>Disisi lain juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.</p> <p>Dengan sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi masalah tersebut diatas, karena setiap kegiatan kesejahteraan sosial bisa dikoordinasikan dan diawasi dengan baik.</p>
Organisasi	Dinas Sosial
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.

Info Tambahan	Nama alias: SIM JPS
---------------	---------------------

2.5.1.53 SIM Penanganan Kebakaran

Modul	PENANGANAN KEBAKARAN		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA		
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan
		<input type="checkbox"/> Transaksi Data	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input type="checkbox"/> Admnistrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis Data
		<input type="checkbox"/> Lainnya	
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/> Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi sarana dan prasarana jalur hydrant kepada masyarakat. - Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan cara-cara penanggulangan kebakaran dan prosedur penyelamatan darurat. - Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi hydrant dan jalur air kabupaten. - Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. - Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring jalur air secara berkala. 		
Narasi	Sistem informasi penanganan kebakaran, fungsinya menunjang kelancaran sistem pemerintahan. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem penyelamatan masyarakat, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.		
Organisasi	Dinas Perhubungan & Pemadam Kebakaran		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.		
Info Tambahan			

2.5.1.54 SIM Penanganan Bencana

Modul	BANTUAN BENCANA
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA

Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi daerah rawan bencana kepada masyarakat. - Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan cara-cara penanggulangan dan prosedur penyelamatan darurat. - Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi daerah rawan bencana kabupaten. - Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. - Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring daerah rawan bencana secara berkala.
Narasi	Sistem informasi bantuan bencana, fungsinya menunjang kelancaran sistem pemerintahan. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem penyelamatan masyarakat, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.
Organisasi	Dinas Perhubungan & Pemadam Kebakaran
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	

2.5.1.55

SIM Kesra

Modul	KESEJAHTERAAN RAKYAT
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	- Publikasi informasi kesejahteraan masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat - Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas.
Narasi	Sistem informasi kesejahteraan masyarakat, fungsinya menunjang kelancaran sistem pemerintahan. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.
Organisasi	Kantor Ketahanan Pangan Bagian Kesejahteraan Rakyat
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	

2.5.1.56 SIM Pembinaan Organisasi Non Pemerintah

Modul	ORGANISASI NON PEMERINTAH		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C		
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi organisasi non-pemerintah - Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan organisasi non pemerintah dan cakupan bidangnya - Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. 		
Narasi	Sistem informasi organisasi non pemerintah, fungsinya menunjang kelancaran sistem pemerintahan. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat manfaat lingkungan dari organisasi non-pemerintah tersebut, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.		
Organisasi	Kantor Ketahanan Pangan Bagian Kesejahteraan Rakyat		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.		

Info Tambahan	
---------------	--

2.5.1.57 SIM Transportasi Daerah / e-transportation

Modul	JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat meliputi: transportasi darat, sungai, laut dan udara. - Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain. - Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, sungai, laut dan udara, Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan, termasuk pesawat udara. - Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas: <ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat o Menyediakan informasi sistem transportasi sungai ke masyarakat o Menyediakan informasi sistem transportasi laut ke masyarakat o Menyediakan informasi sistem transportasi udara ke masyarakat - Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lain-lain.
Narasi	<p>Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perjalanan, baik darat, sungai, laut dan udara. Dengan mudah rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, seperti bus, kereta api,</p>

	kapal, ferry, pesawat udara, dan lain-lain. Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten dalam mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah, sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi.
Organisasi	Dinas Perhubungan & Pemadam Kebakaran
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIM Transportasi

2.5.1.58 SIM Pekerjaan Umum

Modul	PEKERJAAN UMUM
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Admnistrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<p>- Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pekerjaan umum tersebut di atas.</p> <p>- Melakukan pengelolaan pekerjaan umum yang meliputi, sarana jembatan, terminal dan jalan.</p> <p>-</p>
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten dalam mengevaluasi pengelolaan pekerjaan umum yang disediakan, bagaimanapun status kelayakan operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi / redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan sarana / perbaikan fasilitas, dan lain-lain.
Organisasi	Dinas Pekerjaan Umum
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	

2.5.1.59 SIM Perpustakaan

Modul	SARANA UMUM
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi	<p>Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office</p> <p>Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan</p> <p><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran</p> <p><input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik</p> <p>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi informasi perpustakaan kepada masyarakat . - Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan perpustakaan - Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi sarana umum tersebut di atas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. - Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring efektifitas pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana umum bagi masyarakat
Narasi	Sistem ini membantu Pemerintah Kabupaten dalam mengevaluasi tingkat efektifitas pemanfaatan sarana umum yang disediakan, bagaimanapun status kelayakan operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi / redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan sarana / perbaikan fasilitas, dan lain-lain.
Organisasi	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.
Info Tambahan	

3. Rincian hasil simulasi estimasi kebutuhan biaya pengembangan dan implementasi e-Government Kabupaten Karangasem selama 5 tahun

Kebutuhan selama 5 tahun	Moderate	High	Low
Software	14,648,000,000	19,875,000,000	8,781,000,000
Hardware	9,724,560,000	11,210,360,000	8,490,405,000
biaya SDM	3,699,000,000	4,967,100,000	2,757,500,000
Total Hardware+Software	24,372,560,000	31,085,360,000	17,271,405,000
Total Hardware+Software+SDM 5 tahun	28,071,560,000	36,052,460,000	20,028,905,000
Rata-rata kebutuhan pertahun	5,614,312,000	7,210,492,000	4,005,781,000
Asumsi Rata-rata potensi APBD per tahun	600,000,000,000	600,000,000,000	600,000,000,000
% biaya eGov terhadap APBD	0.936%	1.202%	0.668%

Simulasi Estimasi biaya Pengembangan Aplikasi e-Government

No	Aplikasi	M	H	L
1	Portal Informasi Kabupaten	350,000,000	400,000,000	250,000,000
2	SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik	200,000,000	250,000,000	150,000,000
3	e-mail	50,000,000	60,000,000	30,000,000
4	e-Agenda	80,000,000	120,000,000	50,000,000
5	SIM Pelaporan Pemerintahan	180,000,000	250,000,000	120,000,000
6	SIM Perijinan Terpadu	390,000,000	450,000,000	300,000,000
7	SIM Pendapatan Daerah	350,000,000	400,000,000	60,000,000
8	e-Planning/SIMRENBANGDA	400,000,000	450,000,000	150,000,000
9	SIM Bisnis dan Investasi Daerah	180,000,000	250,000,000	150,000,000
10	SIM Pariwisata & Kebudayaan:	250,000,000	300,000,000	60,000,000
11	SIM Pertanian	250,000,000	250,000,000	60,000,000
12	e-procurement/SIM Pengadaan	200,000,000	250,000,000	150,000,000
13	SI Administrasi Kependudukan & Capil	450,000,000	1,000,000,000	250,000,000
14	e-health/SI Jakesda	350,000,000	800,000,000	250,000,000
15	SIM Akuntansi Daerah	200,000,000	350,000,000	175,000,000
16	SIM Kepegawaian Daerah	200,000,000	350,000,000	175,000,000
17	SI Pilkada	180,000,000	250,000,000	100,000,000
18	SIM Perekonomian Daerah	300,000,000	300,000,000	125,000,000
19	SIM Kesra	340,000,000	450,000,000	150,000,000
20	e-Job/e-recruitment	200,000,000	300,000,000	150,000,000
21	SIM Peternakan	180,000,000	250,000,000	60,000,000
22	SIM RSUD	230,000,000	250,000,000	150,000,000
23	SIM Pengawasan	200,000,000	250,000,000	150,000,000
24	e-transportation/SIM Transportasi	300,000,000	550,000,000	150,000,000
25	SI Pengelolaan Lingkungan	180,000,000	250,000,000	125,000,000
26	SIM Arsip Daerah	180,000,000	250,000,000	60,000,000
27	SIM Asset dan Barang Daerah	300,000,000	350,000,000	125,000,000
28	SIM Evaluasi dan Pengendalian Proyek	250,000,000	250,000,000	125,000,000
29	SIM Kehutanan dan Perkebunan	250,000,000	250,000,000	90,000,000
30	SIM kelautan dan Perikanan	250,000,000	250,000,000	90,000,000
31	SIM Pekerjaan Umum	250,000,000	300,000,000	150,000,000
32	SIM Pembinaan Pemuda & Olahraga	180,000,000	200,000,000	100,000,000
33	SIM Pemeliharaan & Perbaikan	250,000,000	300,000,000	125,000,000

No	Aplikasi	M	H	L
34	SIM Perjalanan Dinas	80,000,000	80,000,000	50,000,000
35	SIM Puskesmas	180,000,000	200,000,000	150,000,000
36	SIM Sekolah	150,000,000	200,000,000	125,000,000
37	SIM Keuangan Daerah	350,000,000	450,000,000	200,000,000
38	e-education/ SIMDIKDA	300,000,000	450,000,000	150,000,000
39	SIM Koperasi	180,000,000	250,000,000	125,000,000
40	SIM Tata Ruang	325,000,000	400,000,000	200,000,000
41	SIM UKM	160,000,000	250,000,000	125,000,000
42	SIM Humas	100,000,000	150,000,000	80,000,000
43	SIM BUMD	150,000,000	200,000,000	120,000,000
44	SIM Katalog HUKum dan Perundangan	125,000,000	200,000,000	60,000,000
45	e-Parliament	150,000,000	400,000,000	120,000,000
46	e-Learning Dikdasmen	600,000,000	850,000,000	300,000,000
47	SIM Diklat Daerah	175,000,000	200,000,000	125,000,000
48	e-Learning Diklat Pegawai	425,000,000	600,000,000	200,000,000
49	SIM perindag	180,000,000	250,000,000	150,000,000
50	SIM Data Pembangunan	80,000,000	150,000,000	80,000,000
51	SIM Organisasi Non-Pemerintah	150,000,000	180,000,000	150,000,000
52	SIG –Potensi Ekonomi Daerah	375,000,000	450,000,000	250,000,000
53	SI Pendukung Keputusan	320,000,000	400,000,000	175,000,000
54	SIM Bantuan dan Bencana	150,000,000	200,000,000	100,000,000
55	SIM Tata Laksana Kelembagaan	125,000,000	150,000,000	100,000,000
56	SIM Protokoler	80,000,000	100,000,000	60,000,000
57	SIM Layanan Hukum & HAM	180,000,000	200,000,000	100,000,000
58	SI Jaringan Pengaman Sosial	150,000,000	200,000,000	100,000,000
59	SIM perpustakaan	150,000,000	200,000,000	150,000,000
60	SIM Penanganan Kebakaran	100,000,000	150,000,000	60,000,000
61	Aplikasi Umum License	368,000,000	460,000,000	276,000,000

Simulasi Estimasi biaya Pengembangan Datawarehouse e-Government

No	Aktivitas	M	H	L
1	Pembuatan Standarisasi Definisi Data	150,000,000	200,000,000	120,000,000
2	Implementasi Standarisasi Definisi Data	90,000,000	125,000,000	75,000,000
3	Pembuatan Datawarehouse	250,000,000	350,000,000	175,000,000
4	Pengembangan dan implementasi proses analisis data	200,000,000	300,000,000	125,000,000

Simulasi Estimasi biaya Penyediaan Infrastruktur Perangkat Keras dan Jaringan e-Government

No	Jenis Perangkat	Jlh	Keterangan	Harga satuan	Q	Biaya M	Biaya H	Biaya L
1	File Server (termasuk Software)	1 unit	Ditempatkan di pusat data, spesifikasi minimal : Prosesor 3 GHz, Memory 2 GB, Hadrisk 12 x 400Gb (=4,8 TB)	75,000,000	1	75,000,000	100,000,000	50,000,000
2	Mail server (termasuk Software)	1 unit	Ditempatkan di pusat data, spesifikasi minimal : Prosesor 2 GHz, RAM 2 GB, Hadrisk 250 GB	25,000,000	1	25,000,000	35,000,000	12,500,000
3	DNS & proxy server (termasuk Software)	1 unit	Ditempatkan di pusat data, spesifikasi minimal : Prosesor 2 GHz, RAM 1 GB, Hadrisk 250 GB	22,500,000	1	22,500,000	25,000,000	10,000,000
4	Web server for portal (termasuk OS)	1 unit	Ditempatkan di pusat data, spesifikasi minimal : Prosesor 2 GHz, RAM 4 GB, Hadrisk 250 GB	25,000,000	1	25,000,000	27,500,000	15,000,000
5	Database server (termasuk OS)	4 unit	Ditempatkan di pusat data, spesifikasi minimal : Prosesor 2 GHz, RAM 2 GB, Hadrisk 4 x 250 GB	30,000,000	4	120,000,000	140,000,000	72,000,000
6	Back up server (termasuk OS)	2 unit	Ditempatkan di pusat data, spesifikasi minimal : Prosesor 2 GHz, RAM 1 GB, Hadrisk 250 GB	18,000,000	2	36,000,000	55,000,000	25,000,000

No	Jenis Perangkat	Jlh	Keterangan	Harga satuan	Q	Biaya M	Biaya H	Biaya L
7	Internet Connection VPN 2Mbps	5 tahun	VPN IP Dedicated 2 Mbps	108,000,000	5	540,000,000	540,000,000	540,000,000
8	Router & security	2 unit	consolidation & access router :VPN Router 1-port WAN, 4-port 10/100 Base-T Switch LAN, 1 port PIC, 1 port Async console	12,000,000	2	24,000,000	28,000,000	20,000,000
9	Catalist & switch	4 unit	24 10/100 Mbps port autosensing, Support RMON, SNMPv2. Backplane: sedikitnya 8 Gbps, Forwarding rate: sedikitnya 1 Mpps	10,000,000	4	40,000,000	48,000,000	34,000,000
10	Rack mount	1 unit		14,000,000	1	14,000,000	18,000,000	12,000,000
11	DNOC Room equipment	1 unit		150,000,000	1	150,000,000	250,000,000	150,000,000
12	Installation	1 paket		50,000,000	1	50,000,000	70,000,000	50,000,000
13	UPS	5 unit	APC SURT500XLi Smart UPS RT 500VA with software, extended runtime battery pack, and 3U rackmount option (Black Case)	6,500,000	5	32,500,000	37,500,000	30,000,000
14	Tower	1 unit	Triangle/Fourth Angle ,Termasuk antipetir dan lampu sign, diupayakan memanfaatkan tower yang sudah ada di Diskominfo	9,000,000	1	9,000,000	10,000,000	9,000,000
15	Antenna pada Tower	1 unit	Omni Antenna untuk multipoint, atau diupayakan memanfaatkan antenna yang sudah ada di Diskominfo	1,750,000	1	1,750,000	2,000,000	1,500,000
1	Router Klien VPN	14 unit	Remote Router, untuk menjalankan solusi VPN hardware based	4,000,000	14	56,000,000	63,000,000	49,000,000
2	Tower Klien (SKPD)	17 unit	Ketinggian disesuaikan topologi, Triangle/ Fourth Angle	9,000,000	17	153,000,000	170,000,000	153,000,000

No	Jenis Perangkat	Jlh	Keterangan	Harga satuan	Q	Biaya M	Biaya H	Biaya L
			,Termasuk antipetir & lampu sign					
3	Antenna pada Tower	17 unit	Antenna Omni, untuk membuat koneksi WLAN multipoint disekitar kantor	1,750,000	17	29,750,000	34,000,000	25,500,000
4	Accesspoint	17 unit	Accesspoint untuk kantor yang berdekatan dengan tower	1,800,000	17	30,600,000	30,600,000	23,800,000
1	Fiber Optic Cable	500 m	12-Core Cable Armored Outdoor (1000m)	35,000	500	17,500,000	17,500,000	15,000,000
2	Converter	28 unit	fiber jack (RJ45_FO/SMA 906)	1,000,000	26	26,000,000	26,000,000	26,000,000
3	Segmen STP	2 sgm		2,000,000	2	4,000,000	4,000,000	4,000,000
4	Switch 24 Port w/ 2 port FO	14 unit	manageable	3,300,000	13	42,900,000	42,900,000	42,900,000
5	UPS -FO	1 unit		1,500,000	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000
6	UTP Cabel	7 rol		600,000	7	4,200,000	4,200,000	4,200,000
7	UTP Connector	7 set	RJ 45 Connector	20,000	7	140,000	140,000	140,000
8	Installation FO	500 m		20,000	500	10,000,000	10,000,000	10,000,000
9	Installation terminasi	14 core		500,000	13	6,500,000	6,500,000	6,500,000
1	Application Server (termasuk software)	42unit	Ditempatkan di setiap kantor , spesifikasi minimal : Prosesor 2 GHz, RAM 2 GB, Hadrisk 160 GB	18,000,000	42	756,000,000	1,050,000,000	630,000,000
2	UPS	42 unit	min 500 VA	1,350,000	42	56,700,000	63,000,000	63,000,000
3	PC Desktop (termasuk OS & Software)	466 unit	spesifikasi minimal Prosesor 2Ghz, RAM 1 GB, HD 160 GB,LCD monitor	8,500,000	466	3,961,000,000	4,194,000,000	3,495,000,000
4	Notebook (termasuk OS & Software)	89 unit	spesifikasi minimal Prosesor 2Ghz, RAM 1 GB, HD 160 GB, LCD 10"-12"	12,000,000	89	1,068,000,000	1,112,500,000	801,000,000

No	Jenis Perangkat	Jlh	Keterangan	Harga satuan	Q	Biaya M	Biaya H	Biaya L
5	Scanner+Printer	37 unit	untuk menunjang sistem pengelolaan dokumen elektronik, minimal 1 di setiap SKPD	1,500,000	37	55,500,000	64,750,000	46,250,000
6	Digital Camera	18 unit	untuk menunjang sistem pengelolaan dokumen elektronik, minimal 1 di setiap SKPD	2,500,000	18	45,000,000	49,500,000	32,400,000
7	LCD Projector	30 unit	untuk melakukan presentasi dalam suatu pertemuan, minimal 1 di setiap SKPD	9,500,000	30	285,000,000	300,000,000	255,000,000
8	Web Cam	50 unit	di pasang minimal 1 di PC pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah	750,000	50	37,500,000	45,000,000	35,000,000
9	Cable	41 rol		600,000	41	24,600,000	30,750,000	24,600,000
10	Switch 24 Port	41 unit	manageable	2,200,000	41	90,200,000	102,500,000	82,000,000
11	Connector	41 paket	RJ 45 Connector	20,000	41	820,000	820,000	615,000
12	Pacth Panel	1 unit	48 port	2,000,000	1	2,000,000	2,500,000	2,000,000
13	Kiosk Information	12 unit	merupakan fasilitas yang pada digunakan pengunjung untuk mengakses informasi terkini kabupaten, hanya di kantor bupati, pelayanan perijinan, kecamatan, dan disdukcapil, disnakertrans	40,000,000	12	480,000,000	600,000,000	420,000,000
14	LCD Matriks Display	4 unit	Di kantor bupati (untuk informasi eksternal & internal), di kantor pelayanan perijinan. Disdukcapil, disnakertrans	20,000,000	4	80,000,000	100,000,000	80,000,000
15	Indoor Accesspoint WLAN	22 unit	Memfasilitasi Hot Spot di area layanan publik kantor	700,000	22	15,400,000	18,700,000	11,000,000
16	Perangkat Video Conference	1 set	Ditempatkan di Aula kantor Bupati	50,000,000	1	50,000,000	80,000,000	40,000,000

No	Jenis Perangkat	Jlh	Keterangan	Harga satuan	Q	Biaya M	Biaya H	Biaya L
17	Pemeliharaan	5 tahun	Pemeliharaan jaringan dan perbaikan	50,000,000	5	250,000,000	400,000,000	200,000,000
18	Paket Jaringan & Komputer ke Kelurahan+desa	40 paket	LAN, Komputer, Scanner, Printer, Scanner, Tower, Accesspoint, per tahun 8 desa	23,000,000	40	920,000,000	1,200,000,000	880,000,000

Simulasi Estimasi biaya Pengembangan SDM e-Government

Kategori	Komposisi	frek per thn	Biaya per training	Biaya Rp		
				M	H	L
pemimpin	5%	1	4,000,000	400,000,000	500,000,000	300,000,000
Pengelola	7%	2	5,000,000	1,500,000,000	2,100,000,000	1,050,000,000
Pengguna						
Pengguna1		1	1,500,000	1,149,000,000	1,417,100,000	957,500,000
Pengguna2		1	650,000	650,000,000	950,000,000	450,000,000
				3,699,000,000	4,967,100,000	2,757,500,000